

STATISTIK PENDUDUK LANJUT USIA TAHUN 2004

ISBN : 979 – 724 – 214–5
No. Publikasi : 04220.0403
Katalog BPS : 4611.
Ukuran Buku : 21 Cm x 29 Cm
Jumlah Halaman : 136

Naskah:

Subdirektorat Statistik Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial

Gambar Kulit:

Subdirektorat Statistik Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial

Diterbitkan oleh;

Badan Pusat Statistik, Jakarta – Indonesia

Dicetak oleh:

C.V. RIOMA

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

TIM PENYUSUN

Kordinator Penulis : Arizal Ahnaf, MA

Penulis : Ir. Meity Trisnowati
Bambang Susilo, Sst
Tono Iriantono, Ssi
Saadah, Sst
Ida Eridawati, Ssi

Penyunting : Arizal Ahnaf, MA
Ir. Meity Trisnowati

Pengolah Data : Sugih Hartono, Ssi

Administrasi : Ir. Hilmiah
Euis Nayasari, Sst

<http://www.bps.go.id>

KATA PENGANTAR

Pembangunan nasional telah meningkatkan derajat kesehatan penduduk yang antara lain tercermin dari meningkatnya secara berarti jumlah penduduk lanjut usia (lansia) dalam beberapa dekade terakhir. Memperhatikan bahwa kondisi sosial ekonomi, termasuk derajat kesehatan dan tingkat produktivitas penduduk lansia pada umumnya berbeda dengan kondisi sosial ekonomi penduduk pada kelompok umur yang lebih muda maka kebijakan pembangunan bagi penduduk lansia perlu mendapat perhatian khusus.

Memperhatikan perkembangan data penduduk lansia, Badan Pusat Statistik secara berkala menerbitkan publikasi mengenai penduduk lansia dari sumber-sumber data yang tersedia. Publikasi dengan judul “Statistik Penduduk Lanjut Usia 2004” ini menyajikan antara lain data ciri-ciri demografi, tingkat pendidikan, derajat kesehatan, kegiatan sosial budaya, dan penduduk lansia terlantar. Sumber data utama berasal dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2004, sedangkan untuk kegiatan sosial budaya dan lansia terlantar berasal dari data Susenas Modul 2003.

Kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya publikasi ini, baik langsung maupun tidak langsung, disampaikan penghargaan dan terima kasih. Kritik dan saran bagi perbaikan dan penyempurnaan publikasi yang akan datang sangat diharapkan.

Jakarta, Desember 2004
Kepala Badan Pusat Statistik

Dr. Choiril Maksum.
NIP. 340003890

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	3
1.3. Sistematika Penyajian	3
BAB II METODOLOGI	7
2.1. Sumber Data	7
2.1.1. Ruang Lingkup	7
2.1.2. Kerangka Sampel	8
2.1.3. Rancangan Sampel	8
2.1.4. Metode Pengumpulan Data	10
2.1.5. Petugas Lapangan	10
2.2. Konsep dan Definisi	10
BAB III STRUKTUR DEMOGRAFIS PENDUDUK LANSIA	19
3.1. Perkembangan Struktur Penduduk Indonesia	20
3.2. Rasio Ketergantungan Penduduk Tua	22
3.3. Distribusi dan Komposisi Penduduk Lanjut Usia	23
3.4. Peranan Penduduk Lansia di Dalam Rumah Tangga	26
BAB IV PENDIDIKAN PENDUDUK LANSIA	31
4.1. Kemampuan Membaca dan Menulis	32
4.2. Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	34

	Halaman
BAB V KESEHATAN PENDUDUK LANSIA	41
5.1. Keluhan Kesehatan	42
5.2. Angka Kesakitan	44
5.3. Lama Sakit	45
5.4. Cara Berobat	47
BAB VI KEGIATAN EKONOMI PENDUDUK LANSIA	53
6.1. Partisipasi Angkatan Kerja Penduduk Lansia	54
6.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Penduduk Lansia	55
6.3. Lapangan Usaha	57
6.4. Status Pekerjaan	59
6.5. Jumlah Jam Kerja	61
BAB VII KEGIATAN SOSIAL PENDUDUK LANSIA	67
7.1. Akses Terhadap Media Massa	67
7.1.1. Membaca Buku/Majalah/Surat Kabar	67
7.1.2. Menonton Televisi	69
7.1.3. Mendengarkan Radio	71
7.2. Partisipasi dalam Kegiatan Organisasi Sosial	72
BAB VIII PENDUDUK LANSIA TERLANTAR	77
8.1. Distribusi Lansia Terlantar	77
8.2. Hubungan Karakteristik Rumah Tangga dengan Keterlantaran Lansia	79
Penduduk Lansia di Panti Jompo (Kunjungan serta Wawancara dengan Penghuni/Warga Panti Werdha)	81
LAMPIRAN	85

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
3.1	Banyaknya dan Persentase Penduduk Lansia menurut Propinsi dan Jenis Kelamin, 2004	85
3.2	Banyaknya dan Persentase Penduduk Lansia menurut Propinsi dan Tipe Daerah, 2004	86
3.3	Persentase Penduduk Lansia menurut Propinsi dan Status Perkawinan, 2004	87
3.4	Persentase Penduduk Lansia menurut Propinsi dan Hubungan dengan Kepala Rumah Tangga, 2004	88
4.1	Persentase Penduduk Lansia yang Buta Huruf menurut Propinsi, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2004	89
4.2	Persentase Penduduk Lansia yang Buta Huruf menurut Propinsi, Tipe Daerah dan Golongan Ekonomi Rumah Tangga, Tahun 2004	90
4.3.1	Persentase Penduduk Lansia menurut Propinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2004	91
5.1	Persentase Penduduk Lansia yang Mengalami Keluhan Kesehatan menurut Propinsi, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2004	94
5.2	Angka Kesakitan Penduduk Lansia menurut Propinsi, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2004	95
5.3	Persentase Penduduk Lansia yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dengan Cara Berobat Sendiri menurut Propinsi, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2004	96
5.4.1	Persentase Penduduk Lansia yang Berobat Sendiri menurut Propinsi, dan Jenis Obat yang Digunakan, 2004	97
5.5	Persentase Penduduk Lansia yang Sakit menurut Propinsi dan Lamanya Hari Sakit (hari), 2004	100

Tabel		Halaman
5.6	Persentase Penduduk Lansia yang Berobat Jalan menurut Propinsi, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2004	103
5.7.1	Persentase Penduduk Lansia yang Sakit menurut Propinsi dan Tempat Berobat Jalan, 2004	104
6.1	TPAK Penduduk Lansia menurut Propinsi dan Tipe Daerah, 2004	107
6.2	Persentase Penduduk Lansia yang Bekerja menurut Propinsi dan, Jenis Kelamin, 2004	108
6.3.1	Persentase Penduduk Lansia yang Bekerja menurut Propinsi dan Lapangan Usaha, 2004	109
6.4.1	Persentase Penduduk Lansia yang Bekerja menurut Propinsi dan Status Pekerjaan, 2004	112
6.5.1	Persentase Penduduk Lansia yang Bekerja menurut Propinsi, Jenis Kelamin dan Jam Kerja Selama Seminggu yang Lalu, 2004	115
7.1.1	Persentase Penduduk Lansia yang Membaca Buku, Majalah dan Surat Kabar menurut Propinsi dan Jenis Kelamin, 2003	118
7.2	Persentase Penduduk Lansia yang Menonton Televisi menurut Propinsi, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2003	121
7.3	Persentase Penduduk Lansia yang Mendengarkan Radio menurut Propinsi, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2003	122
7.4.1	Persentase Penduduk Lansia yang Menjadi Anggota Organisasi Tiga Bulan yang Lalu menurut Propinsi dan Jenis Organisasi, 2003	123
8.1	Persentase Lansia menurut Propinsi dan Kategori Ketelantaran Tahun 2003	126

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu *outcome* atau dampak dari keberhasilan pembangunan nasional yang telah dilaksanakan selama ini terutama di bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial antara lain adalah meningkatnya angka rata-rata usia harapan hidup penduduk. Peningkatan angka rata-rata tersebut mencerminkan makin bertambah panjangnya masa hidup penduduk secara keseluruhan yang membawa konsekuensi makin bertambahnya jumlah penduduk lanjut usia (lansia). Suwoko (2004) menyebutkan bahwa abad 21 bagi bangsa Indonesia merupakan abad lansia (*era of population ageing*), karena pertumbuhan penduduk lansia di Indonesia diperkirakan lebih cepat dibandingkan dengan negara-negara lain. Menurut Suwoko, Indonesia diperkirakan akan mengalami *aged population boom* pada dua dekade permulaan abad 21 ini.

Jumlah penduduk lansia Indonesia pada tahun 1999 telah mencapai peringkat keempat setelah RRC, India dan Amerika Serikat (PKBI, 1999). Suyono (ibid, 1999) bahkan menyatakan bahwa sejak tahun 1999 Indonesia telah mulai memasuki era penduduk berstruktur tua (*aging population*), yaitu suatu negara dengan proporsi penduduk lansianya telah berada pada patokan penduduk berstruktur tua (yakni 7 persen). Perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur penduduk pada umumnya akan menimbulkan implikasi pada berbagai aspek kehidupan. Untuk itu, perubahan struktur penduduk Indonesia menuju era penduduk berstruktur tua selain patut dicermati juga perlu diantisipasi secara dini.

Penduduk lansia pada umumnya memiliki fisik maupun non fisik yang kondisinya telah banyak mengalami penurunan akibat proses alamiah yang disebut dengan proses menua atau *aging*. Kusumoputro (2002) menyebutkan bahwa proses menua (*aging*) adalah proses alami yang disertai adanya penurunan kondisi fisik, psikologis maupun sosial yang saling berinteraksi satu sama lain. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa peningkatan jumlah penduduk lansia juga membawa konsekuensi makin meningkatnya kebutuhan pelayanan bagi penduduk lansia, khususnya pelayanan sosial.

Secara ekonomis, dilihat dari kondisi fisik dan non fisiknya yang semakin tidak memungkinkan lagi untuk melakukan berbagai kegiatan khususnya kegiatan ekonomi, penduduk lansia digolongkan sebagai penduduk yang tidak produktif. Dengan demikian, meningkatnya jumlah penduduk lansia pada dasarnya identik dengan makin meningkatnya jumlah penduduk yang tidak produktif. Kondisi ini jika tidak segera diantisipasi dan dicarikan pemecahannya akan mengakibatkan meningkatnya beban tanggungan penduduk produktif yaitu mereka yang berusia 15–59 tahun.

Masalah mendasar yang umumnya dihadapi oleh penduduk lansia adalah masalah kesehatan. Kondisi penduduk lansia yang cenderung menurun baik fisik maupun mental seiring dengan makin bertambahnya umur mengakibatkan para lansia sangat rawan terhadap gangguan berbagai penyakit. Salah satu gangguan penyakit yang banyak dialami oleh para lansia adalah gangguan penyakit lupa ingatan (pikun) yang populer dengan nama *syndroma complex*. Mempertimbangkan hal tersebut maka pertambahan jumlah penduduk lansia perlu diatasi dengan mempermudah akses penduduk lansia terhadap berbagai pelayanan kesehatan.

Penurunan kondisi fisik dan non fisik penduduk lansia yang terus berlangsung sejalan dengan semakin bertambahnya umur, juga mengakibatkan menurunnya tingkat produktifitas bahkan pada akhirnya tidak mampu lagi melakukan kegiatan ekonomi, baik untuk memenuhi kebutuhannya sendiri maupun keluarganya. Gambaran ini menunjukkan bahwa penanganan penduduk lansia perlu dilakukan secara komprehensif.

Arah dan strategi pembangunan dan pemberdayaan dalam rangka peningkatan kesejahteraan penduduk lansia sebaiknya dilakukan secara terpadu dan lintas sektor. Sejalan dengan itu, tersedianya data statistik dan berbagai indikator yang dapat memberikan gambaran secara makro mengenai kondisi dan potensi penduduk lansia pada berbagai aspek penting seperti demografis, pendidikan, kesehatan dan kegiatan sosial, baik pada level nasional maupun propinsi, akan sangat membantu mempertajam arah dan sasaran pembangunan dan pemberdayaan penduduk lansia.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan publikasi ini adalah dalam rangka menyajikan gambaran secara makro mengenai kondisi dan situasi penduduk Indonesia lansia yang dilihat dari berbagai aspek penting, antara lain struktur demografis, pendidikan, kesehatan dan kegiatan sosial. Selain itu disajikan pula gambaran mengenai penduduk lansia terlantar yang ditunjukkan dari status ekonomi dan sosialnya.

1.3. Sistematika Penyajian

Publikasi Statistik Penduduk Lanjut Usia Indonesia Tahun 2004 ini disajikan dalam delapan bagian. Pada bagian pertama (Bab I) disajikan fenomena-fenomena yang melatar-belakangi penyusunan publikasi ini; maksud dan tujuan; serta sistematika penyajian. Kemudian pada bagian kedua (Bab II) disajikan metodologi berupa sumber data; ruang lingkup; kerangka sampel; serta konsep dan definisi.

Enam bagian berikutnya menyajikan gambaran mengenai situasi dan kondisi penduduk lansia di Indonesia, diawali pada bagian ketiga (Bab III) berupa kajian mengenai struktur demografis penduduk lansia, bagian keempat (Bab IV) mengenai kemampuan baca tulis dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan penduduk lansia, bagian kelima (Bab V) mengenai kondisi kesehatan penduduk lansia, dan akses ke fasilitas pelayanan kesehatan; bagian keenam (Bab VI) adalah mengenai kegiatan lansia yang bekerja, lapangan usaha, status pekerjaan serta jam kerja penduduk lansia yang bekerja, bagian ke tujuh (Bab VII) adalah mengenai partisipasi penduduk lansia dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan. Pada bagian terakhir publikasi ini (Bab VIII) disajikan gambaran mengenai kondisi penduduk lansia yang terlantar yakni penduduk lansia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal untuk dapat hidup secara layak.

BAB II. METODOLOGI

2.1. Sumber Data

Data utama yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan publikasi ini adalah data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang mencakup dua jenis data, yaitu:

- a. Data Modul Sosial Budaya, Susenas tahun 2003, yang digunakan sebagai dasar untuk menunjukkan gambaran secara makro mengenai kegiatan sosial yang dilakukan oleh penduduk lansia.
- b. Data Kor Susenas Tahun 2004, yang digunakan sebagai dasar untuk menunjukkan gambaran secara makro mengenai kondisi dan potensi penduduk lansia yang dilihat dari aspek demografis, kesehatan dan pendidikan.

Susenas merupakan survei yang dilaksanakan secara berkala setiap tahun oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Susenas merupakan survei yang dirancang untuk mengumpulkan data sosial kependudukan yang relatif sangat luas, mencakup banyak aspek sosial dan ekonomi. Karena luasnya cakupan data yang dikumpulkan, pertanyaan-pertanyaan dalam Susenas dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu Kor dan Modul.

Kor dibatasi pada pertanyaan-pertanyaan pokok namun mencakup berbagai aspek sosial ekonomi, dan pengumpulan data dilakukan setiap tahun. Modul Susenas mencakup pertanyaan-pertanyaan yang lebih rinci dari salah satu aspek sosial ekonomi. Secara keseluruhan, Susenas mempunyai tiga modul yaitu Modul Konsumsi/pengeluaran, Modul Perumahan dan Kesehatan serta Modul Sosial Budaya dan Pendidikan. Pengumpulan data untuk modul yang sama dilakukan bergiliran setiap tiga tahun.

2.1.1. Ruang Lingkup

Susenas 2004 dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia dengan jumlah sampel sebanyak 249.376 rumah tangga yang tersebar di seluruh propinsi baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 182.304 rumah tangga dicacah dengan kuesioner kor (VSEN2004.K) saja dan selebihnya yaitu sebanyak 67.072

rumah tangga selain dicacah dengan kuesioner kor, juga dicacah dengan kuesioner modul perumahan dan kesehatan (VSEN2004.MPK). Rumah tangga yang tinggal dalam blok sensus khusus seperti asrama, penjara dan sejenisnya yang berada di blok sensus biasa tidak dipilih dalam sampel.

Data yang dihasilkan dari sampel kor cukup representatif disajikan sampai dengan tingkat kabupaten/kota asal tidak dibedakan menurut tipe daerah, sedangkan data dari sampel modul hanya representatif sampai dengan tingkat propinsi, tetapi dapat dibedakan menurut tipe daerah (perkotaan/perdesaan).

2.1.2. Kerangka Sampel

Kerangka sampel yang digunakan dalam Susenas 2004 terdiri dari 3 jenis, yaitu: kerangka sampel untuk pemilihan blok sensus, kerangka sampel untuk pemilihan kelompok segmen (kelseg) dalam blok sensus (khusus untuk blok sensus yang mempunyai jumlah rumahtangga lebih besar dari 150 rumahtangga), dan kerangka sampel untuk pemilihan rumahtangga dalam blok sensus/kelompok segmen terpilih.

Kerangka sampel untuk pemilihan blok sensus di daerah perkotaan adalah daftar blok sensus yang terdapat di daerah perkotaan di setiap kabupaten/kota, sedangkan kerangka sampel untuk pemilihan blok sensus di daerah perdesaan adalah daftar blok sensus yang terdapat di daerah perdesaan di setiap kabupaten/kota.

Kerangka sampel untuk pemilihan kelseg adalah daftar blok sensus terpilih yang mempunyai jumlah rumahtangga lebih besar dari 150 rumahtangga. Kelseg ini dibentuk oleh Pengawas di bawah bimbingan Instruktur Nasional (Innas) pada saat pelatihan petugas lapangan Susenas 2004. Pembentukan kelseg berdasarkan pada jumlah rumah tangga hasil listing Sensus Penduduk 2000 (SP2000).

2.1.3. Rancangan Sampel

Kor

Sampel **Kor** Susenas 2004 didesain untuk estimasi sampai tingkat kabupaten/kota. Rancangan sampel **Kor** Susenas 2004 adalah rancangan sampel bertahap dua untuk blok sensus dengan jumlah rumah tangga kurang atau sama dengan 150 rumah

tangga dan rancangan sampel bertahap tiga untuk blok sensus dengan jumlah rumahtangga lebih besar dari 150 rumah tangga, baik untuk daerah perkotaan maupun daerah perdesaan. Pemilihan sampel untuk daerah perkotaan dan daerah perdesaan dilakukan secara terpisah.

Setiap tahap dalam rancangan pemilihan sampel dijelaskan sebagai berikut :

Blok sensus memiliki jumlah rumah tangga kurang atau sama dengan 150 rumah tangga :

Tahap pertama, dari kerangka sampel blok sensus dipilih sejumlah blok sensus secara *Probability Proportional to Size (PPS) – Linear Systematic Sampling* dengan *size* banyaknya rumah tangga hasil listing di setiap blok sensus pada Sensus Penduduk 2000.

Tahap kedua, dari sejumlah rumah tangga hasil listing di setiap blok sensus terpilih dipilih 16 rumah tangga secara *Linear Systematic Sampling*.

Blok Sensus memiliki jumlah rumah tangga lebih besar dari 150 rumah tangga:

Tahap pertama, dari kerangka sampel blok sensus dipilih sejumlah blok sensus secara *PPS – Linear Systematic Sampling* dengan *size* banyaknya rumah tangga hasil listing di setiap blok sensus pada Sensus Penduduk 2000.

Tahap kedua, dari setiap blok sensus terpilih dibentuk kelompok segmen (kelseg), selanjutnya dipilih satu kelseg secara *PPS Sampling* dengan *size* banyaknya rumah tangga hasil listing Sensus Penduduk 2000 di setiap kelseg.

Tahap ketiga, dari sejumlah rumah tangga hasil listing di setiap kelseg terpilih dipilih 16 rumah tangga secara *Linear Systematic Sampling*.

Modul Sosial Budaya dan Pendidikan

Sampel modul ini merupakan subsampel dari sampel terpilih untuk estimasi data tingkat kabupaten/kota, baik daerah perkotaan maupun daerah perdesaan dengan jumlah sampel sekitar 67,000 rumah tangga. Subsampel tersebut dipilih secara *Linear Systematic Sampling* dari daftar blok sensus terpilih di setiap kabupaten/kota baik untuk daerah perkotaan maupun perdesaan. Selanjutnya blok sensus terpilih (subsampel) tersebut disebut blok sensus kor-modul, karena akan dicacah dengan kuesioner kor dan sekaligus dengan kuesioner modul.

2.1.4. Metode Pengumpulan Data

Setiap rumah tangga yang terpilih dalam Susenas, dikunjungi oleh petugas pencacah yang diberikan tanggung jawab untuk mewawancarai responden untuk mendapatkan data-data yang diinginkan. Wawancara dilakukan langsung terhadap kepala rumah tangga atau anggota rumah tangga (selain kepala rumah tangga) yang dianggap mengetahui keadaan rumah tangga yang bersangkutan.

Sebelum diterjunkan ke lapangan untuk mengumpulkan data, terlebih dahulu para petugas ini dilatih oleh instruktur (pelatih) tentang tata cara pengisian kuesioner dan pemakaian konsep/definisi yang digunakan dalam kegiatan survei. Hal ini dimaksud untuk mengurangi bias yang diakibatkan oleh salah satu factor *non-sampling error*.

2.1.5. Petugas Lapangan

Dalam kegiatan survei-survei BPS yang berskala besar seperti Susenas, Mantri Statistik dilibatkan sebagai pengawas (PMS), sedangkan yang menjadi petugas pencacah (PCL) adalah mitra statistik, yaitu petugas yang direkrut dari luar BPS. Seperti halnya mantri statistik, kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan bagi mitra statistik untuk dapat menjadi PCL dalam kegiatan survei semacam Susenas minimal adalah tamat SLTA dan dinyatakan lulus dalam pelatihan petugas PCL.

2.2. Konsep dan Definisi

Penduduk Lanjut Usia adalah penduduk yang berumur 60 tahun ke atas.

Rumah Tangga Biasa adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami atau tinggal bersama di sebagian atau seluruh bangunan fisik/bangunan sensus dan biasanya makan dari satu dapur. Yang dimaksud satu dapur, adalah jika pengurusan kebutuhan sehari-hari dikelola menjadi satu. Beberapa orang yang bersama-sama mendiami satu kamar dalam satu bangunan sensus walaupun mengurus makannya sendiri-sendiri dianggap satu rumah tangga biasa.

Anggota Rumah Tangga adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga, baik yang pada waktu pencacahan berada di rumah tangga tersebut maupun yang sedang bepergian (tidak berniat pindah) kurang dari 6 bulan.

Tidak termasuk anggota rumah tangga yaitu orang yang telah bepergian selama 6 bulan atau lebih, atau kurang dari 6 bulan tetapi dengan tujuan pindah (akan meninggalkan rumah selama 6 bulan atau lebih).

Di sisi lain, orang yang telah 6 bulan atau lebih tinggal di rumah tangga yang sedang dicacah atau yang telah tinggal kurang dari 6 bulan tetapi berniat menetap **dianggap** sebagai anggota rumah tangga dari rumah tangga yang sedang dicacah tersebut.

Perkotaan adalah daerah dengan karakteristik sosial ekonomi dari unit wilayah administratif terkecil (desa) yang memenuhi skor kriteria tertentu untuk daerah perkotaan. Kriteria daerah perkotaan adalah sebagai berikut : mempunyai kepadatan penduduk 5000 orang atau lebih per km², mempunyai paling banyak 25 persen rumah tangga berusaha di bidang pertanian dan mempunyai 8 atau lebih fasilitas yang menunjukkan ciri “kota” seperti : sekolah, rumah sakit, kelompok pertokoan, bioskop, bank, jalan raya dan sebagainya. Daerah yang tidak memenuhi karakteristik perkotaan disebut **pedesaan**.

Kawin adalah mempunyai isteri (bagi pria) atau suami (bagi wanita) pada saat pencacahan, baik tinggal bersama maupun tinggal terpisah. Dalam hal ini yang dicakup tidak saja mereka yang kawin sah secara hukum (adat, agama, negara dan sebagainya), tetapi juga mereka yang hidup bersama dan oleh masyarakat sekelilingnya dianggap sebagai suami isteri.

Cerai hidup adalah berpisah sebagai suami-isteri karena bercerai dan belum kawin lagi. Dalam hal ini termasuk mereka yang mengaku cerai walaupun belum resmi secara hukum. Sebaliknya tidak termasuk mereka yang hanya hidup terpisah tetapi masih berstatus kawin, misalnya suami/isteri ditinggalkan oleh isteri/suami ke tempat lain karena sekolah, bekerja, mencari pekerjaan, atau untuk keperluan lain. Wanita yang mengaku belum pernah kawin tetapi mengaku pernah hamil, dianggap sebagai cerai hidup.

Cerai mati adalah ditinggal mati oleh suami atau isterinya dan belum kawin lagi.

Angka Harapan Hidup adalah perkiraan rata-rata lama hidup yang dicapai oleh sekelompok penduduk, mulai lahir sampai meninggal.

Dapat Membaca dan Menulis adalah dapat membaca dan menulis kata-kata/kalimat sederhana dalam aksara tertentu.

Buta Huruf adalah tidak dapat membaca surat atau kalimat sederhana dengan suatu huruf, termasuk huruf Braille. Orang cacat yang pernah dapat membaca dan menulis digolongkan tidak buta huruf.

Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan adalah jenjang pendidikan tertinggi yang diikuti sampai ujian akhir di kelas tertinggi (tamat).

Tidak/belum pernah sekolah adalah tidak atau belum pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan, termasuk yang tamat/belum tamat taman kanak-kanak tetapi tidak melanjutkan ke sekolah dasar.

Belum tamat SD adalah pernah/sedang bersekolah di SD atau yang sederajat tetapi tidak/belum tamat.

Keluhan kesehatan adalah keadaan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan baik karena penyakit, kecelakaan, kriminal dll.

Sakit adalah menderita penyakit baik akut maupun kronis atau gangguan kesehatan lainnya yang menyebabkan aktifitas kerja terganggu. Orang yang mempunyai keluhan kesehatan (misalnya masuk angin atau pilek) tetapi kegiatan sehari-harinya tidak terganggu dianggap tidak sakit.

Kondisi kesehatan adalah keadaan kesehatan responden saat ini termasuk keadaan fisik ataupun mental.

Olahraga adalah kegiatan seseorang dengan sengaja meluangkan waktunya untuk melakukan satu atau lebih kegiatan fisik, dengan tujuan meningkatkan kesegaran jasmani secara teratur, atau meningkatkan prestasi atau untuk hiburan. Kegiatan olahraga dapat berupa latihan atau pertandingan atau untuk rekreasi (hiburan). Melakukan kegiatan

seperti berjalan kaki ke tempat bekerja, mengayuh sepeda ke pasar dan kegiatan lain yang tidak dikhususkan untuk olahraga tidak dikategorikan sebagai melakukan olahraga.

Mendengarkan radio adalah kegiatan seseorang mengarahkan pendengarannya pada materi yang disiarkan radio atau meluangkan waktu untuk mendengarkan siaran radio sehingga ia dapat mengikuti, mengerti atau menikmatinya, baik radio milik sendiri maupun orang lain. Mendengarkan musik, lagu-lagu atau cerita dari tape recorder tidak dikategorikan mendengarkan radio.

Menonton Televisi (TV) adalah kegiatan seseorang mengarahkan perhatian pada tayangan TV atau meluangkan waktu untuk menonton tayangan TV sehingga ia dapat mengerti atau menikmati acara yang ditayangkan. Orang tuli yang dapat menikmati/mengerti acara TV yang ditonton, dikategorikan sebagai menonton TV.

Angkatan Kerja Lansia adalah penduduk 60 tahun ke atas yang selama seminggu sebelum pencacahan mempunyai pekerjaan, baik bekerja maupun sementara tidak bekerja, atau yang sedang mencari pekerjaan.

Bukan Angkatan Kerja Lansia adalah penduduk berumur 60 tahun ke atas yang selama seminggu sebelum pencacahan hanya bersekolah, mengurus rumah tangga, atau melakukan kegiatan lainnya. Dapat juga berarti tidak melakukan kegiatan yang dapat dimasukkan dalam kategori bekerja, sementara tidak bekerja atau mencari pekerjaan.

Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh/membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu sebelum pencacahan. Bekerja selama satu jam tersebut harus dilakukan berturut-turut dan tidak terputus (termasuk pekerja keluarga tanpa upah yang membantu dalam kegiatan usaha/ekonomi). Termasuk pula yang mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja karena berbagai alasan seperti cuti, nunggu panen, mogok dan sebagainya.

Pengangguran adalah angkatan kerja yang sama sekali tidak bekerja dan mencari pekerjaan.

Mencari Pekerjaan adalah kegiatan dari mereka yang bekerja tetapi karena suatu hal masih mencari pekerjaan; atau mereka yang dibebaskan tugas dan akan dipanggil kembali tetapi sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan; atau mereka yang pernah

bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan; atau mereka yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan.

Mempersiapkan suatu usaha adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan suatu usaha yang baru, yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan/keuntungan atas resiko sendiri, baik dengan atau tanpa mempekerjakan buruh/karyawan/pegawai dibayar maupun tak dibayar. Mempersiapkan suatu usaha yang dimaksud adalah apabila seseorang telah/sedang melakukan tindakan nyata seperti mengumpulkan modal atau alat, mencari lokasi, mengurus surat ijin usaha, dsb.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja, dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Kerja}} \times 100\%$$

Penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 10 tahun ke atas. Namun untuk publikasi ini umur terbatas 60 tahun ke atas.

Lapangan Usaha adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/perusahaan/instansi tempat seseorang bekerja.

Status Pekerjaan adalah kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/kegiatan, misalnya berusaha sendiri tanpa bantuan orang lain, berusaha dibantu buruh tetap, atau buruh/karyawan.

Jam Kerja adalah jumlah waktu (dalam jam) yang digunakan untuk bekerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka adalah perbandingan antara banyaknya orang yang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, tidak mungkin mendapat pekerjaan, dan sudah punya pekerjaan tetapi belum bekerja terhadap angkatan kerja.

Organisasi Kemasyarakatan/Sosial adalah organisasi yang melaksanakan pelayanan dalam bidang kesejahteraan sosial baik untuk anggotanya sendiri maupun masyarakat (selain organisasi politik), dan telah mempunyai struktur yang tetap (susunan pengurus,

seperti ketua, sekretaris dan bendahara), baik yang berbadan hukum maupun tidak, dikelola oleh pemerintah maupun swasta.

Lansia Terlantar :

Lansia yang berpotensi terlantar antara lain disebabkan mereka tidak mempunyai keluarga, sanak saudara atau orang lain yang mau dan mampu mengurusnya atau tidak mempunyai penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan minimumnya, baik jasmani, rohani maupun sosial (PP Nomor 13 Tahun 1998).

Kriteria yang dipilih untuk menentukan derajat keterlantaran lansia adalah sebagai berikut :

1. Tidak/belum pernah sekolah atau tidak tamat SD
2. Makan makanan pokok kurang dari 14 kali dalam seminggu
3. Makan lauk pauk berprotein tinggi (nabati atau hewani) : nabati < 4 kali atau hewani < 2 kali atau kombinasinya dalam satu minggu
4. Memiliki pakaian kurang dari 4 stel
5. Tidak mempunyai tempat tetap untuk tidur
6. Bila sakit tidak diobati
7. Bekerja > 35 jam selama seminggu.

Kategori terlantar :

1. Terlantar, apabila memenuhi 3 kriteria atau lebih
2. Rawan terlantar, apabila memenuhi 2 kriteria
3. Tidak terlantar, apabila memenuhi maksimal 1 kriteria.

Makanan pokok adalah makanan padat yang dapat memberi energi pada seseorang. Makanan pokok ada beberapa jenis tergantung daerah/wilayah tempat tinggal, misalnya nasi, sagu, singkong, jagung dan ubi jalar. Yang dimaksud **makan** adalah makan dalam rangka makan pagi/sarapan, makan siang dan makan malam (tidak termasuk makanan jajanan).

Lauk pauk berprotein tinggi terbagi menjadi dua yaitu makanan yang mengandung protein hewani seperti ikan telur, daging dan makanan yang mengandung protein nabati seperti tahu, tempe dan kacang-kacangan.

Pakaian yang dimiliki (stel) adalah “pakaian luar” yaitu pakaian yang “utuh” (tidak compang-camping atau terlalu banyak tambalannya) yang dapat/lazim/pantas dipakai dalam pergaulan sehari-hari.

Yang dimaksud dengan **1 stel/pasang pakaian** adalah 1 pakaian atas dan 1 pakaian bawah atau 1 pakaian terusan (termasuk pakaian seragam).

Pakaian atas, misalnya kemeja, blus, kaos T-shirt, kebaya dll.

Pakaian bawah, misalnya celana, rok, kain panjang dan sarung.

Pakaian terusan, misalnya gaun, gaun panjang (*longdress*).

Tempat tetap untuk tidur adalah tempat/ruangan/kamar tetap yang digunakan oleh responden untuk tidur tanpa memperhatikan dari tempat/ruangan/kamar tersebut.

<http://www.bps.go.id>

BAB III. STRUKTUR DEMOGRAFIS PENDUDUK LANSIA

Data dasar kependudukan terutama data yang berkaitan dengan jumlah dan struktur penduduk merupakan salah satu komponen utama yang selalu digunakan dalam setiap kegiatan perencanaan pembangunan khususnya kegiatan perencanaan input dan output pembangunan serta penetapan prioritas pembangunan. Pada kegiatan perencanaan input pembangunan, data jumlah dan struktur penduduk digunakan sebagai rujukan untuk memperkirakan jumlah SDM atau tenaga kerja yang dapat diserap dalam kegiatan pembangunan. Sebaliknya, pada kegiatan perencanaan output pembangunan, data jumlah dan struktur penduduk digunakan untuk menentukan kelompok-kelompok sasaran (*target groups*) pembangunan, misalnya balita, penduduk usia sekolah dan penduduk miskin.

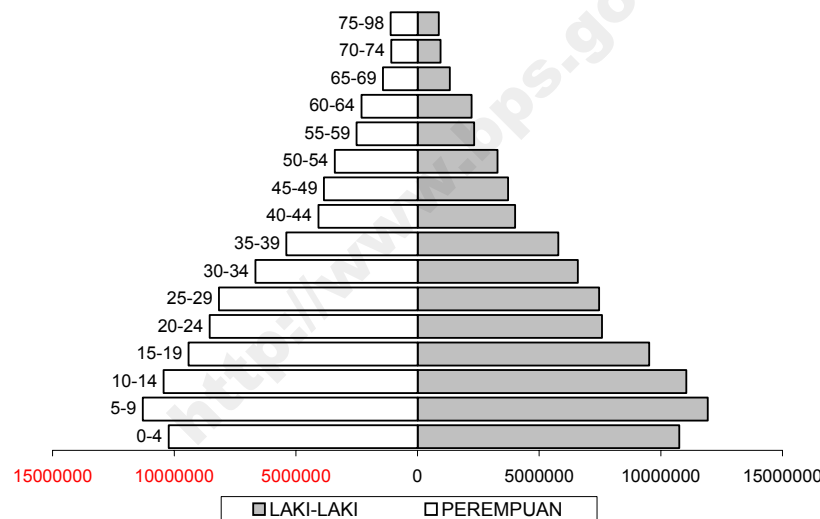
Salah satu jenis data dasar kependudukan yang sangat penting artinya bagi kegiatan perencanaan pembangunan adalah data mengenai struktur demografis penduduk atau biasa dikenal dengan komposisi penduduk menurut karakteristik demografis. Sebagai contoh adalah data komposisi penduduk menurut umur/kelompok umur yang antara lain dapat digunakan untuk menentukan kelompok-kelompok sasaran pembangunan yang ditetapkan berdasarkan umur. Misalnya, penduduk usia sekolah yang mencakup penduduk usia 7–12, 13 – 15 dan 16 – 18 tahun merupakan kelompok sasaran untuk pembangunan bidang pendidikan. Sementara itu, penduduk usia 0 – 4 tahun atau anak balita merupakan kelompok sasaran untuk program imunisasi yang merupakan salah satu program pembangunan di bidang kesehatan.

Berkaitan dengan itu, kegiatan perumusan arah dan kebijakan pembangunan yang ditujukan untuk memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk lansia juga mutlak membutuhkan tersedianya data atau informasi dasar yang berkaitan dengan jumlah dan struktur demografis penduduk lansia. Tersedianya data dasar tersebut akan sangat membantu pemerintah dalam menentukan skala prioritas dan sasaran/target pembangunan. Sejalan dengan itu, analisis pada bagian ini difokuskan dalam rangka memperoleh gambaran secara makro mengenai jumlah dan komposisi penduduk lansia menurut beberapa karakteristik demografis antara lain umur, jenis kelamin, daerah tempat tinggal dan struktur rumah tangga serta perkembangannya.

3.1. Perkembangan Struktur Penduduk Indonesia

Teori Malthus tentang transisi demografi menyebutkan bahwa pada awal transisi mortalitas turun lebih cepat dari turunnya tingkat fertilitas, struktur umur penduduk mengarah pada 'penduduk muda' dengan piramida penduduk yang mempunyai alas yang relatif lebar. Pada tahap selanjutnya dimana fertilitas turun pada tingkat yang cukup berarti, maka struktur umur penduduk berubah arah, yaitu menjadi 'penduduk tua' dengan alas piramida yang makin menyempit atau relatif sama dengan batang-batang piramida yang di atasnya.

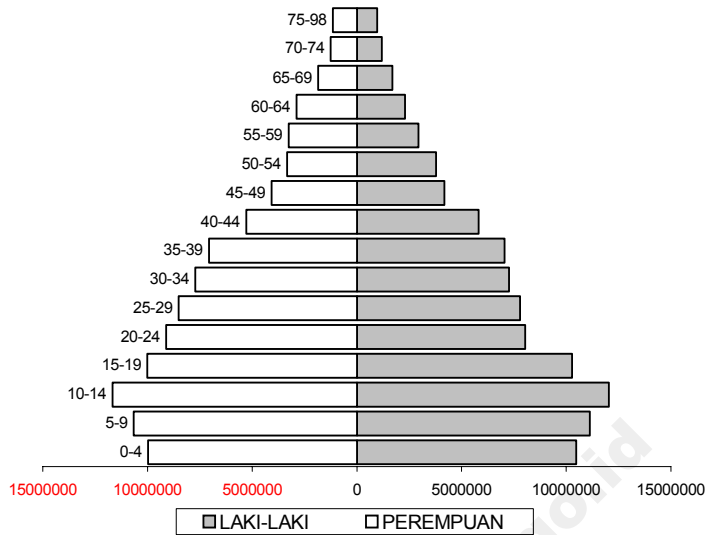
Gambar 3.1.1.
Piramida Penduduk Tahun 1990



Sumber: BPS, Sensus Penduduk 1990

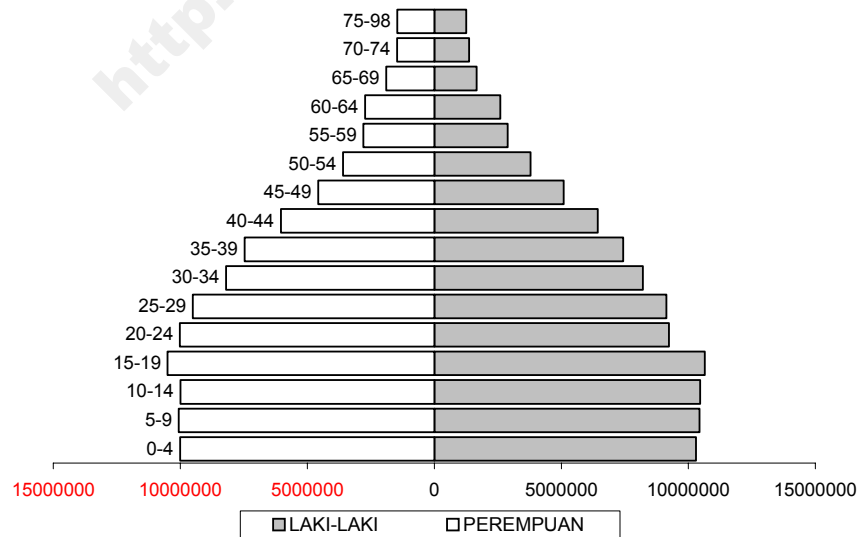
Piramida penduduk Indonesia menurut struktur umur tahun 1990 seperti yang disajikan pada Gambar 3.1.1 menunjukkan bahwa memasuki dekade 1990, penduduk Indonesia mulai melewati masa awal transisi demografis. Hal ini tercermin dari alas kaki piramida yang meskipun masih cukup lebar namun mulai mengalami penyempitan dan lebih pendek atau relatif sama dengan batang-batang piramida yang terletak di atasnya. Kondisi ini terlihat secara umum untuk semua penduduk, baik penduduk laki-laki maupun penduduk perempuan.

Gambar 3.1.2.
Piramida Penduduk Tahun 1995



Sumber: BPS, Survei Penduduk Antar Sensus 1995

Gambar 3.1.3.
Piramida Penduduk Tahun 2000



Sumber: BPS, Sensus Penduduk 2000

Tahap kedua dari proses transisi demografis penduduk Indonesia yang berupa pergeseran struktur penduduk dari penduduk muda ke penduduk tua nampak mulai terlihat nyata selama periode tahun 1990–1995. Piramida penduduk Indonesia pada tahun 1995 (lihat pada Gambar 3.1.2) nampak berbeda dengan piramida penduduk pada tahun 1990 (lihat Gambar 3.1.1). Pada piramida penduduk tahun 1995 terlihat bahwa batang-batang piramida untuk kelompok umur yang lebih muda nampak makin menyempit, sebaliknya untuk kelompok umur yang lebih tua nampak makin melebar.

Piramida penduduk Indonesia pada tahun 2000 seperti yang disajikan pada Gambar 3.1.3 menunjukkan bahwa batang-batang piramida di bagian bawah piramida untuk kelompok umur muda secara umum telah menyempit. Sebaliknya, batang-batang piramida di bagian atas piramida untuk kelompok umur tua secara umum makin melebar. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur umur penduduk Indonesia sudah mengarah pada era "penduduk berstruktur tua" (*aging population*), yaitu suatu negara dengan proporsi penduduk lansia yang telah mencapai sebesar 7 persen atau lebih. Gambaran perkembangan struktur penduduk Indonesia selama periode tahun 1990 – 2000 ini sejalan dengan pernyataan Suyono (ibid, 1999) dan Suwoko (2004).

3.2. Rasio Ketergantungan Penduduk Tua

Rasio ketergantungan penduduk tua (*old dependency ratio*) merupakan perbandingan antara jumlah penduduk tua (60 tahun ke atas) dengan jumlah penduduk produktif (15-59 tahun). Angka tersebut menunjukkan tingkat ketergantungan penduduk tua pada penduduk usia produktif, yang mencerminkan beban ekonomi yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai penduduk tua.

Semakin tingginya angka rata-rata harapan hidup penduduk Indonesia yang menjadikan semakin meningkatnya jumlah penduduk tua juga tercermin dari makin meningkatnya angka rasio ketergantungan penduduk tua. Seperti disajikan pada Tabel 3.2, angka rasio ketergantungan penduduk tua meningkat dari sebesar 11,03 pada tahun 1990 menjadi sebesar 11,51 pada tahun 2000 dan meningkat menjadi sebesar 12,12 pada tahun 2004. Angka rasio sebesar 12,12 menunjukkan bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif harus menanggung sekitar 12 orang penduduk lansia..

Tabel 3.2. Angka Rasio Ketergantungan Penduduk Tua menurut Tipe Daerah Tahun 1990, 1995, 2000 dan 2004

Tipe Daerah	Rasio Ketergantungan			
	1990	1995	2000	2004
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perkotaan	8,63	9,10	9,40	10,31
Perdesaan	12,22	13,01	13,21	13,61
Perkotaan +Perdesaan	11,03	11,51	11,51	12,12

Sumber: BPS, SP 1990 dan 2000, SUPAS 1995, Susenas 2004

Tabel 3.2 juga menunjukkan bahwa angka rasio penduduk tua di daerah perkotaan cenderung lebih rendah dari daerah perdesaan. Pada tahun 2004, angka rasio penduduk tua di perkotaan tercatat sebesar 10,3, sementara di daerah perdesaan mencapai sebesar 13,1. Dari Tabel 3.2 juga ditunjukkan bahwa peningkatan angka rasio penduduk tua selama periode tahun 1990 – 2004 terjadi secara umum baik di daerah perkotaan maupun daerah perdesaan.

3.3. Distribusi dan Komposisi Penduduk Lanjut Usia

Tabel 3.3.1 menyajikan komposisi jumlah dan persentase penduduk lansia menurut jenis kelamin dan tipe daerah. Dari tabel tersebut ditunjukkan bahwa populasi penduduk lansia di Indonesia pada tahun 2004 telah mencapai sebanyak 16,5 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, sebagian besar di antaranya atau sebesar 52,6 persen adalah perempuan dan sebesar 47,4 persen lainnya adalah laki-laki. Kontribusi penduduk perempuan dalam populasi penduduk lansia yang lebih tinggi dari penduduk laki-laki nampak didukung oleh kenyataan bahwa penduduk perempuan mempunyai angka harapan hidup yang lebih panjang dari penduduk laki-laki.

Tabel 3.3.1 juga menunjukkan bahwa sekitar tiga perlima bagian atau sebesar 61,7 persen dari keseluruhan populasi penduduk lansia adalah penduduk perdesaan atau penduduk yang tinggal di daerah perdesaan dan sekitar dua perlima bagian lainnya atau sebesar 39,3 persen adalah penduduk perkotaan.

Tabel 3.3.1. Jumlah dan Persentase Penduduk Lansia menurut Jenis Kelamin dan Tipe Daerah, Tahun 2004

Tipe Daerah / Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)
Perkotaan	6 328 909	38,31
Perdesaan	10 193 402	61,69
Perkotaan + Perdesaan	16 522 311	100,00
Laki-laki	7 835 089	47,42
Perempuan	8 687 222	52,58
Laki-laki + Perempuan	16 522 311	100,00

Sumber: BPS, Susenas 2004

Seperti halnya penduduk secara keseluruhan yang menyebar tidak secara merata, populasi penduduk lansia juga tersebar secara tidak merata di berbagai wilayah propinsi di Indonesia. Seperti yang terlihat pada Tabel Lampiran 3.1 nampak bahwa propinsi-propinsi yang memiliki penduduk yang besar juga mempunyai populasi penduduk lansia yang besar, dan sebaliknya. Propinsi dengan populasi penduduk lansia paling besar berturut-turut adalah Jawa Timur (3,7 juta jiwa), Jawa Tengah (3,3 juta jiwa), Jawa Barat (2,7 juta jiwa), Sumatera Utara (0,7 juta jiwa) dan Sulawesi Selatan (0,6 juta jiwa). Sementara itu, propinsi-propinsi yang memiliki penduduk lansia dalam jumlah yang sedikit berturut-turut adalah Maluku Utara (44 ribu jiwa), Gorontalo (45 ribu jiwa), Papua (47 ribu jiwa) dan Bangka Belitung (65 ribu jiwa).

Tabel Lampiran 3.1 juga menunjukkan bahwa komposisi penduduk lansia menurut jenis kelamin pada setiap propinsi nampak bervariasi, namun mengelompok dalam dua bentuk atau pola, yaitu komposisi penduduk lansia dengan mayoritas laki-laki dan sebaliknya komposisi penduduk lansia dengan mayoritas perempuan. Sebanyak 16 propinsi (53,3 persen) mempunyai penduduk lansia yang mayoritas perempuan, antara lain adalah Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sebanyak 14 propinsi lainnya (46,7 persen) mempunyai penduduk lansia yang mayoritas laki-laki antara lain adalah propinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan dan Papua (lihat Tabel Lampiran 3.1).

Seperti halnya populasi penduduk lansia secara nasional, komponen terbesar dari populasi penduduk lansia di setiap propinsi juga adalah penduduk lansia yang tinggal di daerah perdesaan, kecuali di DKI Jakarta dan Dista Yogyakarta. Seperti yang disajikan pada Tabel Lampiran 3.1, penduduk lansia di DKI Jakarta seluruhnya adalah penduduk perkotaan, sedangkan penduduk lansia di Dista Yogyakarta mayoritas adalah penduduk perkotaan. Tabel Lampiran 3.1 juga menunjukkan bahwa secara umum perbedaan persentase antara penduduk lansia yang tinggal di perkotaan dengan mereka yang tinggal di perdesaan tidak terlampau besar.

Distribusi penduduk lansia menurut status perkawinan seperti yang disajikan pada Tabel 3.3.2 nampak mempunyai pola tersendiri yang berbeda dengan distribusi penduduk secara keseluruhan. Dari tabel tersebut nampak bahwa status perkawinan penduduk lansia pada umumnya berturut-turut adalah kawin (61,2 persen), cerai mati (35,9 persen), cerai hidup (2,1 persen) dan belum kawin (0,7 persen). Tabel 3.3.2 juga menunjukkan bahwa pola perkawinan penduduk lansia baik di daerah perkotaan maupun perdesaan nampak serupa dengan pola perkawinan lansia secara keseluruhan.

Tabel 3.3.2. Persentase Penduduk Lansia menurut Tipe Daerah/Jenis Kelamin dan Status Perkawinan, Tahun 2004

Tipe Daerah/ Jenis Kelamin	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perkotaan :					
Laki-laki	0,60	86,14	0,98	12,28	100,00
Perempuan	1,08	38,14	3,18	57,61	100,00
L+P	0,86	60,57	2,15	36,43	100,00
Perdesaan :					
Laki-laki	0,52	85,61	1,02	12,86	100,00
Perempuan	0,82	39,66	3,13	56,39	100,00
L+P	0,67	61,65	2,12	35,56	100,00
K + D :					
Laki-laki	0,55	85,81	1,00	12,64	100,00
Perempuan	0,92	39,07	3,15	56,86	100,00
L+P	0,74	61,23	2,13	35,89	100,00

Sumber: BPS, Susenas 2004

Tabel Lampiran 3.3 menunjukkan bahwa struktur perkawinan penduduk lansia di setiap propinsi nampak serupa dengan struktur perkawinan penduduk lansia secara nasional, kecuali untuk propinsi Bali, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Utara. Di-ketiga propinsi tersebut, persentase penduduk lansia yang berstatus belum kawin cenderung lebih tinggi dari mereka yang berstatus cerai hidup.

Tabel 3.3.2, juga menunjukkan bahwa pola perkawinan penduduk lansia laki-laki nampak berbeda dengan penduduk lansia perempuan. Persentase penduduk lansia laki-laki yang berstatus kawin dua kali lipat lebih besar dibanding penduduk lansia perempuan (85,8 % dibanding 39,1 %). Sebaliknya, persentase lansia perempuan yang berstatus cerai mati sekitar empat kali lebih besar dari pada penduduk lansia laki-laki dengan persentase masing-masing sebesar 56,9 persen dan 12,6 persen. Perbedaan pola perkawinan penduduk lansia antar gender ini juga terlihat baik di daerah perkotaan maupun perdesaan.

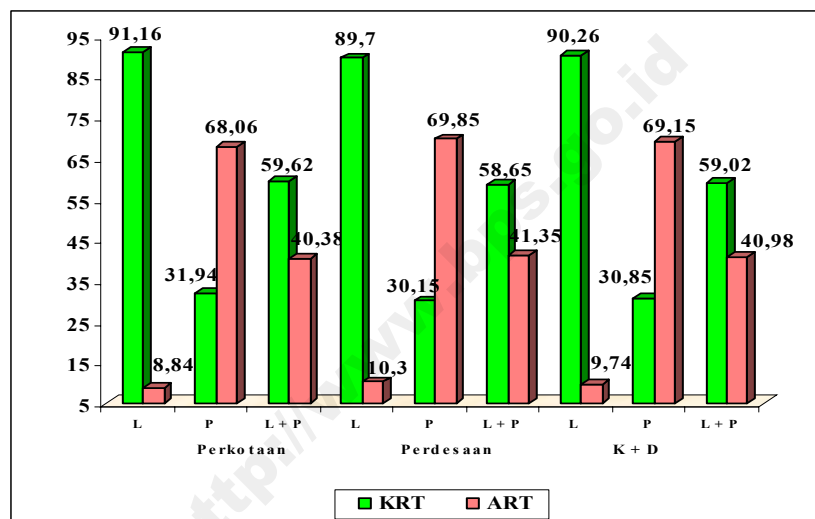
BKKBN (1998:33) mengungkapkan bahwa tingginya persentase penduduk lansia perempuan yang berstatus cerai mati dikarenakan dua alasan, yaitu pertama usia penduduk lansia perempuan lebih panjang dari usia penduduk lansia laki-laki dan alasan kedua adalah adanya kenyataan bahwa kaum perempuan yang telah bercerai tidak akan segera kawin untuk jangka waktu yang relatif lama. Sebaliknya, penduduk lansia laki-laki yang terpaksa bercerai karena ditinggal mati oleh pasangannya, akan segera kawin lagi. Kondisi ini mengakibatkan persentase penduduk lansia laki-laki yang berstatus cerai mati sangat kecil, sebaliknya proporsi mereka yang berstatus kawin cenderung tinggi.

3.4. Peranan Penduduk Lansia di dalam Rumah Tangga

Kepala rumah tangga mempunyai peran penting dan strategis dalam menentukan kelangsungan dan keberadaan rumah tangga tersebut. Selain harus bertanggung-jawab secara ekonomis untuk memenuhi kebutuhan seluruh anggotanya, kepala rumah tangga juga harus mampu mengatur dan memimpin anggota rumah tangganya, serta berperan aktif sebagai pengambil keputusan.

Gambar 3.4.1 menunjukkan bahwa mayoritas penduduk lansia masih memegang peranan penting di dalam lingkungan rumah tangganya, yaitu sebagai kepala rumah tangga. Dari gambar tersebut ditunjukkan bahwa tercatat sebesar 59,0 persen penduduk lansia berperan sebagai kepala rumah tangga dan sebesar 41,0 persen lainnya hanya menjadi anggota rumah tangga. Persentase penduduk lansia yang menjadi kepala rumah tangga di daerah perkotaan mencapai sebesar 59,6 persen, sedangkan di daerah perdesaan tercatat sedikit lebih rendah, yaitu sebesar 58,6 persen.

Gambar 3.4.1. Persentase Penduduk Lansia menurut Peran Keanggotaan dalam Rumah Tangga, Jenis Kelamin dan Tipe Daerah, Tahun 2004



Sumber: BPS, Susenas 2004

Peranan penduduk lansia sebagai kepala rumah tangga nampak dipengaruhi oleh faktor jenis kelamin. Seperti yang disajikan pada Gambar 3.4.1, persentase penduduk lansia laki-laki yang menjadi kepala rumah tangga mencapai lebih dari 90 persen. Persentase tersebut untuk penduduk lansia perempuan hanya sebesar 30,8 persen.

Gambaran yang serupa juga ditemukan baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Persentase penduduk lansia laki-laki yang menjadi kepala rumah tangga di daerah perkotaan sebesar 91,2 persen, sedangkan di daerah perdesaan lebih rendah yaitu sebesar 89,7 persen. Persentase tersebut untuk penduduk lansia perempuan masing-masing hanya sebesar 31,9 persen dan 30,2 persen.

BAB IV. PENDIDIKAN PENDUDUK LANSIA

Kualitas manusia secara keseluruhan mencakup dua komponen, yaitu kualitas fisik dan kualitas non fisik yang keduanya saling berkaitan erat. Kualitas fisik manusia berhubungan dengan kondisi kebugaran dan kesehatan fisik serta daya tahan tubuh. Sejalan dengan itu, kualitas fisik seseorang biasa diukur dengan berbagai indikator kesehatan. Sedangkan kualitas non fisik berhubungan dengan ketrampilan, kemampuan intelektual dan moral serta perilaku yang bermartabat. Sejalan dengan itu, kualitas non fisik biasanya diukur dari tingkat pendidikan yang ditamatkan.

Sesuai dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, pendidikan selain merupakan sarana untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan intelektual dan ketrampilan, juga merupakan sarana untuk membentuk watak dan peradaban yang sesuai dengan bangsa yang bermartabat. Hal ini menunjukkan bahwa output/keluaran yang merupakan hasil proses pembelajaran lembaga pendidikan adalah sumber daya manusia (SDM) yang trampil, berilmu, handal, kreatif dan berahlak mulia. .

Berkaitan dengan pendidikan penduduk lansia, pemerintah telah berupaya menyelenggarakan berbagai program yang ditujukan dalam meningkatkan pendidikan sekaligus kesejahteraan penduduk lansia, antara program Pemberantasan Buta Huruf (PBH) dan dilanjutkan dengan program keaksaraan dan program kelompok belajar (Kejar) paket.A. Keseluruhan program yang diselenggarakan pemerintah tersebut pada dasarnya mencerminkan komitmen pemerintah dalam melaksanakan tujuan nasional yaitu mencerdaskan bangsa.

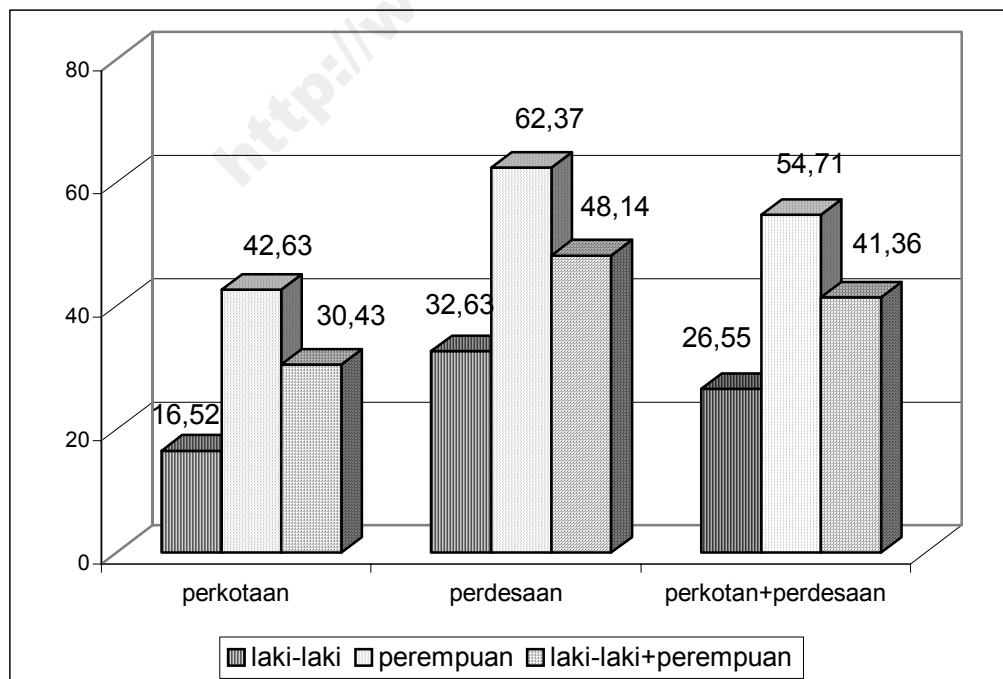
Penduduk lansia mempunyai karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan kelompok penduduk lainnya, seperti balita, remaja dan pemuda. Jika kelompok penduduk lainnya seperti balita, remaja dan pemuda memiliki kemampuan fisik dan non fisik yang makin berkembang dan meningkat, sebaliknya penduduk lansia memiliki kemampuan fisik dan non fisik yang semakin menurun karena proses menua yang terjadi pada mereka secara alamiah. Sejalan dengan itu, program pembangunan pendidikan serta pengembangan dan peningkatan ketrampilan bagi penduduk lansia memerlukan penanganan yang lebih khusus dan terfokus.

4.1. Kemampuan membaca dan menulis

Ketrampilan membaca dan menulis huruf latin serta berhitung sederhana merupakan ketrampilan paling mendasar yang pertama kali diajarkan pada setiap siswa. Ketrampilan tersebut pada umumnya mulai diajarkan pada kelas awal jenjang pendidikan dasar atau Sekolah Dasar (SD). Penguasaan ketrampilan membaca dan menulis huruf latin dan berhitung sederhana merupakan persyaratan mutlak yang harus dikuasai oleh setiap orang dalam upaya mempelajari ketrampilan dan keahlian lainnya. Sebaliknya, seseorang yang tidak dapat membaca dan menulis huruf latin mencerminkan bahwa ia tidak pernah berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan.

Seseorang yang dapat membaca dan menulis huruf latin disebut melek huruf, sebaliknya seseorang yang tidak dapat membaca dan menulis huruf latin disebut buta huruf. Sejalan dengan itu, angka buta huruf yang menunjukkan proporsi penduduk buta huruf terhadap jumlah penduduk secara keseluruhan merupakan indikator dasar yang biasa digunakan untuk melihat tingkat pendidikan masyarakat.

Gambar 4.1.1 Persentase Penduduk Lansia yang Buta Huruf menurut Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin, Tahun 2004



Sumber: BPS - Susenas 2004

Seperti yang disajikan pada Gambar 4.1.1, angka buta huruf penduduk lansia secara keseluruhan pada tahun 2004 mencapai sebesar 41,4 persen. Angka buta huruf penduduk lansia di daerah perkotaan cenderung lebih rendah dari daerah pedesaan. Angka buta huruf penduduk lansia di daerah perkotaan tercatat sebesar 30,4 persen, sementara di daerah pedesaan mencapai sebesar 48,1 persen.

Dilihat dari angka buta huruf yang telah mencapai dua digit ini, tingkat pendidikan penduduk lansia pada umumnya masih jauh dari memadai. Angka buta huruf penduduk lansia yang cukup tinggi ini dipengaruhi oleh kondisi bangsa Indonesia pada 60 tahun yang lalu. Pada saat itu bangsa Indonesia baru melepaskan diri dari belenggu penjajahan sehingga pembangunan infra struktur serta berbagai fasilitas termasuk fasilitas pendidikan pada masa itu masih dilakukan masih dalam skala yang sangat terbatas.

Gambar 4.1.1 juga menunjukkan bahwa persentase penduduk lansia perempuan yang buta huruf pada tahun 2004 mencapai sebesar 54,7 persen dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk lansia laki-laki yaitu sebesar 26,6 persen. Kesenjangan yang cukup tinggi antara penduduk lansia buta huruf laki-laki dan penduduk lansia buta huruf perempuan nampak dipengaruhi oleh sistem budaya patriarki masyarakat Indonesia saat itu yang cenderung lebih menguntungkan kaum laki-laki, (lihat antara lain Iriantono et al, 2002).

Tabel 4.1.2 menyajikan persentase penduduk lansia yang buta huruf menurut status ekonomi rumah tangga. Dari tabel tersebut ditunjukkan bahwa angka persentase penduduk lansia buta huruf yang paling tinggi atau angka melek huruf yang terendah terletak pada kelompok 40 persen rumah tangga yang berpendapatan terendah. Sebaliknya, angka persentase penduduk lansia buta huruf yang paling kecil atau angka melek huruf tertinggi terletak pada kelompok 20 persen rumah tangga berpendapatan paling tinggi. Gambaran-gambaran tersebut secara umum menunjukkan kecenderungan bahwa semakin meningkat status ekonomi rumah tangga maka persentase lansia yang melek huruf semakin meningkat.

Tabel 4.1.2 juga menunjukkan bahwa kecenderungan semakin meningkatnya status ekonomi rumah tangga yang disertai dengan penurunan persentase penduduk lansia yang buta huruf dan sebaliknya, juga terlihat baik di daerah perkotaan maupun pedesaan.

Tabel 4.1.2 Persentase Penduduk Lansia menurut Tipe Daerah, Status Ekonomi Rumah Tangga dan Kemampuan Membaca dan Menulis, Tahun 2004

Tipe Daerah/ Jenis Kelamin	Melek Huruf	Buta Huruf	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan			
40 % bawah	53,23	46,77	100,00
40 % menengah	68,53	31,47	100,00
20 % atas	86,04	13,96	100,00
Perdesaan			
40 % bawah	45,67	54,33	100,00
40 % menengah	57,87	42,13	100,00
20 % atas	69,09	30,91	100,00
Perkotaan+Perdesaan			
40 % bawah	47,41	52,59	100,00
40 % menengah	62,38	37,62	100,00
20 % atas	81,22	18,78	100,00

Sumber: BPS - Susenas 2004

Tabel 4.1 (lampiran) menunjukkan bahwa persentase lansia yang buta huruf antar propinsi sangat bervariasi antara 3,0 – 65,0 persen. Angka buta huruf lansia tertinggi secara berturut-turut ditemukan pada propinsi Nusa Tenggara Barat (65,0 persen), DI. Yogyakarta (54,5 persen) dan Bali (54,5 persen). Sebaliknya persentase lansia yang buta huruf terendah secara berturut-turut ditemukan di propinsi Sulawesi Utara (3,0 persen), DKI Jakarta (12,0 persen) dan Maluku (13,3 persen).

4.2. Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Tabel 4.2.1 menyajikan persentase penduduk lansia menurut jenis kelamin dan pendidikan yang ditamatkan. Dari tabel tersebut ditunjukkan bahwa sebanyak 40,4 persen penduduk lansia tidak pernah pernah sekolah, sebanyak 30,3 persen tidak tamat SD,

sebanyak 18,8 persen adalah tamatan SD dan sebanyak 10,4 persen sisanya adalah tamatan SLTP ke atas.

Pendidikan penduduk lansia laki-laki lebih baik dari penduduk lansia perempuan. Dari Tabel 4.2.1 bahwa persentase penduduk lansia laki-laki yang tidak pernah sekolah adalah sebesar 26,0 persen, sementara untuk penduduk lansia perempuan mencapai sebesar 53,5 persen.

Tabel 4.2.1 Persentase Penduduk Lansia menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Tahun 2004

Tingkat Pendidikan yang ditamatkan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak/belum pernah sekolah	25,98	53,46	40,43
Tidak tamat SD	33,99	26,96	30,29
SD	24,71	13,52	18,82
SLTP	6,67	3,14	4,81
SM	6,63	2,51	4,46
PT	2,03	0,41	1,17
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS - Susenas 2004

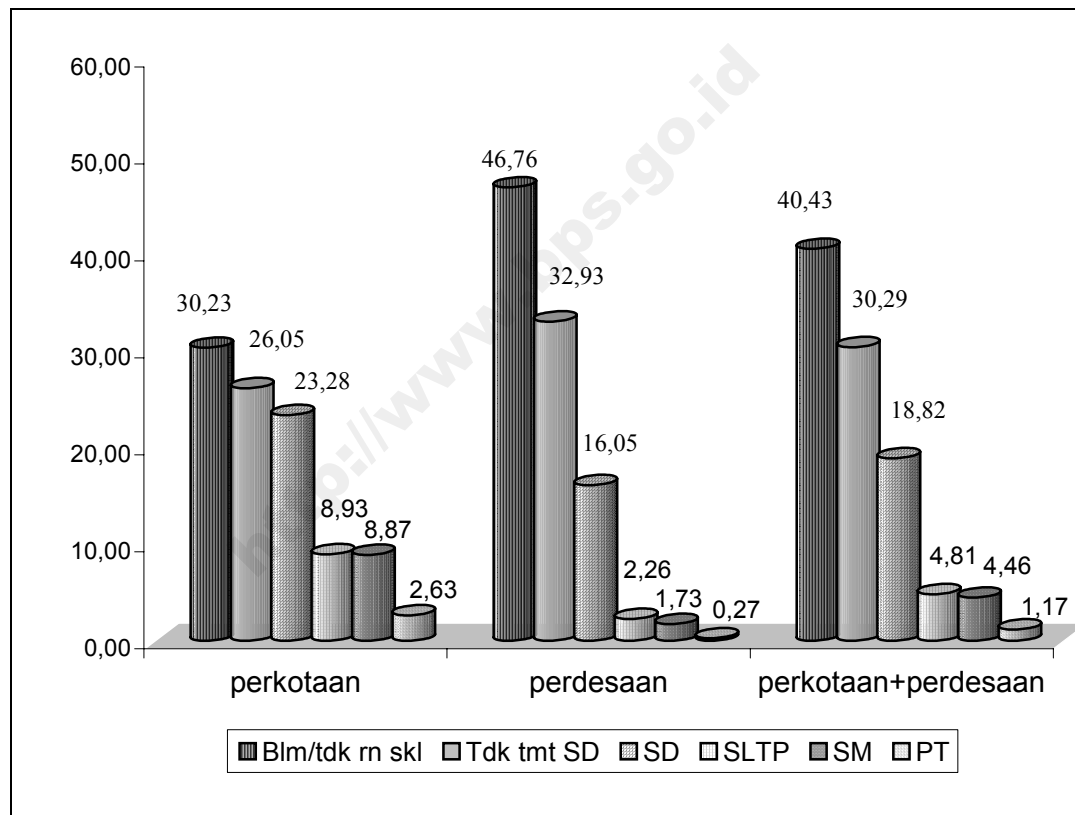
Tabel 4.2.1 juga menyajikan fenomena lain yang menarik berupa indikasi terjadinya kesenjangan gender dalam akses memperoleh pelayanan pendidikan. Dari tabel tersebut bahwa kesenjangan tersebut terjadi pada semua jenjang pendidikan dengan selisih persentase yang cukup signifikan.

Gambar 4.2.1 menyajikan persentase penduduk lansia menurut daerah tempat tinggal dan pendidikan yang ditamatkan. Dari gambar tersebut bahwa pendidikan penduduk lansia di daerah perkotaan cenderung lebih baik dari penduduk lansia yang di daerah perdesaan. Hal ini terlihat dari angka persentase penduduk lansia di daerah perkotaan pada setiap jenjang pendidikan cenderung lebih tinggi dari penduduk lansia di

daerah perdesaan, kecuali untuk penduduk lansia yang tidak pernah sekolah dan tidak tamat SD.

Kesenjangan pendidikan antara penduduk lansia di daerah perkotaan dan penduduk lansia di perdesaan diduga berakar dari adanya kesenjangan dalam memperoleh akses pelayanan pendidikan. Secara umum, akses penduduk di daerah perkotaan akan lebih baik dari mereka yang tinggal di perdesaan, antara lain disebabkan kelengkapan dan ketersediaan fasilitas pendidikan di daerah perkotaan yang pada umumnya telah cukup memadai.

Gambar 4.2.1. Persentase Penduduk Lansia menurut Tipe Daerah dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Tahun 2004



Sumber: BPS - Susenas 2004

Tabel Lampiran 4.3.3. menunjukkan bahwa pada umumnya para lansia mempunyai tingkat pendidikan yang rendah. Lebih dari 40 persen diantaranya tidak/belum pernah sekolah dan 30 persennya pernah sekolah tetapi tidak tamat SD. Persentase tertinggi lansia yang tidak/belum tamat pernah sekolah terdapat di Propinsi Nusa Tenggara Barat (67,6 %), persentase yang tinggi pula terdapat di Propinsi Bali

(56,8 %) dan Sulawesi Selatan (54,0 %). Sebaliknya persentase penduduk lansia terendah yang tidak/belum pernah sekolah terdapat di Propinsi Sulawesi Utara (1,2 %), persentase yang cukup rendah antara lain di Propinsi Maluku (12,5 %) dan DKI Jakarta (14,1 persen).

<http://www.bps.go.id>

BAB V. KESEHATAN PENDUDUK LANSIA

Kesehatan merupakan salah satu faktor penting bagi setiap manusia yang akan mempengaruhi kualitas kehidupannya. Pada dasarnya setiap orang akan mampu melakukan berbagai aktivitas secara optimal apabila didukung oleh kondisi kesehatan fisik dan non fisik yang prima. Gambaran tersebut secara nyata dapat diperoleh dari potret kegiatan masyarakat sehari-hari. Mengingat pentingnya kesehatan bagi kita semua pemerintah senantiasa memperhatikan dan memberikan prioritas pada bidang kesehatan. Upaya tersebut bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan bagi setiap penduduk melalui terwujudnya peningkatan kesehatan secara optimal dan berkesinambungan sebagai salah satu dari unsur dari kesejahteraan.

Kesehatan bagi penduduk lansia mempunyai arti yang sangat penting terutama dalam rangka mempertahankan agar mereka dapat tetap *survive* dalam melangsungkan kehidupannya. Proses menua (*aging*) yang secara alamiah terjadi pada penduduk lansia secara bertahap akan mengakibatkan daya tahan tubuhnya menjadi semakin menurun. Penurunan daya tahan tubuh tersebut hingga tingkat tertentu dapat mengakibatkan seseorang menjadi rentan atau mudah terserang berbagai penyakit.

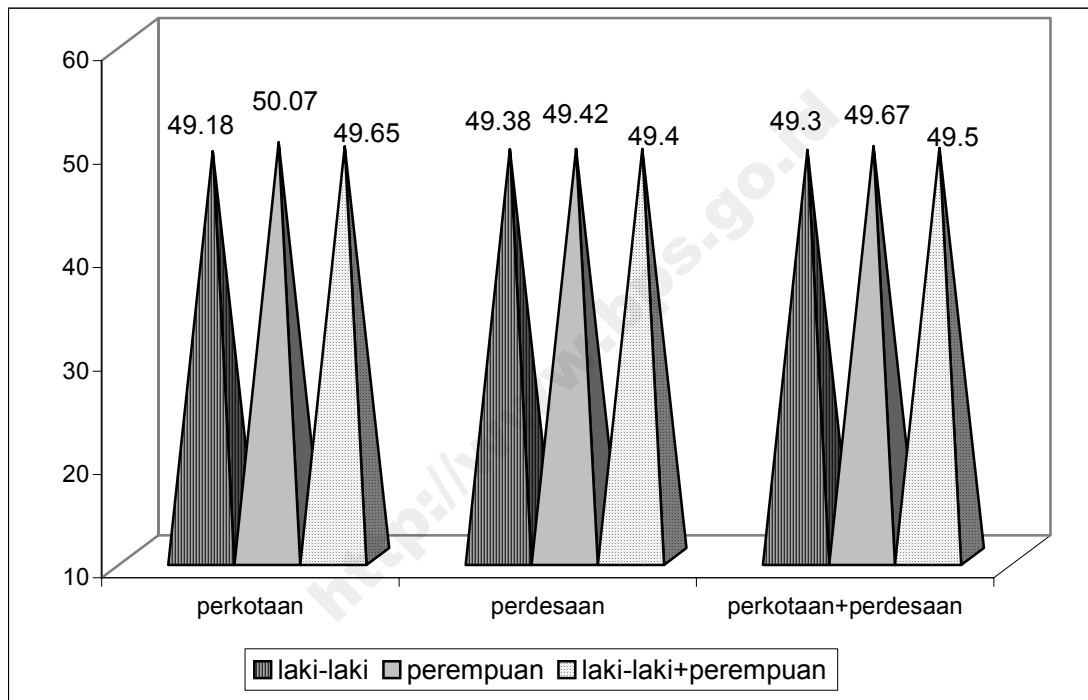
Kondisi kesehatan penduduk lansia sekarang ini tidak saja hanya dipengaruhi pola kehidupan sekarang, namun juga sangat dipengaruhi oleh pola hidup semasa mudanya. Kondisi kesehatan seseorang pada saat sekarang ini merupakan hasil proses akumulasi yang terjadi semenjak berupa janin dalam rahim. Secara umum dapat dikatakan bahwa seseorang yang mempunyai pola hidup sehat dari masa kecil, remaja, dewasa hingga lansia, kondisi kesehatannya akan lebih baik dibandingkan dengan lansia yang masa lalunya tidak berperilaku hidup sehat.

Untuk memperoleh gambaran makro mengenai kondisi kesehatan penduduk lansia, pada bagian ini akan dibahas secara garis besar gambaran mengenai derajat kesehatan penduduk lansia yang akan dilihat dari beberapa indikator kesehatan. Indikator yang dibahas pada bagian ini mencakup angka keluhan kesehatan, angka kesakitan, rata-rata lama sakit, dan cara berobat penduduk lansia.

5.1 Keluhan Kesehatan

Keluhan kesehatan adalah seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan, baik karena penyakit akut/kronis, kecelakaan, kriminalitas atau sebab lainnya. Keluhan kesehatan tidak selalu mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari, namun insiden terjadinya keluhan kesehatan dan jenis keluhan yang dialami oleh penduduk dapat menggambarkan tingkat/derajat kesehatan secara kasar.

Gambar 5.1.1 Persentase Penduduk Lansia yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Sebulan yang Lalu menurut Jenis Kelamin dan Tipe Daerah, 2004



Sumber : BPS – Susenas 2004

Gambar 5.1.1 menunjukkan bahwa hampir separuh atau sebesar 49,5 persen dari keseluruhan populasi penduduk lansia mengalami keluhan kesehatan selama sebulan yang lalu. Persentase penduduk lansia yang mengalami keluhan kesehatan antara laki-laki dan perempuan relatif sama. Gambaran yang serupa juga ditemukan baik di daerah perkotaan maupun perdesaan.

Persentase penduduk lansia yang mengalami keluhan kesehatan pada masing-masing propinsi nampak bervariasi dengan persentase antara 33,6 – 64,9 persen (lihat

Tabel Lampiran 5.1). Persentase penduduk lansia yang mengalami keluhan kesehatan dari yang paling tinggi secara berturut-turut ditemukan di propinsi Maluku Utara (64,9%), Nusa Tenggara Barat (63,9 %), dan Bangka Belitung (62,8 %). Sebaliknya, persentase penduduk lansia yang mengalami keluhan kesehatan terkecil secara berturut-turut ditemukan di propinsi Maluku (33,6 %), Kalimantan Tengah (35,6 %), dan Papua (35,8 %).

Tabel 5.1.1 Persentase Penduduk Lansia yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Sebulan yang Lalu menurut Jenis Keluhan, Jenis Kelamin dan Tipe Daerah, 2004

Jenis Keluhan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Laki-laki			
Panas	20,84	19,99	20,31
Batuk	46,55	50,39	48,94
Pilek	30,81	29,61	30,06
Sakit gigi	18,72	19,50	19,21
Perempuan			
Panas	20,47	22,10	21,46
Batuk	41,92	44,71	43,62
Pilek	28,14	27,43	27,71
Sakit gigi	23,11	22,81	22,92
Laki-laki+Perempuan			
Panas	20,64	21,09	20,92
Batuk	44,06	47,42	46,13
Pilek	29,38	28,47	28,82
Sakit gigi	21,08	21,23	21,17

Sumber : BPS – Susenas 2004

Tabel 5.1.1 menyajikan persentase penduduk lansia yang mengalami keluhan kesehatan menurut jenis keluhan kesehatan, tipe daerah dan jenis kelamin. Dari tabel tersebut ditunjukkan bahwa jenis keluhan kesehatan yang paling banyak dialami oleh para lansia berturut-turut adalah batuk, pilek, sakit gigi dan panas dengan persentase masing-masing sebesar 46,1 persen, 28,8 persen, 21,2 persen dan 20,9 persen. Gambaran yang sama dirasakan oleh penduduk lansia, baik yang tinggal di daerah perkotaan maupun daerah perdesaan.

5.2. Angka Kesakitan

Angka kesakitan (*morbidity rates*) yang menunjukkan proporsi penduduk yang menderita akibat masalah kesehatan hingga mengganggu aktifitas sehari-hari selama satu bulan terakhir. Angka kesakitan merupakan indikator yang biasa digunakan untuk mengukur derajat kesehatan penduduk. Angka kesakitan tergolong sebagai indikator kesehatan negatif. Semakin tinggi angka kesakitan, menunjukkan derajat kesehatan penduduk semakin buruk. Sebaliknya, semakin rendah angka kesakitan, menunjukkan derajat kesehatan penduduk yang semakin baik.

Tabel 5.2.1 Angka Kesakitan Lansia menurut Jenis Kelamin dan Tipe Daerah, 2004

Jenis Kelamin	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Laki-laki	29,32	31,45	30,64
Perempuan	29,07	30,25	29,79
Laki-laki+ perempuan	29,18	30,83	30,20

Sumber : BPS – Susenas 2004

Tabel 5.2.1 menunjukkan bahwa angka kesakitan penduduk lansia secara keseluruhan pada tahun 2004 mencapai sebesar 30,2 persen yang berarti bahwa dari setiap 100 orang lansia terdapat sekitar 30 orang di antaranya mengalami sakit. Angka kesakitan penduduk lansia perempuan tercatat sebesar 29,8 persen lebih rendah dari angka kesakitan penduduk lansia laki-laki yang mencapai sebesar 30,6 persen.

Tabel 5.2.1 juga menunjukkan bahwa angka kesakitan penduduk lansia yang tinggal di daerah perdesaan cenderung lebih tinggi dibandingkan dari lansia yang tinggal di daerah perkotaan. Angka kesakitan penduduk lansia di daerah perdesaan tahun 2004 mencapai sebesar 30,8 persen, sedangkan di daerah perkotaan hanya sebesar 29,2 persen. Kecenderungan serupa juga terlihat baik untuk penduduk lansia laki-laki maupun penduduk lansia perempuan. Angka kesakitan penduduk lansia laki-laki di perdesaan mencapai sebesar 31,5 persen, sedangkan di perkotaan hanya sebesar 29,3 persen.

Sementara itu, angka kesakitan penduduk lansia perempuan di perdesaan mencapai sebesar 30,2 persen, sedangkan di perkotaan hanya sebesar 29,1 persen.

Angka kesakitan penduduk lansia pada masing-masing propinsi nampak bervariasi dengan persentase berkisar antara 21,2 – 54,9 persen. Seperti yang disajikan pada Tabel Lampiran 5.2, angka kesakitan penduduk lansia dari yang paling tinggi secara berturut-turut ditemukan di propinsi Maluku Utara (54,9 persen), Nusa Tenggara Barat (45,0 persen), dan Nusa Tenggara Timur (44,2 persen). Sebaliknya, angka kesakitan terendah secara berturut-turut ditemukan pada propinsi Sumatera Selatan (21,2 persen), Jambi (24,6 persen), dan DI. Yogyakarta (24,8 persen).

5.3. Lama Sakit

Lama seseorang menderita sakit secara umum mencerminkan intensitas atau derajat sakit serta bobot penyakit yang diderita seseorang. Semakin lama seseorang menderita sakit menunjukkan bahwa sakit yang dideritanya cukup parah, dan sebaliknya. Pada sisi lain, lama seseorang menderita sakit juga mencerminkan kualitas kesehatan fisik seseorang yang direfleksikan melalui daya tahan tubuh. Semakin lama seseorang menderita sakit menunjukkan daya tahan tubuhnya terhadap serangan berbagai penyakit sangat lemah, dan sebaliknya.

Tabel 5.3.1 menyajikan persentase penduduk lansia yang mengalami sakit menurut lamanya sakit. Dari tabel tersebut ditunjukkan bahwa jumlah hari sakit yang paling banyak dialami penduduk lansia adalah selama 1-3 hari dan 4-7 hari dengan persentase sebesar 35,4 persen dan 37,4 persen. Sedangkan sebanyak 26,2 persen penduduk lansia lainnya menderita sakit lebih dari 7 hari (seminggu).

Tabel 5.3.1 juga menunjukkan penduduk lansia yang tinggal di daerah perkotaan maupun di daerah perdesaan pada umumnya menderita sakit tidak lebih dari satu minggu. Persentase penduduk lansia yang tinggal di daerah perkotaan dengan lama hari sakit selama 1 - 3 hari dan 4 - 7 hari masing-masing mencapai sebesar 33,7 persen dan 37,9 persen. Persentase tersebut di daerah perdesaan masing-masing tercatat sebesar 37,1 persen dan 36,9 persen. Dari tabel tersebut juga nampak bahwa secara rata-rata lama

hari sakit yang diderita penduduk lansia yang tinggal di daerah perkotaan tidak banyak berbeda dengan rekan mereka yang tinggal di daerah perdesaan.

Tabel 5.3.1 Persentase Penduduk Lansia yang Sakit menurut Lamanya Sakit dan Tipe Daerah, 2004

Lama Sakit (Hari)	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
1 – 3	33,66	37,12	35,45
4 – 7	37,93	36,87	37,38
8 – 14	9,69	9,85	9,77
15 – 21	6,17	4,92	5,53
22 – 30	12,55	11,24	11,87
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS – Susenas 2004

Tabel Lampiran 5.5.3 menunjukkan bahwa lama hari sakit penduduk lansia pada masing-masing propinsi nampak bervariasi untuk masing-masing kelompok lama hari sakit. Kelompok lama hari sakit lansia yang dominan untuk seluruh propinsi adalah antara 1 - 3 hari dan 4 – 7 hari. Pada masing-masing kelompok lama hari sakit tersebut, persentasenya berkisar antara 21,3 – 50,5 persen dan antara 27,9 – 44,64 persen. Pada kelompok lama hari sakit lansia antara 1 – 3 hari, propinsi yang mempunyai persentase paling tinggi secara berturut-turut ditemukan di propinsi Bali (50,5 persen), DKI Jakarta (44,5 persen), Sumatera Selatan (44,8 persen). Sebaliknya, pada kelompok hari sakit yang sama, persentase terendah secara berturut-turut ditemukan pada propinsi Maluku (21,3 persen), Sulawesi Tengah (24,1 persen), dan Nusa Tenggara Timur (24,8 persen).

5.4. Cara Berobat

Kebiasaan serta cara berobat yang dilakukan seseorang, merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat apakah orang yang bersangkutan telah memiliki pola perilaku hidup sehat. Pada dasarnya apabila seseorang menderita sakit maka ia harus

segera mendapatkan perawatan dan pengobatan agar cepat sembuh dan dapat melakukan berbagai aktivitas seperti semula. Berobat atau pengobatan bisa dilakukan dengan berbagai cara seperti berobat sendiri atau mendatangi tempat pelayanan kesehatan, baik modern maupun tradisional, termasuk mendatangkan petugas kesehatan ke rumah pasien.

Tabel 5.4.1 Persentase Penduduk Lansia yang Berobat Sendiri menurut Jenis Obat yang Digunakan dan Tipe Daerah, 2004

Jenis Obat yang Digunakan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Tradisional	12,36	12,98	12,74
Modern	51,92	45,65	48,04
Lainnya	1,65	1,97	1,85
Campuran	34,06	39,40	37,37
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS – Susenas 2004

Tabel 5.4.1 menyajikan persentase penduduk lansia yang sakit dan berobat sendiri menurut jenis obat yang digunakan. Dari tabel tersebut nampak bahwa jenis obat yang paling banyak dimanfaatkan penduduk lansia untuk berobat sendiri berturut-turut adalah obat modern, campuran, tradisional dan lainnya (selain obat modern dan tradisional) dengan persentase pemakai masing-masing sebesar 48,0 persen, 37,4 persen, 12,7 persen dan 1,8 persen.

Tabel 5.4.1 juga menunjukkan bahwa secara umum penduduk lansia di daerah perkotaan lebih senang menggunakan obat modern dibandingkan dengan rekan mereka di daerah perdesaan. Persentase penduduk lansia yang menggunakan obat modern tercatat sebesar 51,9 persen di daerah perkotaan dan sebesar 45,6 persen di daerah perdesaan. Sebaliknya, penduduk lansia di daerah perdesaan lebih menyukai obat tradisional, obat campuran dan obat lainnya dibandingkan dengan rekannya di daerah perkotaan.

Tabel Lampiran 5.4.3 menunjukkan bahwa lansia yang melakukan pengobatan sendiri dengan menggunakan obat modern pada masing-masing propinsi nampak

bervariasi dengan persentase berkisar antara 29,3 – 63,0 persen. Propinsi yang mempunyai persentase paling tinggi secara berturut-turut ditemukan di propinsi Kalimantan Tengah (63,0 persen), Sulawesi Utara (57,7 persen), Jawa Tengah (57,3 persen) dan Kalimantan Selatan (57,3 persen). Sebaliknya, propinsi yang mempunyai persentase terendah secara berturut-turut ditemukan pada propinsi Bali (29,3 persen), Nanggroe Aceh Darussalam (31,5 persen), dan Maluku Utara (32,3 persen).

Tabel 5.4.2 Persentase Penduduk Lansia yang Berobat Jalan menurut Tempat Berobat dan Tipe Daerah, 2004

Tempat Berobat	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan+Perdesaan		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Rumah sakit	19,06	14,75	16,79	7,75	4,80	6,25	12,44	9,11	10,72
Praktek Dokter	42,03	38,32	40,08	25,41	22,09	23,73	32,30	29,13	30,66
Puskesmas/Pustu	31,04	36,22	37,77	42,80	44,61	43,72	37,93	40,97	39,50
Poliklinik	4,01	3,34	3,66	2,29	2,06	2,17	3,01	2,61	2,80
Praktek Petugas Kesehatan	16,50	17,90	17,24	31,62	33,63	32,64	25,35	26,81	26,10
Praktek Tradisional	1,95	1,79	1,87	1,71	1,91	1,81	1,81	1,86	1,83
Lainnya	3,72	2,88	3,28	4,69	4,58	4,63	4,28	3,84	4,06

Sumber : BPS – Susenas 2004

Seperti yang disajikan pada Tabel 5.4.2, fasilitas pelayanan kesehatan yang paling diminati oleh penduduk lansia untuk berobat berturut-turut adalah puskesmas/puskesmas pembantu, kemudian tempat praktek dokter dan praktek petugas kesehatan. Persentase penduduk lansia yang berobat pada ketiga jenis fasilitas pelayanan kesehatan tersebut masing-masing mencapai sebesar 39,5 persen, 30,7 persen dan 26,1 persen. Dari tabel tersebut juga nampak bahwa terdapat kesamaan preferensi antara penduduk lansia laki-laki dan penduduk lansia perempuan dalam memilih jenis fasilitas/tempat berobat.

Tabel 5.4.2 juga menunjukkan bahwa preferensi penduduk lansia di daerah perkotaan dalam memilih jenis fasilitas/tempat berobat untuk berobat jalan nampak berbeda dengan penduduk lansia di daerah perdesaan. Jenis fasilitas/tempat berobat jalan

yang paling diminati oleh penduduk lansia. di daerah perkotaan berturut-turut adalah praktek dokter (40,1 %), kemudian puskesmas/pustu (37,8 %) dan praktek petugas kesehatan (17,2 %). Sementara penduduk lansia di daerah perdesaan, lebih berminat berobat jalan pada puskesmas/pustu (43,7 %), kemudian praktek petugas kesehatan (32,6%) dan praktek dokter (23,7 %).

Tabel Lampiran 5.6.3 menunjukkan bahwa lansia yang sakit dan melakukan usaha penyembuhan dengan berobat ke puskesmas/puskesmas pembantu pada masing-masing propinsi nampak bervariasi dengan persentase berkisar antara 24,4 – 77,1 persen. Propinsi yang lansianya berobat ke puskesmas/pustu dengan persentase paling tinggi secara berturut-turut ditemukan di Propinsi Papua (77,1 %), Nusa Tenggara Timur (69,9%), dan Nanggroe Aceh Darussalam (69,4 %). Sebaliknya, propinsi yang mempunyai persentase terendah secara berturut-turut ditemukan pada Propinsi DI. Yogyakarta (24,4 %), DKI Jakarta (27,0 %), dan Sumatera Utara (30,8 %).

BAB VI. KEGIATAN EKONOMI PENDUDUK LANSIA

Partisipasi penduduk lansia dalam kegiatan ekonomi merupakan fenomena yang perlu dicermati lebih mendalam. Hal ini berkaitan dengan dua argumentasi yang mendasar tentang penduduk lansia. Pertama, kemampuan fisik maupun non fisik penduduk lansia pada umumnya akan semakin berkurang yang mengakibatkan tingkat produktivitasnya juga mengalami penurunan. Kedua, umumnya para lansia mengalami pergeseran orientasi dari orientasi ekonomi ke aspek sosial dan keagamaan. Kondisi ini memberikan gambaran yang suram mengenai kesejahteraan mereka. Dalam hal ini, keberadaan penduduk lansia di dalam angkatan kerja menunjukkan bahwa mereka harus tetap survive dalam menjalani kehidupannya.

Secara normatif, penduduk lansia merupakan kelompok penduduk yang seyogyanya tinggal menikmati hasil dari segenap upaya dan jerih payah yang dilakukannya semasa mereka masih muda. Gambaran seperti ini pada umumnya hanya diwakili oleh penduduk lansia yang sekarang ini berstatus sebagai penerima pendapatan, antara lain penerima pensiunan, penerima deviden dan penerima bunga deposito. Namun demikian jumlah mereka relatif kecil dibandingkan dengan populasi penduduk lansia secara keseluruhan. Penelitian tentang penduduk penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang dilakukan BPS pada tahun 2003 (BPS, 2003) menunjukkan masih terdapat sebanyak 2,4 juta penduduk lansia yang tergolong sebagai penduduk lansia terlantar yaitu penduduk lansia yang tidak/belum mampu memenuhi kebutuhan minimalnya untuk dapat hidup secara layak.

Tulisan pada bagian ini dimaksudkan untuk melihat gambaran secara makro mengenai kegiatan ekonomi penduduk lansia. Gambaran tersebut secara rinci akan dilihat dari berbagai indikator ketenaga-kerjaan yang mencakup tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), tingkat pengangguran terbuka, lapangan usaha, status pekerjaan, jenis pekerjaan, tingkat pendidikan pekerja dan jumlah jam kerja.

6.1. Partisipasi Angkatan Kerja Penduduk Lansia

Tabel 6.1 menunjukkan gambaran mengenai penduduk lansia yang termasuk dalam kategori sebagai angkatan kerja menurut jenis kelamin dan tipe daerah. Dari tabel tersebut terlihat bahwa dari seluruh penduduk lansia yang termasuk dalam kategori angkatan kerja, sekitar 88,0 persen diantaranya adalah lansia yang bekerja, dan selebihnya sekitar 12,0 persen adalah lansia yang menganggur. Persentase penduduk lansia laki-laki yang bekerja lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk lansia perempuan (92,2 persen berbanding dengan 80,2 persen). Pola seperti ini terjadi baik di daerah perkotaan maupun di daerah perdesaan.

Tabel 6.1 Persentase Penduduk Lansia menurut Jenis Kegiatan, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, Tahun 2004

Tipe Daerah/Jenis Kelamin	Angkatan Kerja			Bukan Angkatan Kerja		
	Bekerja	Penganggur	Jumlah	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perkotaan						
- Laki-laki	84,63	15,37	100,00	10,04	89,96	100,00
- Perempuan	71,54	28,46	100,00	59,11	40,89	100,00
- Laki-laki+Perempuan	79,99	20,01	100,00	43,11	56,89	100,00
Perdesaan						
Laki-laki	95,85	4,15	100,00	7,35	92,65	100,00
Perempuan	84,51	15,49	100,00	55,95	44,05	100,00
Laki-laki+Perempuan	91,89	8,11	100,00	43,58	56,42	100,00
Perkotaan+Perdesaan						
Laki-laki	92,20	7,80	100,00	8,71	91,29	100,00
Perempuan	80,29	19,77	100,00	57,28	42,72	100,00
Laki-laki+Perempuan	88,00	12,00	100,00	43,37	56,63	100,00

Sumber: BPS - Susenas 2004

Tabel 6.1 juga menunjukkan gambaran mengenai kegiatan yang paling banyak dilakukan penduduk lansia yang bukan angkatan kerja pada umumnya adalah kegiatan

lainnya (56,6 persen) selebihnya mengurus rumah tangga. Pola kegiatan penduduk lansia bukan angkatan kerja serupa juga ditemukan baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Kegiatan lainnya yang dimaksud dalam hal ini mencakup berbagai kegiatan selain kegiatan bekerja, mencari pekerjaan, sekolah dan mengurus rumah tangga. Kegiatan lainnya antara lain merupakan kegiatan santai, rekreasi, olahraga, hiburan, kegiatan sosial dan kegiatan keagamaan yang antara lain berupa kegiatan pengajian atau kebaktian dan kegiatan kemasyarakatan.

Tabel Lampiran 6.2, menyajikan persentase penduduk lansia yang bekerja terhadap seluruh penduduk lansia pada setiap propinsi. Persentase penduduk lansia yang bekerja untuk masing-masing propinsi sangat bervariasi dengan variasinya berkisar antara 27,3 – 59,7 persen. Persentase tersebut untuk penduduk lansia laki-laki lebih tinggi, yaitu berkisar antara 42,3 – 76,5 persen, sedangkan untuk penduduk lansia perempuan berkisar lebih rendah, yaitu antara 11,5 – 49,1 persen.

Tabel Lampiran 6.2 juga menunjukkan bahwa persentase terbesar penduduk lansia yang bekerja secara berturut-turut ditemukan di propinsi Sulawesi Tenggara (59,7 persen), Yogyakarta (58,3 persen), Nusa Tenggara Timur (54,8 persen), Lampung (53,6 persen) dan Kalimantan Tengah (51,7 persen). Sebaliknya, persentase paling kecil dari penduduk lansia yang bekerja ditemukan di propinsi DKI Jakarta (27,3 persen), kemudian di Sulawesi Utara (35,6 persen), Sulawesi Selatan (36,3 persen), Sumatera Barat (37,7 persen) dan Gorontalo (39,3 persen).

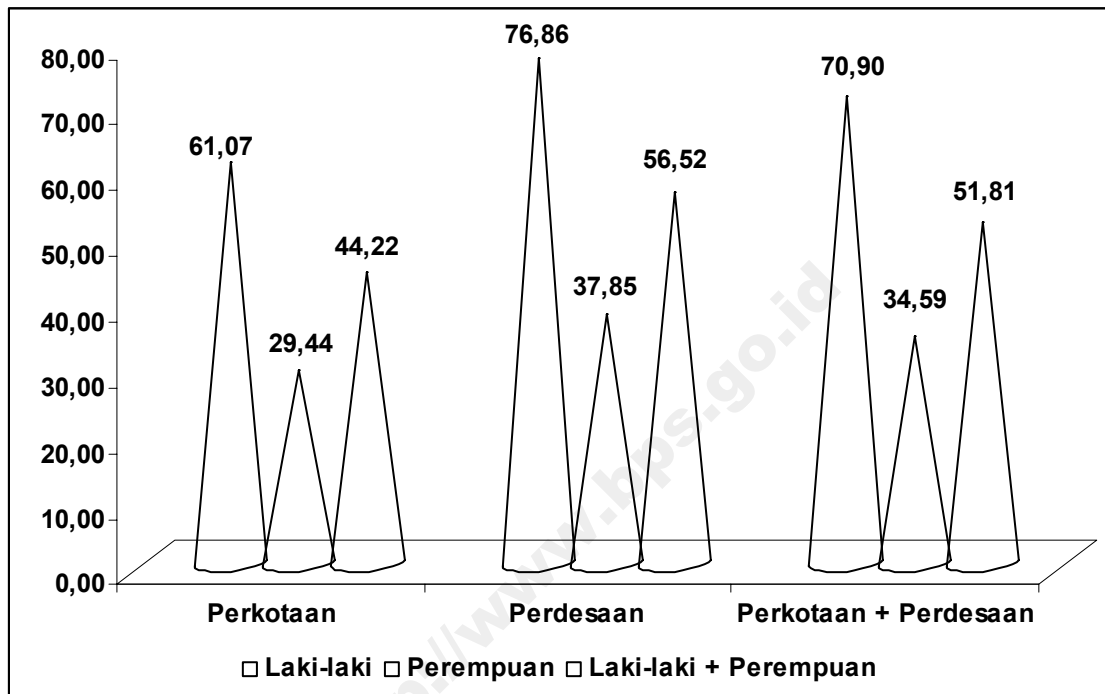
6.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Penduduk Lansia

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) didefinisikan sebagai perbandingan antara angkatan kerja dengan seluruh penduduk usia kerja. Dalam hal penduduk lansia, maka angkatan kerja mencakup penduduk lansia yang terlibat dalam kegiatan ekonomi, yaitu lansia yang bekerja dan lansia yang menganggur. Penduduk usia kerja sebagai pembanding adalah penduduk lansia itu sendiri.

Gambar 6.2.1 memberikan gambaran mengenai tingkat partisipasi angkatan kerja penduduk lansia menurut jenis kelamin dan tipe daerah. Dari gambaran tersebut dapat

dilihat bahwa TPAK penduduk lansia secara nasional sebesar 51,8 persen. Dilihat menurut jenis kelamin, TPAK penduduk lansia laki-laki lebih tinggi dibanding dengan penduduk lansia perempuan (70,9 persen berbanding dengan 34,6 persen). Pola yang sama terjadi baik di daerah perkotaan maupun perdesaan.

Gambar 6.2.1 TPAK Penduduk Lansia menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, Tahun 2004



Sumber: BPS - Susenas 2004

Tabel Lampiran 6.1 menunjukkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) untuk penduduk lansia pada masing-masing propinsi nampak bervariasi dengan persentase berkisar antara 39,7 – 61,8 persen. TPAK penduduk lansia paling tinggi berturut-turut ditemukan di propinsi Sulawesi Tenggara (61,8 persen), Yogyakarta (61,1 persen), Lampung (57,6 persen), Nusa Tenggara Timur (57,1 persen) dan Jambi (56,5 persen). Sebaliknya, angka TPAK paling rendah berturut-turut ditemukan di DKI Jakarta (39,7 persen), Sulawesi Tenggara (41,7 persen), Sumatera Barat (43,7 persen), Maluku (45,2 persen) dan Sulawesi Utara (45,4 persen). Di propinsi daerah perkotaan, TPAK penduduk lansia berkisar antara 24,3 – 50,3 persen, sedangkan di daerah

perdesaan angka tersebut nampak lebih tinggi dengan persentase berkisar antara 44,5 – 72,0 persen.

6.3. Lapangan Usaha

Lapangan usaha dalam ulasan ini diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu pertanian (*Agriculture*), industri (*Manufacturing*) dan jasa (*Service*). Kelompok lapangan usaha pertanian mencakup sektor pertanian, kelompok industri mencakup sektor pertambangan/penggalan, industri, listrik/gas/air dan konstruksi, sedangkan kelompok jasa terdiri dari sektor perdagangan, transportasi/komunikasi, keuangan, jasa dan lainnya. Ke-tiga kelompok sektor ini dikenal sebagai sektor A (*Agriculture*), M (*Manufacturing*) dan S (*Services*).

Tabel 6.3.1 Persentase Penduduk Lansia yang Bekerja menurut Kelompok Lapangan Usaha dan Tipe Daerah, Tahun 2004

Kelompok Lapangan Usaha	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Pertanian (A)	38,59	83,02	69,82
Industri (M)	12,22	5,25	7,32
Jasa – Jasa (S)	49,19	11,73	22,85
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS - Susenas 2004

Seperti halnya penduduk Indonesia yang mayoritas adalah pekerja sektor pertanian, sektor ini juga merupakan andalan bagi mayoritas pekerja lansia. Pada Tabel 6.3.1, terlihat bahwa sebesar 69,8 persen pekerja lansia adalah bekerja di sektor pertanian, sebesar 7,3 persen bekerja di sektor kelompok industri dan sebesar 22,9 persen lainnya bekerja di sektor jasa. Tingginya persentase lansia yang bekerja di sektor pertanian antara lain terkait dengan tingkat pendidikan penduduk lansia yang pada umumnya yang masih rendah.

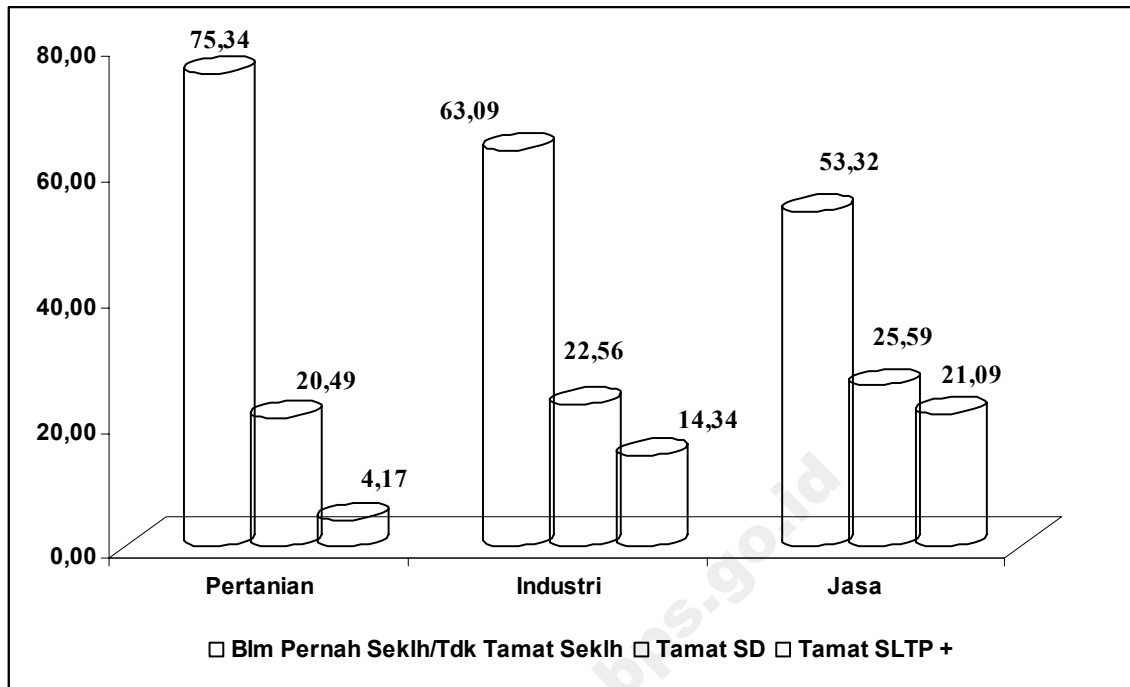
Tabel 6.3.1 juga menunjukkan bahwa struktur pekerjaan penduduk lansia di daerah perkotaan berbeda dengan struktur di perdesaan. Mayoritas para lansia di perkotaan bekerja dikelompok sektor jasa (49,2 persen), sedangkan di perdesaan adalah pertanian (83,0 persen).

Struktur pekerjaan penduduk lansia pada setiap propinsi seperti yang disajikan pada Tabel Lampiran 6.3.3 menunjukkan pola yang serupa dengan pola secara nasional dengan sektor pertanian, jasa dan industri berturut-turut merupakan sektor-sektor yang paling banyak diminati, kecuali di DKI Jakarta. Sektor yang paling diminati penduduk lansia di DKI Jakarta berturut-turut adalah jasa, industri dan pertanian.

Serupa dengan struktur pekerjaan penduduk lansia di daerah perkotaan secara nasional, sektor yang diandalkan oleh penduduk lansia di daerah perkotaan masing-masing propinsi berturut-turut adalah sektor jasa, pertanian dan industri, kecuali di daerah perkotaan propinsi Bengkulu, Lampung, Jawa Tengah, Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Maluku Utara. Seperti yang disajikan pada Tabel Lampiran 6.3.1, daerah perkotaan di enam propinsi tersebut masih bergantung pada sektor pertanian sebagai andalan utama. Sementara itu, di daerah perdesaan pada semua propinsi, sektor pertanian masih merupakan andalan utama, disusul oleh kelompok sektor jasa dan industri (lihat Tabel Lampiran 6.3.2).

Gambar 6.3.1 menyajikan komposisi pekerja lansia menurut pendidikan yang ditamatkan dan lapangan usaha. Dari tabel ditunjukkan bahwa pada jenjang pendidikan yang semakin tinggi, persentase penduduk lansia yang bekerja di sektor pertanian cenderung semakin berkurang. Gambaran ini secara umum mendukung dugaan sebelumnya yaitu bahwa bertumpuknya pekerja lansia di sektor pertanian berkaitan dengan akses untuk memperoleh pekerjaan di sektor ini jauh lebih mudah dibandingkan dengan sektor lainnya yang pada umumnya mensyaratkan kualifikasi tingkat ketrampilan dan pendidikan tertentu.

Gambar 6.3.1 Persentase Penduduk Lansia yang Bekerja menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Kelompok Lapangan Usaha, Tahun 2004



Sumber: BPS - Susenas 2004

6.4. Status Pekerjaan

Seperti yang disajikan pada Tabel 6.4.1, status pekerjaan penduduk lansia pada umumnya adalah berusaha dibantu buruh tidak tetap (36,7 persen) dan berusaha sendiri (29,4 persen). Pola yang serupa juga terlihat untuk status pekerjaan penduduk lansia laki-laki dengan persentase mereka yang berusaha dibantu buruh tidak tetap dan berusaha masing-masing sebesar 44,9 persen dan 28,2 persen, sementara status pekerjaan yang paling diminati penduduk lansia perempuan berturut-turut adalah berusaha sendiri (32,0 persen) dan pekerja tidak dibayar (28,8 persen).

Tabel 6.4.1 juga menunjukkan bahwa struktur status pekerjaan penduduk lansia di daerah perkotaan juga berbeda dengan di daerah perdesaan. Status pekerjaan mayoritas penduduk lansia di daerah perkotaan berturut-turut adalah berusaha sendiri (37,7 persen) dan berusaha dibantu buruh tidak tetap (24,9 persen), sedangkan status pekerjaan

mayoritas penduduk lansia di daerah pedesaan berturut-turut adalah berusaha dibantu buruh tidak tetap (41,6 persen) dan berusaha sendiri (25,9 persen).

Tabel 6.4.1 Persentase Penduduk Lansia yang Bekerja menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Status Pekerjaan, Tahun 2004

Tipe Daerah/ Kategori Keterlantaran	Berusa- ha sendiri	Berusa ha dibantu buruh tdk tetap	Berusa ha dibantu buruh tetap	Buruh / karya wan	Pekerja bebas pertani an	Pekerja bebas non per tanian	Pekerja tidak Di bayar	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Perkotaan								
Laki-laki	35,00	28,94	8,05	17,41	6,14	2,83	1,62	100,00
Perempuan	43,45	16,26	3,25	9,57	9,05	1,96	16,47	100,00
Laki-laki+Perempuan	37,68	24,92	6,53	14,92	7,06	2,55	6,33	100,00
Perdesaan								
Laki-laki	25,28	51,70	4,92	5,17	8,48	1,10	3,34	100,00
Perempuan	27,18	20,34	2,54	5,03	10,10	0,92	33,90	100,00
Laki-laki+Perempuan	25,89	41,63	4,16	5,12	9,00	1,04	13,16	100,00
Perkotaan+Perdesaan								
Laki-laki	28,18	44,91	5,86	8,82	7,79	1,62	2,83	100,00
Perempuan	31,97	19,14	2,75	6,36	9,79	1,22	28,77	100,00
Laki-laki+Perempuan	29,40	36,66	4,86	8,03	8,43	1,49	11,13	100,00

Sumber: BPS - Susenas 2004

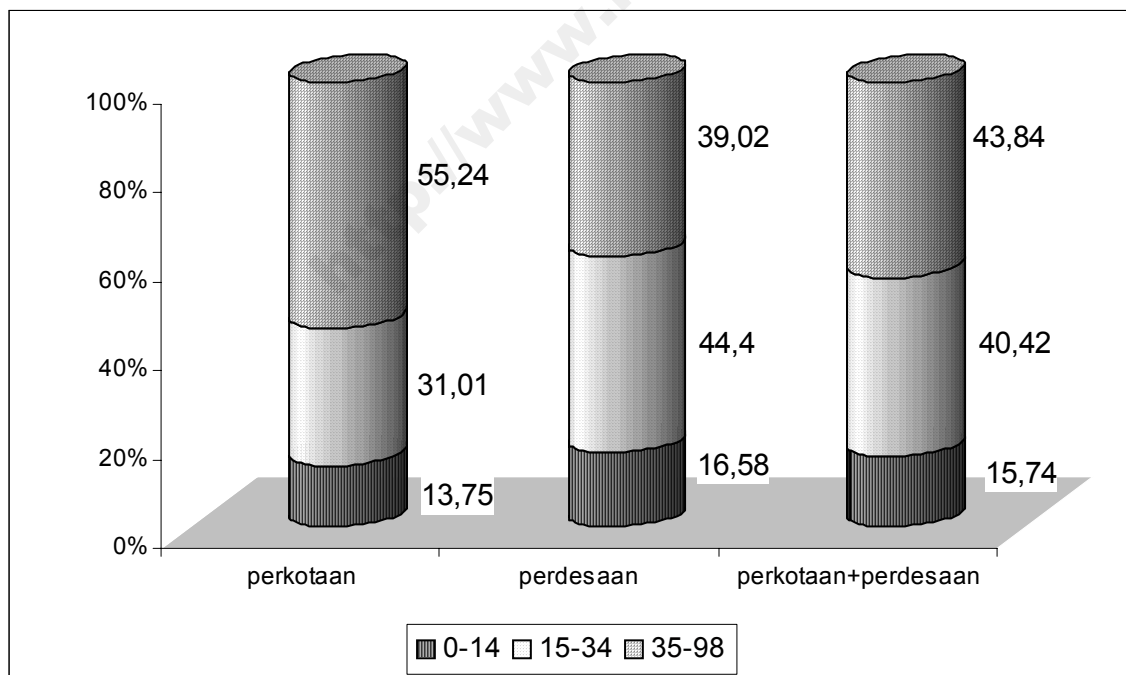
Seperti terlihat pada Tabel Lampiran 6.4.3, struktur status pekerjaan penduduk lansia di masing-masing propinsi terbagi ke dalam dua pola. Pola yang pertama dengan komposisi status pekerjaan berturut-turut adalah berusaha dibantu buruh dan berusaha sendiri yang ditemukan di sebanyak 19 propinsi (63,3 persen) dan merupakan pola umum untuk daerah pedesaan propinsi (lihat Tabel Lampiran 6.4.2). Pola yang kedua dengan urutan status pekerjaan sebaliknya, yaitu berusaha sendiri dan berusaha dibantu buruh

tidak tetap yang terlihat di sebanyak 11 propinsi (36,7 persen) dan merupakan pola umum untuk daerah perkotaan propinsi (lihat Tabel Lampiran 6.4.1).

6.5. Jumlah Jam Kerja

Gambar 6.5.1 menyajikan komposisi penduduk lansia yang bekerja menurut jumlah jam kerja dan daerah tempat tinggal. Persentase pekerja lansia yang bekerja kurang dari 15 jam seminggu adalah sebesar 15,7 persen. Sementara itu, lansia yang bekerja dengan jumlah jam kerja kurang dari 35 jam seminggu sebesar 40,4 persen dan pada jumlah jam kerja 35 jam dan lebih selama seminggu sebesar 43,8 persen. Gambaran ini menunjukkan bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta sanak keluarganya, mayoritas penduduk lansia masih harus bekerja keras dengan jam kerja yang penuh.

Gambar 6.5.1 Persentase Penduduk Lansia yang Bekerja menurut Tipe Daerah dan Jumlah Jam Kerja Selama Seminggu, Tahun 2004



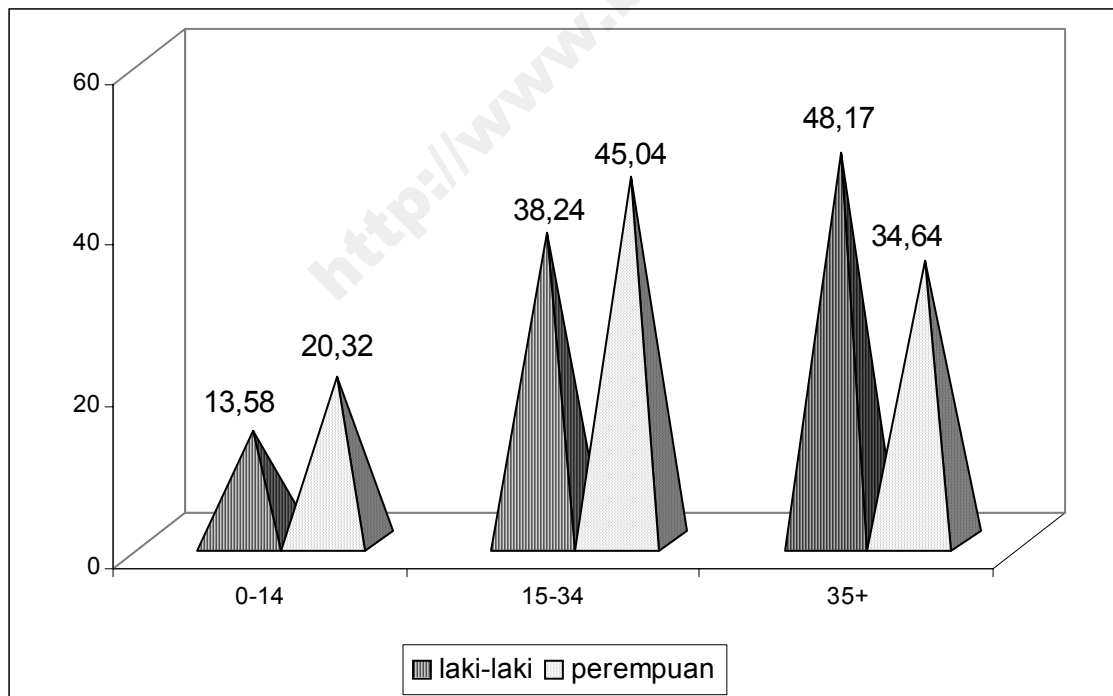
Sumber: BPS - Susenas 2004

Gambar 6.5.1 juga menunjukkan bahwa pola distribusi jumlah jam kerja untuk pekerja lansia secara keseluruhan juga terlihat baik di daerah perkotaan maupun

perdesaan. Dari gambar tersebut juga nampak bahwa jumlah kerja pekerja lansia di daerah perkotaan lebih lama dari mereka yang tinggal di daerah perdesaan. Penduduk lansia yang bekerja dengan jam kerja penuh di daerah perkotaan mencapai sebesar 55,2 persen, sedangkan persentase mereka di daerah perdesaan yang bekerja penuh hanya sebesar 39,0 persen. Sebaliknya, persentase pekerja lansia yang bekerja selama 0 – 14 dan 15 – 34 jam di daerah perdesaan sedikit lebih tinggi dari daerah perkotaan.

Tingkat produktivitas pekerja lansia laki-laki nampak cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan pekerja lansia perempuan. Gambar 6.5.2 menunjukkan bahwa, pekerja lansia laki-laki yang bekerja dengan jam kerja penuh mencapai sebesar 48,2 persen, sedangkan persentase tersebut untuk pekerja lansia perempuan hanya sebesar 34,6 persen. Sebaliknya, persentase pekerja lansia perempuan yang bekerja dengan jumlah jam kerja yang lebih pendek, cenderung sedikit lebih tinggi dari pekerja lansia laki-laki.

Gambar 6.5.2 Persentase Penduduk Lansia yang Bekerja menurut Jenis Kelamin dan Jumlah Jam Kerja, Tahun 2004



Sumber: BPS - Susenas 2004

Selain jumlah jam kerja yang cenderung lebih pendek, struktur jam kerja pekerja lansia perempuan juga berbeda dengan pekerja lansia laki-laki. Struktur jumlah jam kerja penduduk lansia laki-laki menunjukkan pola piramida terbalik, yaitu semakin tinggi jumlah jam kerja, maka persentase penduduk lansia laki-laki yang bekerja juga meningkat. Sementara itu, struktur jumlah jam kerja pada pekerja lansia perempuan nampak lebih berfluktuasi. Kondisi dan struktur jam kerja penduduk lansia secara nasional ini, baik untuk penduduk lansia laki-laki maupun perempuan juga merupakan kondisi dan struktur umum yang terlihat pada masing-masing propinsi, baik secara keseluruhan (lihat Tabel Lampiran 6.5.3), daerah perkotaan (lihat Tabel Lampiran 6.5.1) maupun daerah perdesaan (lihat Tabel Lampiran 6.5.2).

<http://www.bps.go.id>

BAB VII. KEGIATAN SOSIAL PENDUDUK LANSIA

Bila seseorang memasuki masa usia lanjut, maka dukungan sosial dari orang lain akan sangat berharga antara lain menambah ketentraman hidupnya. Namun demikian, adanya dukungan sosial tersebut tidaklah berarti bahwa seseorang yang telah memasuki masa lanjut usia hanya tinggal duduk, diam/tenang, tanpa melakukan aktivitas apapun. Bahkan pada usia lanjut seseorang dianjurkan masih tetap beraktivitas sesuai dengan kemampuannya agar ketahanan fisik dan mentalnya tetap terjaga secara prima. Umumnya lansia dapat melakukan aktifitas sosial yang secara fisik relatif ringan, tetapi sangat berguna bagi mental spiritual seseorang. Untuk melihat gambaran kegiatan sosial budaya penduduk lansia, berikut ini akan diuraikan gambaran mengenai kegiatan sosial lansia hasil Susenas 2003.

7.1. Akses Terhadap Media Massa

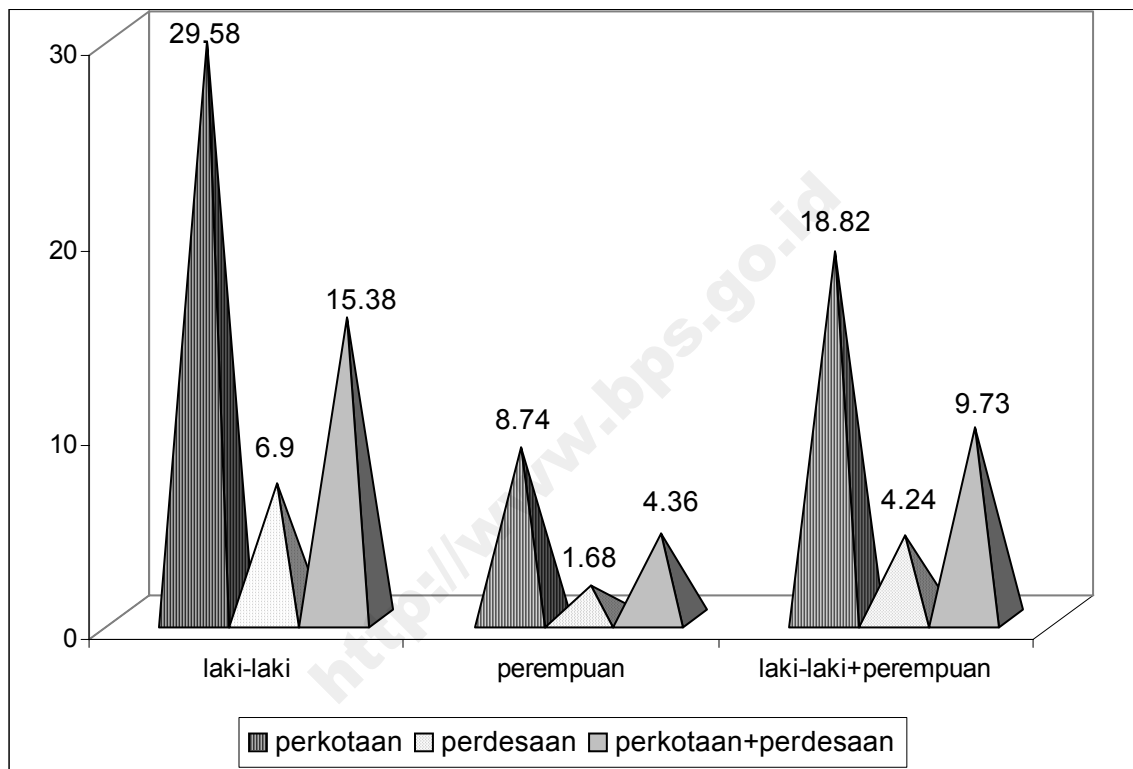
Pada masa lansia kesempatan untuk memperoleh informasi lebih leluasa karena waktu senggangnya relatif banyak. Umumnya pada masa ini, bekerja bukanlah hal yang utama bagi mereka. Lansia lebih banyak meluangkan waktunya untuk melaksanakan kegiatan sosial atau mengerjakan hobbinya. Untuk mengisi waktu luangnya, umumnya mereka membaca koran/majalah/buku sebagai penambah pengetahuan atau pengembangan hobbi mereka. Akses terhadap media massa antara lain untuk melihat seberapa banyak lansia yang melakukan kegiatan membaca, menonton TV, mendengarkan radio dan menonton pertunjukan kesenian.

7.1.1. Membaca Buku/Majalah/Surat Kabar

Secara umum minat baca buku/majalah/surat kabar para lansia masih sangat rendah. Dari seluruh populasi lansia, hanya sebesar 9,73 persen lansia yang melakukan kegiatan membaca buku/majalah/surat kabar. Gambar 6.1.1 menunjukkan bahwa lansia di daerah perkotaan cukup tinggi minat bacanya dibandingkan dengan rekannya di daerah perdesaan, dimana persentase lansia yang membaca buku/majalah/koran di daerah perkotaan hampir lima kali lipat lebih banyak dibanding persentase lansia di daerah perdesaan (18,82 % berbanding 4,24 %).

Gambar 7.1.1 juga menunjukkan bahwa persentase lansia perempuan lebih sedikit yang membaca buku/majalah/koran dibandingkan dengan lansia laki-laki. Persentase lansia perempuan yang membaca buku majalah/koran hanya sebesar 4,4 persen, sedangkan persentase lansia laki-laki dengan kegiatan yang sama hampir empat kali lipat atau sebesar 15,4 persen. Pola yang sama terjadi di daerah perkotaan maupun perdesaan.

Gambar 7.1.1 Persentase Penduduk Lansia yang Membaca Buku/Majalah/Surat Kabar Seminggu yang Lalu menurut Jenis Kelamin dan Tipe Daerah, 2003



Sumber: BPS-Susenas Modul 2003

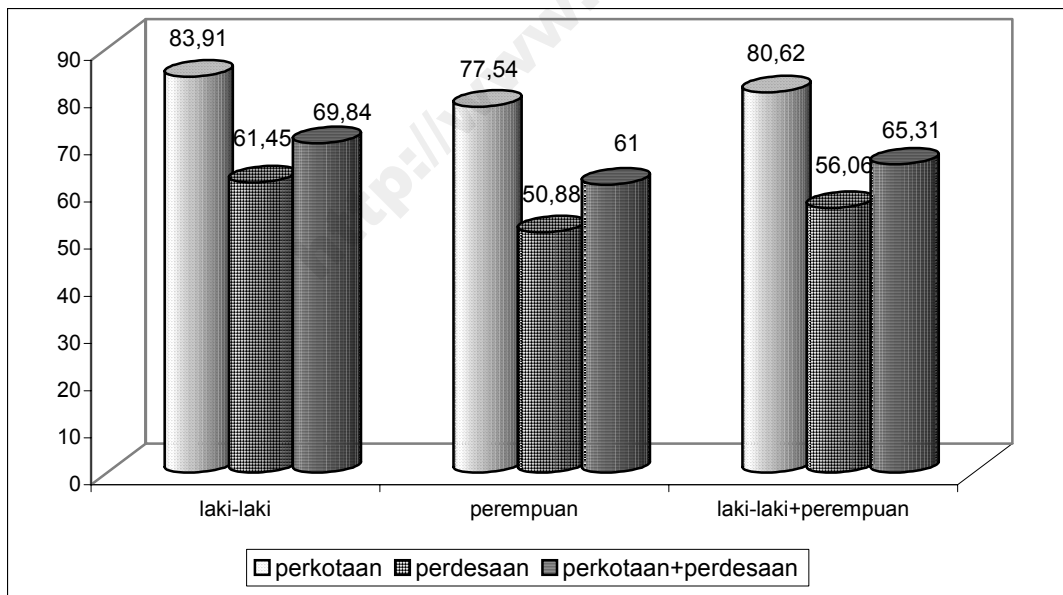
Tabel Lampiran 7.1.3 menunjukkan distribusi persentase lansia yang membaca buku/majalah/koran menurut propinsi, tipe daerah dan jenis kelamin. Pada umumnya lansia lebih menyukai membaca surat kabar dari pada membaca buku atau majalah, hal ini terjadi pada seluruh propinsi, kecuali untuk Propinsi Maluku dan Sulawesi Tenggara persentase lansia yang membaca buku lebih besar dari pada yang membaca surat kabar. Persentase lansia yang membaca surat kabar menurut propinsi, secara berturut-turut persentase tertinggi berada pada propinsi DKI Jakarta (39,5 persen), kemudian diikuti propinsi Sulawesi Utara (19,6 persen) dan Nanggroe Aceh Darussalam (15,6 persen).

Sebaliknya propinsi yang mempunyai persentase terendah secara berturut-turut adalah Maluku (3,4 persen), Sulawesi Tenggara (3,5 persen) dan Sulawesi Selatan (4,1 persen).

7.1.2. Menonton Televisi dan Pertunjukan Kesenian

Gambar 7.1.2 menunjukkan presentase penduduk lansia yang melakukan kegiatan menonton televisi seminggu yang lalu menurut jenis kelamin dan daerah tempat tinggal. Gambar tersebut memberikan gambaran bahwa separuh lebih penduduk lansia melakukan kegiatan menonton televisi. Persentase lansia laki-laki yang menonton televisi (69,8 persen) lebih besar dibandingkan dengan lansia perempuan (61,0 persen). Pola yang sama terjadi di daerah perkotaan maupun daerah perdesaan, baik lansia laki-laki maupun perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa televisi merupakan media audio visual yang sangat disukai oleh para lansia, baik laki-laki maupun perempuan yang tinggal di daerah perkotaan maupun perdesaan.

Gambar 7.1.2 Persentase Penduduk Lansia yang Menonton Televisi Seminggu yang Lalu menurut Jenis Kelamin dan Tipe Daerah, 2003



Sumber: BPS-Susenas Modul 2003

Gambar 7.1.2 juga menunjukkan bahwa kegiatan lansia menonton televisi seminggu yang lalu menurut jenis kelamin dan tipe daerah. Gambar tersebut memberikan gambaran adanya pola yang sama antara daerah perkotaan dan perdesaan. Satu hal yang

menarik dari gambaran tersebut adalah persentase lansia yang menonton televisi di daerah perkotaan lebih besar dibandingkan lansia yang diperdesaan.

Tabel Lampiran 7.2 menunjukkan gambaran mengenai lansia yang menonton televisi menurut propinsi, tipe daerah dan jenis kelamin. Dari gambaran tersebut dapat dilihat bahwa minat lansia untuk menonton televisi antar propinsi persentasenya sangat bervariasi, yaitu berkisar antara 16,1 – 92,2 persen. Persentase tertinggi secara berturut-turut dapat ditemukan di propinsi DKI Jakarta (92,2 persen), Bangka Belitung (74,9 persen) dan Sulawesi Utara (74,0 persen). Sebaliknya persentase terendah lansia yang menonton televisi berada pada propinsi Nusa Tenggara Timur (16,1 persen), Papua (33,8 persen) dan Sulawesi Tenggara (35,5 persen).

Tabel 7.1.1 Persentase Penduduk Lansia yang Menonton Pertunjukan Kesenian menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Jenis Pertunjukkan Kesenian yang Ditonton, 2003

Tipe Daerah/Jenis kelamin	Jenis Pertunjukkan Kesenian		
	Tari/joget	Musik/suara	Drama/pedalangan
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan			
Laki-laki	6,54	8,38	5,43
Perempuan	4,79	5,34	3,13
Laki-laki+Perempuan	5,64	6,81	4,25
Perdesaan			
Laki-laki	4,69	6,27	3,03
Perempuan	3,07	4,06	1,71
Laki-laki+Perempuan	3,86	5,14	2,36
Perkotaan+Perdesaan			
Laki-laki	5,38	7,06	3,93
Perempuan	3,72	4,54	2,25
Laki-laki+Perempuan	4,53	5,77	3,07

Sumber: BPS-Susenas Modul 2003

Berbeda dengan minat lansia untuk menonton televisi yang relatif cukup besar, minat penduduk lansia untuk menonton pertunjukan kesenian seperti tari, musik maupun drama masih sangat rendah. Hasil Susenas 2003 menunjukkan bahwa hanya sekitar 3 - 7

persen penduduk lansia yang melakukan kegiatan menonton pertunjukan kesenian. Dari ketiga jenis pertunjukan kesenian yang digemari lansia, seni musik merupakan jenis kesenian yang paling digemari oleh para lansia dibandingkan dengan jenis kesenian lainnya, kemudian diikuti dengan jenis kesenian tari/joget dan jenis kesenian sandiwara. Walaupun demikian perbedaan persentase pada ke tiga jenis kesenian yang digemari lansia tersebut tidak cukup signifikan. Bila dilihat menurut jenis kelamin, persentase lansia laki-laki lebih tinggi dibanding lansia perempuan untuk ketiga jenis pertunjukan kesenian.

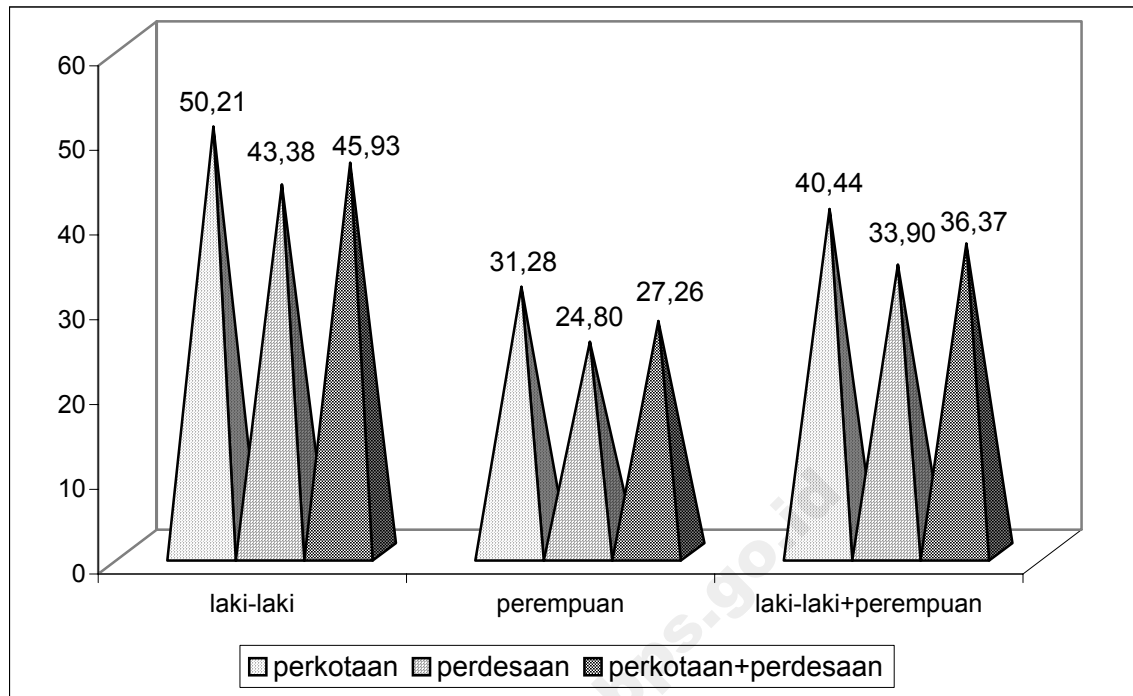
Pola yang sama terjadi baik dilihat menurut perbedaan jenis kelamin maupun daerah tempat tinggal. Artinya pola yang sama terjadi baik di daerah perkotaan maupun daerah perdesaan, baik untuk lansia laki-laki maupun perempuan. Berarti pula terdapat preferensi yang sama antara penduduk lansia laki-laki maupun perempuan, baik yang tinggal di daerah perkotaan maupun perdesaan.

7.1.3. Mendengarkan Radio

Gambar 7.1.3 memperlihatkan bahwa lebih dari sepertiga penduduk lansia yang mendengarkan radio selama seminggu yang lalu. Secara umum lansia laki-laki lebih berminat untuk mendengarkan radio dibandingkan dengan lansia perempuan. Pola seperti ini terjadi di daerah perkotaan maupun daerah perdesaan. Sebagai ilustrasi, lansia laki-laki yang melakukan kegiatan mendengarkan radio ada sebesar 45,93 persen dan lansia perempuan sebesar 27,27 persen untuk kegiatan yang sama.

Tabel Lampiran 7.3 memberikan gambaran mengenai lansia yang mendengarkan radio menurut propinsi, tipe daerah dan jenis kelamin. Persentase lansia yang mendengarkan radio menurut propinsi cukup bervariasi antara 15,1 – 60,1 persen. Persentase tertinggi secara berturut-turut berada pada propinsi DI. Yogyakarta (60,1 persen), DKI Jakarta (54,5 persen) dan Kalimantan Tengah (49,1 persen). Sebaliknya persentase terendah secara berturut-turut berada pada propinsi Nusa Tenggara Timur (15,1 persen), Nanggroe Aceh Darussalam (18,8 persen) dan Sulawesi Tenggara (19,7 persen).

Gambar 7.1.3 Persentase Penduduk Lansia yang Mendengarkan Radio Seminggu yang Lalu menurut Jenis Kelamin dan Tipe Daerah, 2003

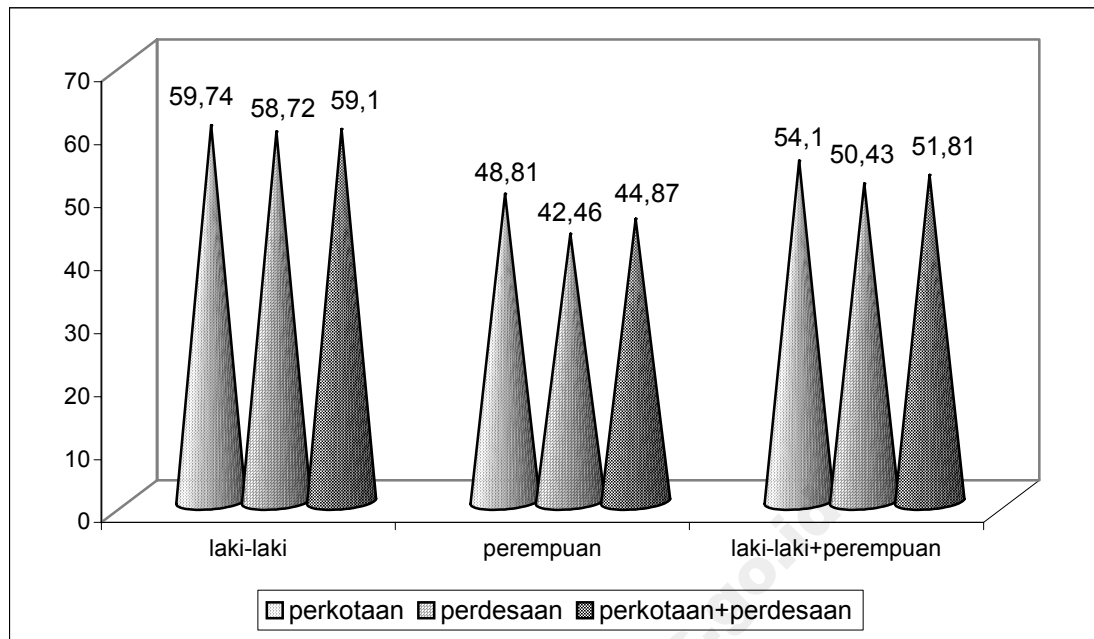


Sumber: BPS-Susenas Modul 2003

7.2. Partisipasi Dalam Kegiatan Organisasi Sosial

Gambar 7.2.1 menyajikan partisipasi penduduk lansia dalam kegiatan organisasi sosial selama 3 bulan yang lalu menurut jenis kelamin dan tipe daerah. Dari gambar tersebut terlihat bahwa lebih dari separuh penduduk lansia mengikuti kegiatan organisasi sosial. Bila dilihat menurut jenis kelamin, partisipasi penduduk lansia laki-laki lebih tinggi dibanding dengan lansia perempuan (59,1 persen berbanding 44,9 persen). Pola yang sama terjadi baik di daerah perkotaan maupun perdesaan.

Gambar 7.2.1 Persentase Penduduk Lansia yang Mengikuti Kegiatan Organisasi Sosial 3 Bulan yang Lalu menurut Jenis Kelamin dan Tipe Daerah, 2003



Sumber: BPS-Susenas Modul 2003

Tabel 7.2.1 menyajikan persentase lansia yang menjadi anggota organisasi menurut jenis organisasi, jenis kelamin dan tipe daerah. Sepertiga lebih (34,58 persen) penduduk lansia menjadi anggota organisasi keagamaan. Bila dilihat perbedaan menurut jenis kelamin untuk partisipasi dalam organisasi keagamaan, persentase lansia laki-laki lebih besar dibanding lansia perempuan (39,5 persen berbanding 29,9 persen). Minat yang cukup tinggi para lansia pada organisasi keagamaan ini kemungkinan karena kondisi sekarang lebih memungkinkan mereka untuk mengisi kehidupan rohaninya.

Pada tabel tersebut juga menunjukkan bahwa organisasi keagamaan, kematian dan arisan merupakan organisasi yang paling diminati oleh lansia, baik di daerah perkotaan maupun di perdesaan. Persentase lansia yang mengikuti organisasi di perkotaan secara berturut-turut adalah organisasi keagamaan (36,8 persen), kematian (26,1persen) dan arisan (18,1 persen), sementara untuk daerah perdesaan minat lansia pada ketiga organisasi tersebut mempunyai pola yang sama dan secara berturut-turut persentasenya adalah 33,2 persen, 27,8 persen dan 13,0 persen. Organisasi lainnya termasuk di dalamnya kesenian dan olah raga. Minat dalam memilih organisasi yang disukai juga nampak berbeda antara lansia laki-laki dan lansia perempuan. Tabel 7.2.1 menunjukkan

bahwa jenis organisasi keagamaan dan kematian menjadi pilihan utama untuk lansia laki-laki dan perempuan. Umumnya partisipasi mengikuti organisasi untuk beberapa jenis organisasi bagi lansia laki-laki lebih tinggi dibanding lansia perempuan, kecuali untuk kegiatan arisan persentase lansia perempuan lebih tinggi dibanding lansia laki-laki (15,7 persen berbanding 14,2 persen).

Tabel 7.2.1 Persentase Lansia yang Menjadi Anggota Organisasi Tiga Bulan yang Lalu Menurut Jenis Organisasi, Jenis kelamin dan Tipe Daerah, 2003.

Jenis Organisasi	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan+Perdesaan		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Keagamaan	40,16	33,76	36,86	39,14	27,51	33,21	39,52	29,88	34,58
Arisan	16,02	20,07	18,11	13,07	13,00	13,04	14,17	15,68	14,95
Sosial	16,58	10,07	13,22	14,94	8,62	11,72	15,55	9,17	12,28
Kematian	32,04	20,55	26,11	34,11	21,69	27,78	33,34	21,26	27,15
Lainnya	13,72	7,12	13,41	11,17	10,79	10,97	7,49	11,67	11,90

Sumber: BPS-Susenas Modul 2003

Tabel Lampiran 7.4.3 menunjukkan persentase lansia yang menjadi anggota organisasi menurut propinsi dan jenis organisasi. Persentase lansia yang menjadi anggota organisasi keagamaan menurut propinsi cukup bervariasi antara 21,3 – 50,5 persen. Persentase tertinggi secara berturut-turut berada pada propinsi Bali (50,5 persen), DKI Jakarta (44,5 persen) dan Sumatera Selatan (43,8 persen). Sebaliknya persentase terendah secara berturut-turut berada pada propinsi Maluku (21,3 persen), Sulawesi Tengah (24,1 persen) dan NTT (25,9 persen).

BAB VIII. PENDUDUK LANSIA TERLANTAR

Meningkatnya jumlah penduduk lansia dari waktu ke waktu cenderung akan menimbulkan masalah. Permasalahan yang mungkin akan muncul adalah meningkatnya beban ketergantungan penduduk usia non produktif terhadap usia produktif. Berkurangnya kemampuan dalam mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan hidup akan membuat mereka semakin tergantung pada pihak lain. Departemen Sosial mengidentifikasi beberapa permasalahan lainnya yang mungkin akan timbul seperti jumlah penduduk lanjut usia yang berada di bawah garis kemiskinan tetap besar. Demikian pula berkurangnya perhatian anggota keluarga lain karena perubahan budaya, sehingga para lansia menjadi tersisih dan terlantar.

Seperti halnya permasalahan sosial yang lain, persoalan para lansia yang terlantar juga membutuhkan perhatian masyarakat dan pemerintah. Sesuai dengan UU No 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, program pemerintah dalam penanganan terhadap penduduk lansia lebih menekankan pemberian santunan kepada mereka yang terlantar. Namun, saat ini kebijakan tersebut mempunyai sasaran yang lebih luas dengan memberikan dorongan untuk memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan lansia kepada keluarga dan masyarakat agar dapat mendukung terwujudnya lansia yang berguna, berkualitas dan mandiri (Jutaan lansia butuh pelayanan sosial; Suara Karya, 27 April 2004).

8.1. Distribusi Lansia Terlantar

Secara absolut jumlah penduduk lansia di Indonesia tahun 2003 ada sekitar 16,2 juta jiwa, 15,0 persen diantaranya termasuk kategori lansia terlantar, 56,2 persen termasuk kategori lansia tidak terlantar, dan sisanya 28,8 persen termasuk kategori lansia rawan terlantar yaitu lansia yang berpotensi untuk menjadi lansia terlantar (Tabel 8.1.1). Menurut tipe daerahnya, sekitar 18,8 persen lansia di daerah perdesaan termasuk kategori lansia terlantar, 32,8 persen termasuk kategori lansia rawan terlantar dan 48,4 persen termasuk kategori lansia tidak terlantar. Sedangkan untuk lansia yang tinggal di daerah perkotaan 8,7 persen diantaranya termasuk kategori terlantar, 22,1 persen termasuk kategori lansia rawan terlantar, dan 69,2 termasuk kategori lansia tidak terlantar.

Tabel 8.1.1. Jumlah (dalam ribuan) dan Persentase Penduduk Lansia menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Kategori Keterlantaran, Tahun 2003

Tipe Daerah/Jenis Kelamin	Tidak Terlantar		Rawan Terlantar		Terlantar		Total	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Perkotaan								
Laki-laki	2.032,25	68,93	646,77	21,94	269,12	9,13	2.948,14	100,0
Perempuan	2.182,60	69,41	702,81	22,35	259,07	8,24	3.144,49	100,0
Laki-laki + Perempuan	4.214,85	69,18	1.349,58	22,15	528,19	8,67	6.092,62	100,0
Perdesaan								
Laki-laki	2.312,44	46,82	1.638,22	33,17	988,08	20,01	4.938,73	100,0
Perempuan	2.561,07	49,81	1.670,48	32,49	909,92	17,70	5.141,48	100,0
Laki-laki + Perempuan	4.873,51	48,35	3.308,70	32,82	1.898,00	18,83	10.080,21	100,0
Perkotaan+Perdesaan								
Laki-laki	4.344,68	55,09	2.284,99	28,97	1.257,20	15,94	7.886,87	100,0
Perempuan	4.743,68	57,25	2.373,29	28,64	1.168,99	14,11	8.285,97	100,0
Laki-laki + Perempuan	9.088,36	56,20	4.658,28	28,80	2.426,19	15,00	16.172,84	100,0

Sumber: BPS- Modul Sosial Budaya, Susenas 2003

Gambaran tersebut di atas dapat memberikan indikasi bahwa lansia yang tinggal di daerah perkotaan kondisinya lebih baik bila dibandingkan dengan lansia yang tinggal di daerah perdesaan. Indikasi tersebut tercermin dari tingginya persentase lansia di daerah perkotaan yang tidak terlantar bila dibandingkan dengan lansia di daerah perdesaan. Selain itu, persentase lansia rawan terlantar dan lansia terlantar di daerah perkotaan jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan persentase lansia dengan kategori yang sama di daerah perdesaan.

Bila dibedakan menurut jenis kelamin, seperti yang terlihat pada Tabel 8.1.1 persentase lansia laki-laki terlantar lebih tinggi dibanding lansia perempuan terlantar (15,9 persen berbanding 14,1 persen). Kondisi tersebut terutama terlihat di daerah perdesaan.

Tabel Lampiran 8.1.3 memberikan gambaran mengenai lansia menurut propinsi dan kategori keterlantaran. Salah satu kategori keterlantaran tersebut menunjukkan gambaran mengenai persentase lansia terlantar menurut propinsi yang sangat bervariasi

antara 5,0 – 48,1 persen. Persentase tertinggi lansia terlantar secara berturut-turut berada pada propinsi Nusa Tenggara Timur (48,1 persen), kemudian diikuti propinsi Nusa Tenggara Barat (37,5 persen) dan Papua (27,8 persen). Sebaliknya persentase terendah secara berturut-turut berada pada propinsi Bangka Belitung (5,0 persen), DKI Jakarta (6,7 persen) dan Banten (8,2 persen).

8.2. Hubungan Karakteristik Rumah Tangga dengan Keterlantaran Lansia

Menurut Dirjen Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Depsos, Sri Pudji Hastuti, “Kemiskinan dan kecacatan merupakan faktor terbesar lansia menjadi terlantar” (Suara Karya, 27 April 2004). Sejalan dengan pernyataan di atas, keterlantaran lansia dapat dilihat dari status ekonomi rumah tangga.

Tabel 8.2.1. Banyaknya dan Persentase Penduduk Lansia menurut Status Ekonomi Rumah Tangga dan Kategori Keterlantaran Lansia, Tahun 2003

Status Ekonomi Rumah Tangga	Kategori Keterlantaran Lansia			Total
	Tidak terlantar	Rawan terlantar	Terlantar	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
40 % Rendah	3.283.522 (48,18)	2.136.700 (31,35)	1.394.704 (20,47)	6.814.926 (100,00)
40 % Menengah	3.783.161 (59,28)	1.820.082 (28,52)	778.604 (12,20)	6.381.847 (100,00)
20 % Tinggi	2.021.682 (67,93)	701.497 (23,57)	252.883 (8,50)	2.976.062 (100,00)
Total	9.088.365 (56,20)	4.658.279 (28,80)	2.426.191 (15,00)	16.172.835 (100,00)

Sumber: BPS-Modul Sosial Budaya, Susenas 2003

Tabel 8.2.1 memperlihatkan pola hubungan antara status ekonomi rumah tangga dengan keterlantaran lansia yaitu semakin tinggi status ekonomi rumah tangga, jumlah lansia yang rawan terlantar maupun lansia terlantar semakin menurun. Seperti yang terlihat pada tabel tersebut, proporsi jumlah lansia terlantar pada kelompok 20 persen rumah tangga berpengeluaran tinggi hanya sebanyak 8,5 persen. Proporsi lansia terlantar untuk kelompok 40 persen rumah tangga berpengeluaran menengah dan kelompok 40

persen berpengeluaran rendah mencapai sebesar 12,2 persen dan 20,5 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa kelompok rumah tangga berpendapatan rendah lebih berpotensi untuk membentuk lansia terlantar dibandingkan dengan mereka yang berpendapatan lebih tinggi. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa status ekonomi rumah tangga merupakan salah satu variabel yang valid untuk digunakan sebagai salah satu ciri dalam mengidentifikasi rumah tangga lansia terlantar.

<http://www.bps.go.id>

Penduduk Lanjut Usia di Panti Jompo (Kunjungan serta wawancara dengan penghuni/warga panti werdha)

Keberadaan lansia di panti jompo disebabkan berbagai alasan, antara lain tidak mempunyai keluarga lagi, atas kemauan sendiri dan ada juga yang dianjurkan oleh keluarga. Hasil wawancara dari beberapa orang penghuni panti beralasan tinggal di panti jompo karena kemauan sendiri dan atas anjuran dari keluarga walaupun mereka masih mempunyai keluarga, baik anak maupun cucu.

Tinggal di panti atas kemauan sendiri alasannya karena tidak ingin merepotkan anak maupun cucu. Di panti, lansia bisa berkumpul serta berbincang-bincang dengan teman-teman sebaya, tidak terikat waktu atau rutinitas, dapat beristirahat dengan santai, dapat melakukan pekerjaan yang disenangi atau hobbi, serta merasa bebas melakukan kegiatan apa saja.

Mereka yang telah merasakan tinggal di panti tidak mau atau enggan untuk kembali tinggal di rumah anak/cucu/famili. Umumnya jika tinggal di rumah anak/cucu/famili akan kesepian pula, karena tidak mempunyai teman sementara penghuni rumah juga sibuk beraktifitas di luar rumah. Hal ini terjadi pada beberapa penghuni yang pertama masuk ke panti karena dianjurkan oleh keluarga dan ada keengganan serta perasaan terbuang ketika dianjurkan untuk menjadi salah satu warga panti. Namun setelah menjadi warga panti dan menjalani kegiatan di panti mereka merasa senang dan tidak mau dan bahkan enggan untuk keluar dari panti. Kerinduan pada keluarga dapat diobati dengan cara menelpon atau mengunjungi anak/cucu/famili serta pergi menginap di rumah anak/cucu/famili atau meminta sanak saudara untuk hadir/ berkunjung ke panti secara bergantian.

Kegiatan sehari - hari penghuni panti diisi dengan melakukan olahraga, pengajian, menonton TV, dan berkumpul sambil bercanda bersama teman- teman. Selama di panti ini tidak ada kegiatan yang menghasilkan atau membantu menambah penghasilan. Meskipun begitu, untuk mereka yang berminat ada kegiatan seperti menyulam dll. Kegiatan rekreasi juga ada meskipun tidak rutin. Tinggal di panti membutuhkan biaya, penghuni panti membayar biaya tersebut dari berbagai sumber seperti kiriman dari keluarga (anak/cucu) atau uang sendiri dari uang pensiun.

Penghuni di panti ini sering kali menerima bantuan dari perorangan, organisasi/ lembaga seperti makanan, bahan-bahan baju, dan kain. Untuk bantuan berupa uang tidak dibagikan kepada penghuni panti akan tetapi dikelola oleh yayasan. Penghuni panti juga mendapat fasilitas pengobatan yang cukup dengan tersedianya poliklinik (ada dokter jaga setiap hari dan perawat), obat-obatan untuk sakit ringan juga disediakan di klinik Warga panti yang perlu perawatan dapat dirawat langsung di Poliklinik tersebut. Untuk yang menderita sakit parah akan dirujuk ke rumah sakit terdekat (bagi yang kurang mampu akan dibantu yayasan).

Saat ini responden telah merasa bahagia dengan apa yang telah di lalunya.

Para lansia sangat menikmati kehidupan di panti ini dan harapan untuk masa yang akan datang tetap dapat menikmati hari tua ini dengan tenang dan damai bersama teman-teman sebaya di panti .

<http://www.bps.go.id>

Tabel 3.1. Banyaknya dan Persentase Penduduk Lansia menurut Propinsi dan Jenis Kelamin, 2004

Propinsi	Jumlah			Persentase		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nanggroe Aceh Darusalam	118.917	129.986	248.903	47,78	52,22	100,00
Sumatera Utara	334.238	376.025	710.263	47,06	52,94	100,00
Sumatera Barat	171.116	228.079	399.195	42,87	57,13	100,00
R i a u	119.091	98.089	217.180	54,84	45,16	100,00
J a m b i	75.465	67.537	143.002	52,77	47,23	100,00
Sumatera Selatan	191.292	185.757	377.049	50,73	49,27	100,00
Bengkulu	41.832	38.625	80.457	51,99	48,01	100,00
Lampung	260.815	224.853	485.668	53,70	46,30	100,00
Bangka Belitung	31.897	33.504	65.401	48,77	51,23	100,00
DKI Jakarta	238063	225.281	463.344	51,38	48,62	100,00
Jawa Barat	1.360.895	1.383.300	2.744.195	49,59	50,41	100,00
Jawa Tengah	1.492.653	1.772.418	3.265.071	45,72	54,28	100,00
DI Yogyakarta	205.451	246.703	452.154	45,44	54,56	100,00
Jawa Timur	1.650.783	2.076.217	3.727.000	44,29	55,71	100,00
Banten	200.154	196.605	396.759	50,45	49,55	100,00
B a l i	162.741	173.675	336.416	48,37	51,63	100,00
Nusa Tenggara Barat	135.407	149.793	285.200	47,48	52,52	100,00
Nusa Tenggara Timur	145.576	150.842	296.418	49,11	50,89	100,00
Kalimantan Barat	108.807	101.380	210.187	51,77	48,23	100,00
Kalimantan Tengah	45.416	37.123	82.539	55,02	44,98	100,00
Kalimantan Selatan	83.062	97.411	180.473	46,02	53,98	100,00
Kalimantan Timur	57.002	47.646	104.648	54,47	45,53	100,00
Sulawesi Utara	82.266	89.508	171.774	47,89	52,11	100,00
Sulawesi Tengah	62.071	53.571	115.642	53,68	46,32	100,00
Sulawesi Selatan	298.161	351.982	650.143	45,86	54,14	100,00
Sulawesi Tenggara	52.499	51.048	103.547	50,70	49,30	100,00
Gorontalo	20.929	24.330	45.259	46,24	53,76	100,00
Maluku	36.225	36.378	72.603	49,89	50,11	100,00
Maluku Utara	23.041	21.494	44.535	51,74	48,26	100,00
Papua	29.224	18.062	47.286	61,80	38,20	100,00
INDONESIA	7.835.089	8.687.222	16.522.311	47,42	52,58	100,00

Sumber : BPS - Susenas 2004

Tabel 3.2. Banyaknya dan Persentase Penduduk Lansia menurut Propinsi dan Tipe Daerah, 2004

Propinsi	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan+Perdesaan	
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nanggroe Aceh Darusalam	58.126	23,35	190.777	76,65	248.903	100,00
Sumatera Utara	272.182	38,32	438.081	61,68	710.263	100,00
Sumatera Barat	100.295	25,12	298.900	74,88	399.195	100,00
R i a u	80.561	37,09	136.619	62,91	217.180	100,00
J a m b i	40.021	27,99	102.981	72,01	143.002	100,00
Sumatera Selatan	120.222	31,88	256.827	68,12	377.049	100,00
Bengkulu	19.004	23,62	61.453	76,38	80.457	100,00
Lampung	90.051	18,54	395.617	81,46	485.668	100,00
Bangka Belitung	30.026	45,91	35.375	54,09	65.401	100,00
DKI Jakarta	463344	100,00	-	-	463.344	100,00
Jawa Barat	1.195.594	43,57	1.548.601	56,43	2.744.195	100,00
Jawa Tengah	1.261.840	38,65	2.003.231	61,35	3.265.071	100,00
DI Yogyakarta	226.450	50,08	225.704	49,92	452.154	100,00
Jawa Timur	1.399.864	37,56	2.327.136	62,44	3.727.000	100,00
Banten	178.442	44,97	218.317	55,03	396.759	100,00
B a l i	136.451	40,56	199.965	59,44	336.416	100,00
Nusa Tenggara Barat	110.387	38,71	174.813	61,29	285.200	100,00
Nusa Tenggara Timur	31.553	10,64	264.865	89,36	296.418	100,00
Kalimantan Barat	67.235	31,99	142.952	68,01	210.187	100,00
Kalimantan Tengah	19.587	23,73	62.952	76,27	82.539	100,00
Kalimantan Selatan	62.802	34,80	117.671	65,20	180.473	100,00
Kalimantan Timur	48.573	46,42	56.075	53,58	104.648	100,00
Sulawesi Utara	65.388	38,07	106.386	61,93	171.774	100,00
Sulawesi Tengah	17.351	15,00	98.291	85,00	115.642	100,00
Sulawesi Selatan	163.135	25,09	487.008	74,91	650.143	100,00
Sulawesi Tenggara	17.680	17,07	85.867	82,93	103.547	100,00
Gorontalo	10.830	23,93	34.429	76,07	45.259	100,00
Maluku	16.833	23,18	55.770	76,82	72.603	100,00
Maluku Utara	11.001	24,70	33.534	75,30	44.535	100,00
Papua	14.081	29,78	33.205	70,22	47.286	100,00
INDONESIA	6.328.909	38,31	10.193.402	61,69	16.522.311	100,00

Sumber : BPS - Susenas 2004

Tabel 3.3. Persentase Penduduk Lansia menurut Propinsi dan Status Perkawinan, 2004

Propinsi	Status Kawin				Jumlah
	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nanggroe Aceh Darusalam	0,27	57,81	1,59	40,33	100,00
Sumatera Utara	0,54	62,78	1,27	35,41	100,00
Sumatera Barat	0,43	55,97	4,24	39,35	100,00
R i a u	0,51	66,83	2,45	30,21	100,00
J a m b i	0,48	64,55	1,37	33,60	100,00
Sumatera Selatan	0,60	64,83	0,68	33,89	100,00
Bengkulu	-	63,38	1,60	35,02	100,00
Lampung	0,18	68,46	1,97	29,39	100,00
Bangka Belitung	1,56	59,62	3,98	34,85	100,00
DKI Jakarta	0,70	66,38	1,55	31,37	100,00
Jawa Barat	0,19	65,90	1,74	32,16	100,00
Jawa Tengah	0,47	60,16	2,22	37,14	100,00
DI Yogyakarta	1,37	64,02	1,46	33,15	100,00
Jawa Timur	0,66	56,32	2,44	40,58	100,00
Banten	0,07	62,29	1,59	36,04	100,00
B a l i	3,53	65,18	1,59	29,70	100,00
Nusa Tenggara Barat	1,31	61,91	3,84	32,94	100,00
Nusa Tenggara Timur	3,51	60,76	1,55	34,18	100,00
Kalimantan Barat	1,24	61,37	1,42	35,97	100,00
Kalimantan Tengah	0,85	63,39	2,90	32,86	100,00
Kalimantan Selatan	0,72	54,78	3,26	41,24	100,00
Kalimantan Timur	1,32	65,39	2,32	30,97	100,00
Sulawesi Utara	2,65	64,07	1,25	32,02	100,00
Sulawesi Tengah	1,23	62,70	2,14	33,93	100,00
Sulawesi Selatan	2,29	58,12	3,09	36,50	100,00
Sulawesi Tenggara	0,71	64,38	2,94	31,97	100,00
Gorontalo	1,70	58,74	3,65	35,91	100,00
Maluku	1,00	63,16	1,67	34,17	100,00
Maluku Utara	0,37	63,79	3,84	32,01	100,00
Papua	1,10	65,21	1,34	32,35	100,00
INDONESIA	0,74	61,23	2,13	35,89	100,00

Sumber : BPS - Susenas 2004

Tabel 3.4. Persentase Penduduk Lansia menurut Propinsi dan Hubungan dengan Kepala Rumah Tangga, 2004

Propinsi	Hubungan dengan Kepala Rumah Tangga				
	Istri/Suami	Orangtua	Mertua	Lainnya	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nanggroe Aceh Darusalam	45,36	49,99	3,65	1,00	100,00
Sumatera Utara	55,95	40,28	3,29	0,48	100,00
Sumatera Barat	41,81	52,60	4,84	0,75	100,00
R i a u	40,92	54,59	3,70	0,79	100,00
J a m b i	50,01	44,63	4,37	0,99	100,00
Sumatera Selatan	44,56	51,23	3,23	0,98	100,00
Bengkulu	42,25	55,24	1,92	0,59	100,00
Lampung	48,43	48,41	2,20	0,96	100,00
Bangka Belitung	44,93	50,92	4,15	0,00	100,00
DKI Jakarta	57,31	36,17	4,26	2,26	100,00
Jawa Barat	54,05	42,02	3,37	0,56	100,00
Jawa Tengah	44,99	49,10	5,02	0,89	100,00
DI Yogyakarta	53,71	38,10	6,75	1,44	100,00
Jawa Timur	36,90	53,06	8,70	1,34	100,00
Banten	47,85	48,57	3,58	0,00	100,00
B a l i	30,77	58,39	9,47	1,37	100,00
Nusa Tenggara Barat	48,44	43,17	7,39	1,00	100,00
Nusa Tenggara Timur	36,90	50,62	11,51	0,97	100,00
Kalimantan Barat	34,04	58,73	5,74	1,49	100,00
Kalimantan Tengah	39,97	55,02	3,73	1,28	100,00
Kalimantan Selatan	37,38	52,75	9,27	0,60	100,00
Kalimantan Timur	40,72	51,41	7,46	0,41	100,00
Sulawesi Utara	51,28	41,14	6,28	1,30	100,00
Sulawesi Tengah	41,21	51,68	5,90	1,21	100,00
Sulawesi Selatan	40,77	48,41	9,71	1,11	100,00
Sulawesi Tenggara	42,71	51,23	4,89	1,17	100,00
Gorontalo	44,91	48,65	6,44	0,00	100,00
Maluku	39,75	50,50	8,77	0,98	100,00
Maluku Utara	43,52	48,40	8,09	0,00	100,00
Papua	40,45	47,00	12,31	0,24	100,00
INDONESIA	44,41	48,56	6,04	0,99	100,00

Sumber : BPS - Susenas 2004

Tabel 4.1. Persentase Penduduk Lansia yang Buta Huruf menurut Propinsi, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2004

Propinsi	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan+Perdesaan		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Nanggroe Aceh Darusalam	6,90	20,23	13,71	14,93	32,92	24,39	13,01	30,03	21,90
Sumatera Utara	3,17	19,05	11,92	13,46	34,67	24,40	9,70	28,44	19,62
Sumatera Barat	3,15	7,06	5,45	11,10	29,96	21,77	9,18	24,03	17,67
R i a u	6,31	18,44	12,12	17,84	33,08	24,48	13,78	27,32	19,89
J a m b i	3,80	25,15	14,32	13,73	43,16	27,39	11,06	37,90	23,73
Sumatera Selatan	4,14	19,40	12,38	17,07	41,89	28,75	13,33	34,03	23,53
Bengkulu	10,31	29,86	19,76	22,62	55,06	38,16	19,73	49,07	33,81
Lampung	18,80	37,62	27,84	23,90	56,45	38,84	22,99	52,82	36,80
Bangka Belitung	14,08	33,33	24,25	15,24	56,00	35,56	14,72	45,27	30,37
DKI Jakarta	6,47	17,90	12,03				6,47	17,90	12,03
Jawa Barat	12,27	31,58	22,12	23,21	47,34	35,26	18,50	40,39	29,54
Jawa Tengah	25,26	60,36	44,63	39,23	72,95	57,34	33,94	68,00	52,43
DI Yogyakarta	25,10	59,38	43,78	45,37	81,73	65,23	35,20	70,55	54,49
Jawa Timur	20,24	52,19	38,17	43,71	77,84	62,64	34,98	68,13	53,45
Banten	18,70	40,21	28,73	26,75	56,57	42,24	22,92	49,65	36,16
B a l i	29,69	62,26	46,42	43,62	75,12	59,94	37,94	69,94	54,46
Nusa Tenggara Barat	35,73	74,52	56,37	54,25	85,32	70,43	47,19	81,08	64,99
Nusa Tenggara Timur	6,32	38,23	23,27	45,49	68,28	57,03	41,51	64,94	53,43
Kalimantan Barat	21,64	61,56	42,71	38,52	77,68	56,57	33,60	72,04	52,14
Kalimantan Tengah	7,43	20,79	13,52	22,88	38,77	30,00	19,26	34,45	26,09
Kalimantan Selatan	4,00	19,14	12,47	20,54	46,41	34,23	15,03	36,58	26,66
Kalimantan Timur	7,96	34,41	20,45	29,19	56,17	41,08	19,64	45,69	31,50
Sulawesi Utara	1,90	3,21	2,61	2,05	4,29	3,19	2,00	3,86	2,97
Sulawesi Tengah	4,33	23,04	13,79	19,08	42,02	29,54	17,04	38,91	27,17
Sulawesi Selatan	17,31	40,95	30,43	48,47	70,55	60,32	40,88	62,94	52,82
Sulawesi Tenggara	9,99	31,58	20,77	34,30	71,64	52,66	30,20	64,71	47,21
Gorontalo	9,94	5,86	7,76	21,81	23,16	22,54	18,96	19,04	19,00
Maluku	7,37	18,01	13,13	5,36	21,73	13,36	5,79	20,80	13,31
Maluku Utara	4,80	25,09	14,84	14,39	41,93	27,57	12,07	37,67	24,43
Papua	3,28	20,76	10,13	48,71	70,13	56,80	35,40	55,04	42,90
INDONESIA	16,52	42,63	30,43	32,63	62,37	48,14	26,55	54,71	41,36

Sumber : BPS - Susenas 2004

Tabel 4.2. Persentase Penduduk Lansia yang Buta Huruf menurut Propinsi, Tipe Daerah dan Golongan Ekonomi Rumah Tangga, Tahun 2004

Propinsi	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan + Perdesaan		
	40 % bawah	40 % tengah	20 % atas	40 % bawah	40 % tengah	20 % atas	40 % bawah	40 % tengah	20 % atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Nanggroe Aceh Darusalam	24,68	12,91	8,81	28,23	22,1	17,14	27,80	20,19	12,25
Sumatera Utara	20,55	12,8	6,08	29,40	23,41	13,76	27,32	19,5	8,95
Sumatera Barat	11,20	4,52	3,98	26,02	20,65	15,38	23,98	16,79	10,23
R i a u	19,30	15,61	8,98	23,97	25,2	23,27	23,38	22,4	14,32
J a m b i	19,61	13,06	11,11	31,87	25,44	18,13	29,35	22,14	14,41
Sumatera Selatan	16,18	11,96	8,82	32,37	23,53	17,79	29,51	18,9	11,52
Bengkulu	37,22	18,26	3,88	36,69	41,01	44,78	36,76	33,59	15,88
Lampung	40,46	20,84	18,25	39,46	37,9	33,34	39,57	32,98	25,88
Bangka Belitung	30,70	22,49	24,05	35,91	39,36	27,99	34,13	32,03	25,77
DKI Jakarta	84,06	21,11	9,28	-	-	-	84,06	21,11	9,28
Jawa Barat	30,74	24,65	11,80	37,41	34,51	29,30	35,38	30,38	16,78
Jawa Tengah	56,50	43,17	23,18	61,73	52,9	35,34	60,33	48,2	27,61
DI Yogyakarta	57,17	48,87	23,70	69,91	61,38	40,45	66,23	53,99	26,78
Jawa Timur	52,88	35,48	15,66	65,82	57,53	43,63	62,61	46,94	22,44
Banten	46,84	37,27	14,84	45,68	39,33	46,41	45,98	38,56	21,54
B a l i	75,03	50,62	30,82	68,07	61,85	45,04	69,87	57,5	37,22
Nusa Tenggara Barat	63,11	51,39	36,81	74,96	58,37	63,08	71,24	54,85	47,20
Nusa Tenggara Timur	37,81	18,29	16,11	59,14	49,97	39,53	58,28	42,27	26,25
Kalimantan Barat	59,03	37,66	41,03	57,85	58,38	39,23	58,01	50,69	40,43
Kalimantan Tengah	22,52	10,55	14,46	37,71	23,38	31,65	36,16	20,12	23,73
Kalimantan Selatan	14,57	12,14	11,97	40,49	31,14	22,46	36,03	24,61	15,46
Kalimantan Timur	29,95	28,52	12,21	53,04	40,66	32,06	46,49	35,76	19,85
Sulawesi Utara	5,40	3,43	0,92	5,04	2,12	2,58	5,10	2,59	1,52
Sulawesi Tengah	16,43	19,45	2,18	32,05	26,96	21,80	30,92	25,53	13,94
Sulawesi Selatan	46,93	29,77	10,06	66,39	52,3	35,51	63,83	44,56	20,48
Sulawesi Tenggara	35,61	20,46	10,69	54,22	48,37	60,36	52,97	41,85	35,62
Gorontalo	19,25	2,68	2,05	26,48	18,91	6,82	25,48	13,91	4,48
Maluku	41,99	12,15	6,39	16,66	11,39	1,99	18,12	11,6	4,69
Maluku Utara	18,83	14,6	13,22	31,75	22,89	-	30,56	20,7	11,66
Papua	27,49	5,57	11,66	70,96	47,41	43,00	68,60	34,84	25,10
INDONESIA	46,77	31,47	13,96	54,33	42,13	30,91	52,59	37,62	18,78

Sumber : BPS - Susenas 2004

Tabel 4.3.1. Persentase Penduduk Lansia menurut Propinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2004

Propinsi	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan						Perkotaan
	Tidak/belum pernah sekolah	Tidak tamat SD	SD	SLTP	SM	PT	Total
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nanggroe Aceh Darusalam	15,84	21,44	28,79	14,88	14,72	4,34	100,00
Sumatera Utara	13,29	29,46	29,72	12,19	12,65	2,67	100,00
Sumatera Barat	3,52	33,82	29,72	13,93	13,54	5,48	100,00
R i a u	12,15	27,74	34,68	11,83	11,21	2,40	100,00
J a m b i	19,66	33,95	24,85	9,06	9,17	3,31	100,00
Sumatera Selatan	12,35	34,29	28,90	12,78	9,37	2,31	100,00
Bengkulu	18,38	28,45	26,83	9,78	11,48	5,08	100,00
Lampung	28,97	32,55	22,66	8,50	5,26	2,05	100,00
Bangka Belitung	29,61	36,21	24,33	7,25	2,14	0,47	100,00
DKI Jakarta	14,14	17,91	25,99	15,66	19,74	6,57	100,00
Jawa Barat	23,26	30,44	26,59	8,58	8,48	2,65	100,00
Jawa Tengah	42,17	25,10	19,38	6,35	5,81	1,19	100,00
DI Yogyakarta	40,42	21,19	17,64	6,62	8,73	5,38	100,00
Jawa Timur	37,22	25,58	20,88	7,91	6,47	1,95	100,00
Banten	29,98	19,76	27,07	11,09	9,56	2,54	100,00
B a l i	48,28	20,28	19,94	4,24	5,80	1,46	100,00
Nusa Tenggara Barat	62,82	21,83	8,48	1,91	3,76	1,22	100,00
Nusa Tenggara Timur	21,37	18,97	26,86	11,39	16,55	4,87	100,00
Kalimantan Barat	43,13	26,15	21,36	4,21	4,33	0,81	100,00
Kalimantan Tengah	12,86	24,79	37,03	9,28	12,63	3,41	100,00
Kalimantan Selatan	12,76	37,24	31,95	8,27	7,90	1,88	100,00
Kalimantan Timur	15,04	31,23	30,66	9,42	12,19	1,46	100,00
Sulawesi Utara	1,55	34,95	28,34	17,51	15,11	2,54	100,00
Sulawesi Tengah	11,17	28,18	22,64	18,04	15,26	4,71	100,00
Sulawesi Selatan	30,39	19,30	20,58	12,56	12,77	4,40	100,00
Sulawesi Tenggara	24,61	20,26	27,02	10,24	13,52	4,33	100,00
Gorontalo	4,25	34,45	27,04	7,70	20,10	6,46	100,00
Maluku	11,74	12,65	32,99	12,68	22,34	7,60	100,00
Maluku Utara	18,71	39,87	23,09	7,03	10,07	1,24	100,00
Papua	10,65	18,96	28,45	13,34	25,25	3,34	100,00
INDONESIA	30,23	26,05	23,28	8,93	8,87	2,63	100,00

Sumber : BPS - Susenas 2004

Tabel 4.3.2. Persentase Penduduk Lansia menurut Propinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2004

Propinsi	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan						Perdesaan
	Tidak/belum pernah sekolah	Tidak tamat SD	SD	SLTP	SM	PT	Total
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nanggroe Aceh Darusalam	28,35	33,72	29,84	4,78	3,01	0,31	100,00
Sumatera Utara	20,40	41,57	28,11	6,17	3,07	0,69	100,00
Sumatera Barat	18,43	45,42	22,00	8,54	4,68	0,92	100,00
R i a u	30,16	41,55	22,94	3,76	1,59	0,00	100,00
J a m b i	33,01	42,79	19,43	2,74	1,76	0,27	100,00
Sumatera Selatan	29,88	45,03	20,92	2,83	1,33	0,00	100,00
Bengkulu	35,59	47,98	13,61	2,29	0,30	0,23	100,00
Lampung	37,57	40,55	17,96	2,82	1,05	0,05	100,00
Bangka Belitung	41,75	42,12	12,46	2,99	-	0,68	100,00
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	34,12	41,34	20,94	1,46	1,85	0,30	100,00
Jawa Tengah	54,21	29,48	13,04	1,33	1,66	0,29	100,00
DI Yogyakarta	63,51	18,54	11,81	4,31	1,47	0,36	100,00
Jawa Timur	59,90	27,10	10,75	1,21	0,89	0,15	100,00
Banten	50,30	31,93	14,71	1,45	1,61	0,00	100,00
B a l i	62,53	17,33	16,02	1,68	1,73	0,70	100,00
Nusa Tenggara Barat	70,54	17,49	8,62	2,32	0,90	0,12	100,00
Nusa Tenggara Timur	52,04	33,15	10,24	1,94	2,46	0,18	100,00
Kalimantan Barat	57,86	31,21	8,06	1,66	1,00	0,21	100,00
Kalimantan Tengah	32,18	32,47	29,83	3,26	2,03	0,23	100,00
Kalimantan Selatan	35,54	40,77	19,42	1,31	2,17	0,78	100,00
Kalimantan Timur	39,61	33,38	21,76	2,84	2,20	0,20	100,00
Sulawesi Utara	1,01	59,37	29,76	5,44	4,06	0,35	100,00
Sulawesi Tengah	23,83	44,53	24,99	3,89	2,69	0,07	100,00
Sulawesi Selatan	61,94	21,68	11,60	2,24	2,18	0,36	100,00
Sulawesi Tenggara	59,06	22,23	15,25	1,70	1,54	0,22	100,00
Gorontalo	20,51	44,38	21,98	4,97	7,55	0,60	100,00
Maluku	12,70	40,66	38,24	5,26	3,14	0,00	100,00
Maluku Utara	23,31	52,46	21,76	2,47	-	0,00	100,00
Papua	52,29	24,22	17,17	4,29	1,42	0,61	100,00
INDONESIA	46,76	32,93	16,05	2,26	1,73	0,27	100,00

Sumber : BPS - Susenas 2004

Tabel 4.3.3. Persentase Penduduk Lansia menurut Propinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2004

Propinsi	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan						Total
	Tidak/belum pernah sekolah	Tidak tamat SD	SD	SLTP	SM	PT	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
Nanggroe Aceh Darusalam	25,43	30,85	29,59	7,14	5,74	1,25	100,00
Sumatera Utara	17,67	36,93	28,73	8,48	6,74	1,46	100,00
Sumatera Barat	14,68	42,51	23,94	9,90	6,91	2,06	100,00
R i a u	23,48	36,43	27,29	6,75	5,16	0,90	100,00
J a m b i	29,27	40,32	20,94	4,51	3,83	1,13	100,00
Sumatera Selatan	24,29	41,61	23,47	6,00	3,90	0,73	100,00
Bengkulu	31,53	43,37	16,73	4,06	2,94	1,38	100,00
Lampung	35,97	39,07	18,83	3,87	1,83	0,42	100,00
Bangka Belitung	36,17	39,40	17,91	4,95	0,98	0,58	100,00
DKI Jakarta	14,14	17,91	25,99	15,66	19,74	6,57	100,00
Jawa Barat	29,39	36,59	23,40	4,57	4,74	1,33	100,00
Jawa Tengah	49,56	27,79	15,49	3,27	3,26	0,63	100,00
DI Yogyakarta	51,95	19,87	14,73	5,47	5,10	2,88	100,00
Jawa Timur	51,38	26,53	14,56	3,73	2,98	0,82	100,00
Banten	41,16	26,46	20,27	5,79	5,19	1,14	100,00
B a l i	56,75	18,52	17,61	2,72	3,38	1,02	100,00
Nusa Tenggara Barat	67,55	19,17	8,57	2,16	2,01	0,54	100,00
Nusa Tenggara Timur	48,77	31,64	12,00	2,95	3,96	0,68	100,00
Kalimantan Barat	53,15	29,59	12,32	2,47	2,07	0,40	100,00
Kalimantan Tengah	27,60	30,65	31,54	4,69	4,55	0,98	100,00
Kalimantan Selatan	27,61	39,54	23,78	3,73	4,16	1,16	100,00
Kalimantan Timur	28,21	32,38	25,89	5,90	6,83	0,79	100,00
Sulawesi Utara	1,22	50,07	29,22	10,04	8,27	1,18	100,00
Sulawesi Tengah	21,93	42,08	24,64	6,01	4,58	0,76	100,00
Sulawesi Selatan	54,02	21,09	13,85	4,83	4,84	1,37	100,00
Sulawesi Tenggara	53,18	21,89	17,26	3,16	3,59	0,92	100,00
Gorontalo	16,62	42,00	23,19	5,63	10,55	2,00	100,00
Maluku	12,47	34,17	37,03	6,98	7,59	1,76	100,00
Maluku Utara	22,18	49,35	22,09	3,60	2,49	0,30	100,00
Papua	39,89	22,65	20,53	6,99	8,51	1,43	100,00
INDONESIA	40,43	30,29	18,82	4,81	4,46	1,17	100,00

Sumber : BPS - Susenas 2004

Tabel 5.1. Persentase Penduduk Lansia yang Mengalami Keluhan Kesehatan menurut Propinsi, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2004

Propinsi	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan+Perdesaan		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Nanggroe Aceh Darusalam	40,42	51,14	45,89	50,51	58,68	54,80	48,09	56,96	52,72
Sumatera Utara	42,12	45,03	43,73	49,50	43,06	46,18	46,80	43,85	45,24
Sumatera Barat	37,82	40,01	39,11	49,38	51,69	50,69	46,59	48,67	47,78
R i a u	35,92	40,31	38,02	40,41	40,96	40,65	38,83	40,70	39,68
J a m b i	33,27	31,90	32,59	36,27	39,59	37,81	35,46	37,34	36,35
Sumatera Selatan	41,36	43,82	42,69	40,44	37,51	39,06	40,70	39,71	40,22
Bengkulu	46,44	42,08	44,33	47,44	46,99	47,22	47,20	45,83	46,54
Lampung	47,98	55,07	51,39	51,73	50,66	51,24	51,06	51,51	51,26
Bangka Belitung	58,93	62,58	60,86	65,51	63,57	64,54	62,59	63,10	62,85
DKI Jakarta	55,16	53,50	54,35	-	-	-	55,16	53,50	54,35
Jawa Barat	48,02	49,41	48,73	49,27	52,19	50,73	48,73	50,96	49,86
Jawa Tengah	50,02	51,37	50,77	49,88	49,52	49,69	49,93	50,25	50,10
DI Yogyakarta	58,89	51,03	54,61	53,87	43,28	48,08	56,39	47,16	51,35
Jawa Timur	51,09	52,79	52,04	49,04	48,43	48,70	49,80	50,08	49,95
Banten	41,58	41,38	41,49	43,88	47,86	45,95	42,79	45,12	43,94
B a l i	56,91	52,33	54,56	51,57	56,69	54,23	53,75	54,93	54,36
Nusa Tenggara Barat	71,13	67,06	68,96	59,71	61,56	60,67	64,06	63,71	63,88
Nusa Tenggara Timur	50,97	49,00	49,92	58,79	57,20	57,99	57,99	56,29	57,13
Kalimantan Barat	46,86	44,70	45,72	55,05	59,08	56,91	52,66	54,05	53,33
Kalimantan Tengah	33,41	39,22	36,06	33,63	37,68	35,44	33,58	38,05	35,59
Kalimantan Selatan	52,76	57,33	55,32	53,54	54,87	54,24	53,28	55,76	54,62
Kalimantan Timur	38,00	38,29	38,13	47,09	46,28	46,73	43,00	42,43	42,74
Sulawesi Utara	34,15	35,54	34,90	54,74	42,05	48,27	47,19	39,49	43,18
Sulawesi Tengah	57,02	57,94	57,48	55,59	54,45	55,07	55,79	55,02	55,43
Sulawesi Selatan	39,14	42,27	40,87	44,82	44,36	44,57	43,44	43,82	43,65
Sulawesi Tenggara	42,95	41,27	42,11	49,88	59,57	54,65	48,71	56,41	52,51
Gorontalo	71,82	58,05	64,44	63,41	56,08	59,46	65,43	56,55	60,66
Maluku	46,16	32,32	38,67	32,44	31,62	32,04	35,37	31,80	33,58
Maluku Utara	59,28	43,48	51,47	77,99	59,94	69,35	73,47	55,77	64,93
Papua	43,35	21,90	34,94	32,88	41,62	36,18	35,95	35,59	35,81
INDONESIA	49,18	50,07	49,65	49,38	49,42	49,40	49,30	49,67	49,50

Sumber : BPS - Susenas 2004

Tabel 5.2 Angka Kesakitan Penduduk Lansia menurut Propinsi, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2004

Propinsi	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan + Perdesaan		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Nanggroe Aceh Darusalam	22,43	29,58	26,08	31,86	37,84	35,01	29,61	35,95	32,92
Sumatera Utara	26,68	28,70	27,79	33,72	26,80	30,15	31,15	27,56	29,25
Sumatera Barat	20,12	19,21	19,58	31,19	31,05	31,11	28,52	27,98	28,22
R i a u	22,07	25,91	23,91	25,80	26,75	26,22	24,49	26,42	25,36
J a m b i	19,47	19,18	19,33	24,93	28,73	26,69	23,46	25,94	24,63
Sumatera Selatan	22,45	24,47	23,54	21,36	18,79	20,15	21,68	20,77	21,23
Bengkulu	28,51	24,99	26,81	32,33	30,85	31,62	31,43	29,46	30,49
Lampung	26,27	33,71	29,84	30,67	30,18	30,45	29,88	30,86	30,34
Bangka Belitung	36,77	35,71	36,21	37,75	34,11	35,93	37,31	34,87	36,06
DKI Jakarta	33,75	34,44	34,08	.	.	.	33,75	34,44	34,08
Jawa Barat	29,38	29,90	29,64	29,51	30,39	29,95	29,46	30,17	29,82
Jawa Tengah	27,29	27,13	27,20	28,89	28,62	28,75	28,29	28,03	28,15
DI Yogyakarta	28,03	23,33	25,47	28,29	20,52	24,04	28,16	21,92	24,76
Jawa Timur	31,25	29,90	30,49	31,72	29,88	30,70	31,54	29,89	30,62
Banten	23,34	27,21	25,15	31,02	27,46	29,17	27,37	27,35	27,36
B a l i	38,50	37,20	37,83	39,18	40,51	39,87	38,90	39,18	39,04
Nusa Tenggara Barat	50,86	43,36	46,87	44,86	42,74	43,76	47,15	42,98	44,96
Nusa Tenggara Timur	33,60	32,50	33,02	47,42	43,58	45,47	46,01	42,35	44,15
Kalimantan Barat	26,80	26,19	26,48	36,90	41,44	38,99	33,95	36,10	34,99
Kalimantan Tengah	21,86	27,50	24,43	23,59	26,64	24,96	23,18	26,85	24,83
Kalimantan Selatan	30,74	31,70	31,28	35,65	28,83	32,04	34,02	29,87	31,78
Kalimantan Timur	26,33	26,85	26,57	35,41	30,75	33,36	31,32	28,87	30,21
Sulawesi Utara	24,17	23,30	23,70	35,80	28,81	32,23	31,54	26,64	28,99
Sulawesi Tengah	36,76	37,86	37,32	42,92	36,87	40,16	42,06	37,04	39,74
Sulawesi Selatan	24,09	24,49	24,32	30,31	28,18	29,17	28,80	27,23	27,95
Sulawesi Tenggara	32,63	26,81	29,72	36,72	42,10	39,36	36,03	39,46	37,72
Gorontalo	54,32	42,54	48,01	44,07	36,43	39,96	46,53	37,89	41,89
Maluku	26,53	17,37	21,57	25,16	27,76	26,43	25,45	25,16	25,30
Maluku Utara	44,24	42,23	43,25	66,82	49,82	58,68	61,37	47,90	54,87
Papua	35,92	16,57	28,34	19,71	34,16	25,17	24,46	28,78	26,11
INDONESIA	29,32	29,07	29,18	31,45	30,25	30,83	30,64	29,79	30,20

Sumber : BPS - Susenas 2004

Tabel 5.3. Persentase Penduduk Lansia yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dengan Cara Berobat Sendiri menurut Propinsi, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2004

Propinsi	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan+Perdesaan		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Nanggroe Aceh Darusalam	71,94	73,70	72,94	68,43	72,33	70,63	69,14	72,6	71,10
Sumatera Utara	67,93	71,20	69,78	74,20	72,54	73,40	72,13	72,0	72,06
Sumatera Barat	68,26	54,64	60,05	71,99	70,61	71,20	71,26	67,2	68,91
R i a u	87,26	81,03	84,10	88,35	87,06	87,78	87,99	84,7	86,47
J a m b i	64,30	65,50	64,88	79,77	78,71	79,25	75,86	75,4	75,65
Sumatera Selatan	84,48	87,05	85,90	76,78	75,79	76,33	79,04	80,1	79,57
Bengkulu	61,32	80,90	70,30	82,12	65,85	74,36	77,32	69,1	73,45
Lampung	78,92	78,33	78,62	82,11	82,51	82,29	81,57	81,7	81,61
Bangka Belitung	76,33	85,62	81,38	66,17	77,43	71,70	70,42	81,3	76,00
DKI Jakarta	67,36	71,06	69,13	-	-	-	67,36	71,1	69,13
Jawa Barat	73,30	73,79	73,55	79,11	75,09	77,04	76,65	74,5	75,56
Jawa Tengah	71,01	70,47	70,70	71,36	69,32	70,26	71,22	69,8	70,44
DI Yogyakarta	59,69	62,52	61,13	61,07	62,59	61,82	60,35	62,6	61,45
Jawa Timur	74,39	73,70	74,00	74,07	74,71	74,42	74,19	74,3	74,26
Banten	74,11	76,74	75,34	80,41	70,38	74,98	77,50	72,9	75,13
B a l i	61,46	60,25	60,86	60,66	55,84	58,05	61,00	57,5	59,19
Nusa Tenggara Barat	71,64	71,21	71,42	71,29	71,36	71,32	71,43	71,3	71,36
Nusa Tenggara Timur	65,97	67,47	66,75	65,37	63,83	64,60	65,43	64,2	64,80
Kalimantan Barat	73,67	53,58	63,30	79,64	74,40	77,13	78,09	68,4	73,34
Kalimantan Tengah	75,81	87,87	81,79	82,50	82,38	82,44	80,94	83,7	82,28
Kalimantan Selatan	77,14	72,31	74,34	77,39	70,44	73,67	77,31	71,1	73,91
Kalimantan Timur	79,17	73,82	76,63	75,89	76,93	76,34	77,19	75,6	76,46
Sulawesi Utara	69,73	67,50	68,51	69,02	64,66	67,08	69,21	65,7	67,52
Sulawesi Tengah	72,42	79,74	76,15	84,03	75,63	80,24	82,39	76,3	79,61
Sulawesi Selatan	73,81	78,79	76,67	70,51	66,34	68,28	71,23	69,4	70,25
Sulawesi Tenggara	76,85	57,01	67,15	72,81	67,40	69,91	73,41	66,1	69,53
Gorontalo	66,77	80,40	73,35	81,95	77,71	79,80	77,95	78,4	78,16
Maluku	89,36	63,99	77,88	71,16	69,60	70,41	76,22	68,2	72,40
Maluku Utara	89,84	100,00	94,08	94,91	94,35	94,68	93,92	95,5	94,56
Papua	70,36	70,47	70,39	55,22	40,22	48,70	60,57	45,9	55,00
INDONESIA	71,84	72,06	71,96	74,26	72,12	73,14	73,35	72,10	72,69

Sumber : BPS - Susenas 2004

Tabel 5.4.1. Persentase Penduduk Lansia yang Berobat Sendiri menurut Propinsi, dan Jenis Obat yang Digunakan, 2004

Propinsi	Jenis Obat yang Digunakan				Perkotaan
	Obat Tradisional	Obat Modern	Lainnya	Campuran	Jumlah
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nanggroe Aceh Darusalam	11,78	45,71	0,87	41,64	100,00
Sumatera Utara	11,90	55,69	2,93	29,48	100,00
Sumatera Barat	22,32	51,79	3,77	22,11	100,00
R i a u	8,29	58,58	2,47	30,65	100,00
J a m b i	11,08	52,20	1,04	35,67	100,00
Sumatera Selatan	16,25	43,04	1,69	39,01	100,00
Bengkulu	15,01	54,69	-	30,31	100,00
Lampung	7,50	61,39	0,27	30,83	100,00
Bangka Belitung	10,32	58,60	0,37	30,70	100,00
DKI Jakarta	14,53	51,02	2,31	32,13	100,00
Jawa Barat	8,48	57,26	1,08	33,18	100,00
Jawa Tengah	11,10	56,06	1,51	31,34	100,00
DI Yogyakarta	14,01	56,14	6,42	23,42	100,00
Jawa Timur	15,86	42,14	1,66	40,34	100,00
Banten	12,53	47,58	0,23	39,66	100,00
B a l i	22,85	36,11	0,73	40,31	100,00
Nusa Tenggara Barat	14,05	53,60	1,44	30,91	100,00
Nusa Tenggara Timur	4,93	63,77	1,13	30,18	100,00
Kalimantan Barat	6,60	68,45	-	24,95	100,00
Kalimantan Tengah	4,10	59,25	4,31	32,34	100,00
Kalimantan Selatan	6,85	52,39	0,93	39,83	100,00
Kalimantan Timur	6,38	62,46	1,47	29,70	100,00
Sulawesi Utara	4,34	72,01	-	23,65	100,00
Sulawesi Tengah	9,47	54,06	-	36,47	100,00
Sulawesi Selatan	9,33	56,92	1,43	32,32	100,00
Sulawesi Tenggara	20,42	56,99	2,26	20,32	100,00
Gorontalo	1,17	60,77	1,17	36,88	100,00
Maluku	18,56	58,87	-	22,57	100,00
Maluku Utara	10,12	42,35	-	47,53	100,00
Papua	10,28	77,94	1,91	9,88	100,00
INDONESIA	12,36	51,92	1,65	34,06	100,00

Sumber : BPS - Susenas 2004

Tabel 5.4.2. Persentase Penduduk Lansia yang Berobat Sendiri menurut Propinsi, dan Jenis Obat yang Digunakan, 2004

Propinsi	Jenis Obat yang Digunakan				Perdesaan
	Obat Tradisional	Obat Modern	Lainnya	Campuran	Jumlah
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nanggroe Aceh Darusalam	12,22	27,77	1,39	58,63	100,00
Sumatera Utara	13,95	41,13	2,22	42,70	100,00
Sumatera Barat	25,53	31,41	1,57	41,49	100,00
R i a u	13,60	35,77	6,75	43,88	100,00
J a m b i	10,19	34,37	1,92	53,52	100,00
Sumatera Selatan	9,35	43,23	1,05	46,37	100,00
Bengkulu	13,60	38,41	3,34	44,65	100,00
Lampung	11,52	45,65	2,11	40,72	100,00
Bangka Belitung	4,38	54,07	1,46	40,10	100,00
DKI Jakarta	-	-	-	-	-
Jawa Barat	8,00	51,24	1,95	38,82	100,00
Jawa Tengah	9,83	58,11	1,73	30,33	100,00
DI Yogyakarta	16,28	47,62	2,85	33,24	100,00
Jawa Timur	14,72	42,08	2,11	41,10	100,00
Banten	11,33	42,91	1,87	43,89	100,00
B a l i	30,86	24,36	4,16	40,62	100,00
Nusa Tenggara Barat	18,66	29,52	2,33	49,49	100,00
Nusa Tenggara Timur	20,59	36,51	1,63	41,27	100,00
Kalimantan Barat	13,84	39,58	3,39	43,19	100,00
Kalimantan Tengah	4,95	64,21	0,51	30,33	100,00
Kalimantan Selatan	9,70	59,98	2,34	27,99	100,00
Kalimantan Timur	10,14	52,55	1,48	35,83	100,00
Sulawesi Utara	10,61	51,22	-	38,17	100,00
Sulawesi Tengah	9,72	39,73	1,75	48,80	100,00
Sulawesi Selatan	20,24	39,44	0,91	39,41	100,00
Sulawesi Tenggara	13,03	33,92	2,59	50,46	100,00
Gorontalo	10,85	48,62	-	40,53	100,00
Maluku	14,84	42,09	-	43,07	100,00
Maluku Utara	13,38	29,89	-	56,74	100,00
Papua	21,42	40,56	-	38,03	100,00
INDONESIA	12,98	45,65	1,97	39,40	100,00

Sumber : BPS - Susenas 2004

Tabel 5.4.3. Persentase Penduduk Lansia yang Berobat Sendiri menurut Propinsi, dan Jenis Obat yang Digunakan, 2004

Propinsi	Perkotaan + Perdesaan				
	Jenis Obat yang Digunakan				Jumlah
	Obat Tradisional	Obat Modern	Lainnya	Campuran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nanggroe Aceh Darusalam	12,13	31,51	1,28	55,09	100,00
Sumatera Utara	13,22	46,35	2,47	37,96	100,00
Sumatera Barat	24,95	35,07	1,97	38,01	100,00
R i a u	11,77	43,66	5,27	39,31	100,00
J a m b i	10,39	38,21	1,73	49,68	100,00
Sumatera Selatan	11,87	43,16	1,29	43,68	100,00
Bengkulu	13,91	41,91	2,62	41,56	100,00
Lampung	10,80	48,47	1,78	38,95	100,00
Bangka Belitung	7,21	56,23	0,94	35,63	100,00
DKI Jakarta	14,53	51,02	2,31	32,13	100,00
Jawa Barat	8,20	53,73	1,59	36,48	100,00
Jawa Tengah	10,33	57,30	1,64	30,73	100,00
DI Yogyakarta	15,08	52,13	4,74	28,04	100,00
Jawa Timur	15,16	42,10	1,93	40,80	100,00
Banten	11,84	44,90	1,17	42,09	100,00
B a l i	27,51	29,28	2,72	40,49	100,00
Nusa Tenggara Barat	16,73	39,59	1,95	41,72	100,00
Nusa Tenggara Timur	19,09	39,12	1,58	40,21	100,00
Kalimantan Barat	12,13	46,41	2,59	38,87	100,00
Kalimantan Tengah	4,75	63,03	1,41	30,81	100,00
Kalimantan Selatan	8,69	57,29	1,84	32,19	100,00
Kalimantan Timur	8,58	56,66	1,48	33,28	100,00
Sulawesi Utara	8,65	57,71	-	33,64	100,00
Sulawesi Tengah	9,68	41,86	1,49	46,97	100,00
Sulawesi Selatan	17,44	43,92	1,04	37,59	100,00
Sulawesi Tenggara	14,01	36,97	2,54	46,48	100,00
Gorontalo	8,54	51,52	0,28	39,66	100,00
Maluku	15,91	46,91	-	37,18	100,00
Maluku Utara	12,74	32,31	-	54,94	100,00
Papua	17,28	54,46	0,71	27,56	100,00
INDONESIA	12,74	48,04	1,85	37,37	100,00

Sumber : BPS - Susenas 2004

Tabel 5.5.1. Persentase Penduduk Lansia yang Sakit menurut Propinsi dan Lamanya Hari Sakit (hari), 2004

Propinsi	Lamanya Terganggu Aktifitas (hari)					Perkotaan
	1-3	4-7	8-14	15-21	22-30	Jumlah
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nanggroe Aceh Darusalam	30,26	34,71	11,27	6,64	8,74	100,00
Sumatera Utara	33,87	33,32	11,79	4,15	13,76	100,00
Sumatera Barat	30,04	27,63	8,89	10,35	18,90	100,00
R i a u	41,61	38,48	8,54	5,70	5,62	100,00
J a m b i	36,61	42,05	7,21	2,67	17,86	100,00
Sumatera Selatan	38,72	49,27	6,83	4,36	11,53	100,00
Bengkulu	30,70	26,01	8,54	5,35	19,18	100,00
Lampung	36,22	36,44	6,85	9,50	8,10	100,00
Bangka Belitung	42,40	41,16	15,01	8,77	11,47	100,00
DKI Jakarta	40,58	48,60	7,68	3,77	7,39	100,00
Jawa Barat	28,99	33,88	9,26	5,42	12,13	100,00
Jawa Tengah	34,36	40,19	9,37	6,54	12,20	100,00
DI Yogyakarta	36,64	35,87	8,23	6,35	15,17	100,00
Jawa Timur	35,46	37,99	9,81	7,12	13,41	100,00
Banten	26,09	30,60	6,43	6,60	16,35	100,00
B a l i	50,00	50,91	4,23	3,67	7,31	100,00
Nusa Tenggara Barat	28,90	31,29	12,95	8,35	15,53	100,00
Nusa Tenggara Timur	26,86	24,88	14,66	6,62	13,37	100,00
Kalimantan Barat	38,06	37,80	7,67	4,23	13,40	100,00
Kalimantan Tengah	41,50	42,77	8,82	2,50	6,34	100,00
Kalimantan Selatan	41,37	45,88	5,21	3,47	12,03	100,00
Kalimantan Timur	34,55	34,09	13,55	4,22	7,82	100,00
Sulawesi Utara	35,29	41,03	8,77	2,47	9,54	100,00
Sulawesi Tengah	22,13	26,63	15,90	6,90	12,90	100,00
Sulawesi Selatan	30,82	35,58	13,41	5,44	17,36	100,00
Sulawesi Tenggara	24,95	29,26	11,34	7,72	18,29	100,00
Gorontalo	27,58	37,16	14,90	4,65	10,09	100,00
Maluku	24,46	18,06	19,44	9,79	11,52	100,00
Maluku Utara	29,71	29,08	15,71	3,94	4,81	100,00
Papua	26,47	48,32	15,92	7,88	5,68	100,00
INDONESIA	33,66	37,93	9,69	6,17	12,55	100,00

Sumber : BPS - Susenas 2004

Tabel 5.5.2. Persentase Penduduk Lansia yang Sakit menurut Propinsi dan Lamanya Hari Sakit (hari), 2004

Propinsi	Lamanya Terganggu Aktifitas (hari)					Perdesaan
	1-3	4-7	8-14	15-21	22-30	Jumlah
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nanggroe Aceh Darusalam	34,71	34,94	13,62	7,64	9,09	100,00
Sumatera Utara	33,32	39,55	8,86	3,40	14,87	100,00
Sumatera Barat	27,63	35,07	10,90	9,80	16,60	100,00
R i a u	38,48	39,79	7,09	5,13	9,51	100,00
J a m b i	42,05	34,09	9,58	2,29	11,98	100,00
Sumatera Selatan	49,27	37,35	2,96	2,81	7,61	100,00
Bengkulu	26,01	42,38	9,35	4,13	18,13	100,00
Lampung	36,44	41,27	10,49	5,18	6,62	100,00
Bangka Belitung	41,16	33,63	13,46	,	11,74	100,00
DKI Jakarta	48,60	37,12	10,17	1,21	2,91	100,00
Jawa Barat	33,88	39,16	11,21	5,60	10,14	100,00
Jawa Tengah	40,19	35,96	8,85	3,73	11,27	100,00
DI Yogyakarta	35,87	35,45	4,81	8,91	14,96	100,00
Jawa Timur	37,99	34,33	9,85	5,82	12,01	100,00
Banten	30,60	42,43	9,71	4,40	12,86	100,00
B a l i	50,91	33,03	6,63	2,47	6,96	100,00
Nusa Tenggara Barat	31,29	40,40	8,57	6,81	12,94	100,00
Nusa Tenggara Timur	24,88	40,67	16,92	5,32	12,20	100,00
Kalimantan Barat	37,80	38,48	7,13	3,37	13,21	100,00
Kalimantan Tengah	42,77	44,35	5,27	1,63	5,99	100,00
Kalimantan Selatan	45,88	33,14	6,84	2,96	11,20	100,00
Kalimantan Timur	34,09	41,94	9,46	4,75	9,76	100,00
Sulawesi Utara	41,03	37,71	12,14	3,49	5,62	100,00
Sulawesi Tengah	26,63	38,86	15,50	3,38	15,62	100,00
Sulawesi Selatan	35,58	37,45	8,63	4,71	13,63	100,00
Sulawesi Tenggara	29,26	32,23	13,16	6,75	18,60	100,00
Gorontalo	37,16	46,62	8,19	0,65	7,39	100,00
Maluku	18,06	37,30	21,63	9,06	13,95	100,00
Maluku Utara	29,08	33,10	26,95	3,90	6,96	100,00
Papua	48,32	37,05	10,19	0,54	3,90	100,00
INDONESIA	37,12	36,87	9,85	4,92	11,24	100,00

Sumber : BPS - Susenas 2004

Tabel 5.5.3. Persentase Penduduk Lansia yang Sakit menurut Propinsi dan Lamanya Hari Sakit (hari), 2004

Propinsi	Lamanya Terganggu Aktifitas (hari)					Jumlah
	1-3	4-7	8-14	15-21	22-30	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Perkotaan + Perdesaan						
Nanggroe Aceh Darusalam	32,80	38,44	12,61	7,21	8,94	100,00
Sumatera Utara	33,60	37,99	10,33	3,77	14,31	100,00
Sumatera Barat	28,68	33,66	10,03	10,04	17,60	100,00
R i a u	40,14	39,12	7,86	5,43	7,45	100,00
J a m b i	39,31	34,88	8,39	2,48	14,94	100,00
Sumatera Selatan	43,80	37,98	4,96	3,61	9,64	100,00
Bengkulu	28,53	39,08	8,92	4,78	18,69	100,00
Lampung	36,32	40,25	8,56	7,46	7,40	100,00
Bangka Belitung	41,79	27,93	14,25	4,43	11,60	100,00
DKI Jakarta	44,52	38,88	8,90	2,51	5,19	100,00
Jawa Barat	31,49	41,63	10,25	5,51	11,12	100,00
Jawa Tengah	37,51	36,68	9,08	5,02	11,70	100,00
DI Yogyakarta	36,27	34,50	6,58	7,59	15,07	100,00
Jawa Timur	36,84	34,27	9,83	6,41	12,65	100,00
Banten	28,32	43,49	8,06	5,51	14,62	100,00
B a l i	50,47	33,88	5,47	3,05	7,13	100,00
Nusa Tenggara Barat	30,10	37,35	10,75	7,57	14,23	100,00
Nusa Tenggara Timur	25,90	39,55	15,76	5,99	12,80	100,00
Kalimantan Barat	37,93	37,55	7,40	3,80	13,31	100,00
Kalimantan Tengah	42,12	42,54	7,09	2,07	6,17	100,00
Kalimantan Selatan	43,66	35,50	6,03	3,21	11,60	100,00
Kalimantan Timur	34,35	40,76	11,77	4,45	8,67	100,00
Sulawesi Utara	38,04	40,95	10,38	2,96	7,66	100,00
Sulawesi Tengah	24,08	40,74	15,73	5,38	14,08	100,00
Sulawesi Selatan	33,33	35,33	10,89	5,06	15,39	100,00
Sulawesi Tenggara	27,17	34,88	12,28	7,22	18,45	100,00
Gorontalo	32,24	44,64	11,64	2,71	8,78	100,00
Maluku	21,27	36,04	20,53	9,43	12,73	100,00
Maluku Utara	29,44	40,47	20,44	3,92	5,72	100,00
Papua	35,67	41,10	13,51	4,79	4,93	100,00
INDONESIA	35,45	37,38	9,77	5,53	11,87	100,00

Sumber : BPS - Susenas 2004

Tabel 5.6. Persentase Penduduk Lansia yang Berobat Jalan menurut Propinsi, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2004

Propinsi	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan+Perdesaan		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Nanggroe Aceh Darusalam	20,01	25,68	22,90	24,50	29,30	27,02	23,42	28,5	26,06
Sumatera Utara	18,55	19,41	19,03	17,57	15,65	16,58	17,93	17,2	17,52
Sumatera Barat	20,50	19,45	19,88	22,20	23,41	22,88	21,79	22,4	22,13
R i a u	13,26	14,30	13,76	9,18	13,66	11,13	10,62	13,9	12,10
J a m b i	16,96	16,36	16,66	12,08	10,16	11,19	13,39	12,0	12,72
Sumatera Selatan	16,17	12,25	14,05	12,34	8,54	10,55	13,45	9,8	11,67
Bengkulu	22,16	15,83	19,10	17,18	18,69	17,91	18,35	18,0	18,19
Lampung	26,06	30,95	28,41	18,42	16,86	17,70	19,79	19,6	19,69
Bangka Belitung	28,73	25,98	27,27	23,11	23,06	23,09	25,60	24,4	25,01
DKI Jakarta	27,36	28,94	28,13	-	-	-	27,36	28,9	28,13
Jawa Barat	22,45	22,46	22,45	18,93	16,85	17,89	20,44	19,3	19,88
Jawa Tengah	20,76	21,77	21,31	19,79	18,86	19,29	20,16	20,0	20,07
DI Yogyakarta	25,74	24,03	24,81	23,60	17,85	20,46	24,68	20,9	22,64
Jawa Timur	24,62	21,90	23,09	18,64	17,94	18,25	20,86	19,4	20,07
Banten	15,59	14,45	15,06	10,87	11,01	10,94	13,12	12,5	12,80
B a l i	32,58	30,91	31,72	29,98	33,02	31,55	31,04	32,2	31,62
Nusa Tenggara Barat	34,61	24,64	29,31	30,79	27,14	28,89	32,25	26,2	29,05
Nusa Tenggara Timur	23,21	25,78	24,58	26,97	26,74	26,85	26,59	26,6	26,61
Kalimantan Barat	23,86	27,54	25,81	17,55	17,16	17,37	19,39	20,8	20,07
Kalimantan Tengah	15,81	13,81	14,90	11,47	13,51	12,38	12,49	13,6	12,98
Kalimantan Selatan	11,75	21,05	16,95	17,55	15,54	16,49	15,62	17,5	16,65
Kalimantan Timur	14,42	17,37	15,81	16,60	19,66	17,95	15,62	18,6	16,96
Sulawesi Utara	16,93	16,82	16,87	27,54	18,60	22,97	23,65	17,9	20,65
Sulawesi Tengah	25,10	18,23	21,62	25,31	21,04	23,37	25,28	20,6	23,10
Sulawesi Selatan	13,88	11,39	12,50	16,43	12,11	14,11	15,81	11,9	13,71
Sulawesi Tenggara	14,31	10,93	12,62	16,58	16,36	16,47	16,20	15,4	15,81
Gorontalo	38,86	29,94	34,08	24,00	19,06	21,34	27,57	21,7	24,39
Maluku	16,83	13,17	14,85	11,98	14,65	13,28	13,01	14,3	13,65
Maluku Utara	29,21	19,06	24,19	27,89	30,16	28,98	28,21	27,4	27,79
Papua	12,23	10,11	11,40	16,47	20,98	18,17	15,23	17,7	16,15
INDONESIA	22,43	21,88	22,14	19,21	18,14	18,65	20,42	19,59	19,99

Sumber : BPS - Susenas 2004

Tabel 5.7.1. Persentase Penduduk Lansia yang Sakit menurut Propinsi dan Tempat Berobat Jalan, 2004

Propinsi	Tempat Berobat Jalan							Jumlah
	Rumah Sakit	Dokter	Puskesmas/ Pustu	Poli- klinik	Petugas Kesehatan	Tradisional	Lainnya	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
Nanggroe Aceh Darusalam	27,88	31,40	46,45	2,59	8,50	2,04	8,77	100,00
Sumatera Utara	22,48	47,86	26,69	9,94	16,30	8,33	7,29	100,00
Sumatera Barat	23,33	26,48	33,93	0,57	20,95	2,46	2,34	100,00
R i a u	28,74	43,71	30,25	5,30	8,01	1,60	5,21	100,00
J a m b i	16,81	43,89	54,93	-	7,12	3,79	7,59	100,00
Sumatera Selatan	22,15	38,12	39,96	0,05	2,70	0,09	10,51	100,00
Bengkulu	24,10	38,37	27,36	4,10	13,03	2,87	-	100,00
Lampung	10,30	40,65	28,83	0,85	31,09	1,00	4,98	100,00
Bangka Belitung	26,63	40,00	31,68	1,05	10,67	12,44	12,82	100,00
DKI Jakarta	35,15	45,69	27,02	7,46	1,73	1,93	3,44	100,00
Jawa Barat	16,26	38,07	39,10	4,31	14,41	1,21	2,80	100,00
Jawa Tengah	7,41	41,09	36,72	2,59	19,74	0,92	2,50	100,00
DI Yogyakarta	19,40	45,31	18,54	0,54	21,43	1,78	1,82	100,00
Jawa Timur	14,92	36,83	30,83	3,17	25,42	2,05	2,64	100,00
Banten	20,80	35,84	29,59	9,03	12,53	0,47	4,15	100,00
B a l i	12,10	53,52	32,55	0,65	16,33	3,41	2,40	100,00
Nusa Tenggara Barat	6,37	28,48	50,37	2,87	25,44	-	5,34	100,00
Nusa Tenggara Timur	29,01	33,76	37,15	4,26	3,47	-	3,79	100,00
Kalimantan Barat	7,49	49,79	31,47	1,58	11,32	1,58	2,59	100,00
Kalimantan Tengah	19,26	42,60	18,88	-	21,62	8,81	2,36	100,00
Kalimantan Selatan	22,19	33,65	31,18	2,97	18,53	6,28	6,18	100,00
Kalimantan Timur	26,14	40,85	37,61	2,70	3,85	2,03	1,59	100,00
Sulawesi Utara	18,30	47,55	38,31	2,28	6,83	-	-	100,00
Sulawesi Tengah	24,71	63,11	17,96	2,75	9,12	-	3,52	100,00
Sulawesi Selatan	25,25	38,60	46,50	1,72	6,90	0,38	4,21	100,00
Sulawesi Tenggara	32,89	32,66	22,98	-	13,71	7,80	3,36	100,00
Gorontalo	15,55	37,85	53,10	3,25	22,68	4,88	6,50	100,00
Maluku	24,01	33,53	23,73	5,56	18,45	-	-	100,00
Maluku Utara	29,05	41,53	31,12	-	18,45	-	8,61	100,00
Papua	52,90	25,48	50,84	4,55	-	-	-	100,00
INDONESIA	16,79	40,08	33,77	3,66	17,24	1,87	3,28	100,00

Sumber : BPS - Susenas 2004

Tabel 5.7.2. Persentase Penduduk Lansia yang Sakit menurut Propinsi dan Tempat Berobat Jalan, 2004

Propinsi	Tempat Berobat Jalan							Perdesaan
	Rumah Sakit	Dokter	Puskesmas/ Pustu	Poli- klinik	Petugas Kesehatan	Tradisional	Lainnya	Jumlah
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Nanggroe Aceh Darusalam	14,60	21,47	75,28	3,52	8,88	1,56	4,10	100,00
Sumatera Utara	11,79	13,76	33,67	7,36	43,36	3,32	8,02	100,00
Sumatera Barat	11,68	20,26	48,07	1,17	25,28	7,43	7,14	100,00
R i a u	12,89	17,29	67,06	0,74	10,92	0,80	1,62	100,00
J a m b i	8,82	28,47	56,32	3,51	19,35	0,82	5,30	100,00
Sumatera Selatan	7,48	11,51	57,31	3,25	25,54	-	3,37	100,00
Bengkulu	9,81	28,33	39,26	1,31	31,85	-	12,74	100,00
Lampung	5,24	15,79	35,20	4,83	52,37	0,36	6,17	100,00
Bangka Belitung	1,26	43,49	55,25	-	15,89	1,26	2,93	100,00
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	5,72	30,44	46,13	1,10	31,03	0,73	3,44	100,00
Jawa Tengah	5,50	25,50	37,91	1,69	36,39	1,27	2,63	100,00
DI Yogyakarta	10,20	34,43	31,46	1,72	34,44	0,93	0,93	100,00
Jawa Timur	3,98	24,86	33,21	2,25	40,14	2,48	4,82	100,00
Banten	5,92	20,40	45,31	-	34,76	1,46	3,00	100,00
B a l i	2,14	44,18	29,99	0,69	31,04	4,88	2,57	100,00
Nusa Tenggara Barat	3,26	28,25	61,31	0,49	19,61	3,18	4,36	100,00
Nusa Tenggara Timur	4,19	6,70	73,51	6,14	12,77	1,12	12,50	100,00
Kalimantan Barat	4,78	9,44	54,69	3,90	31,79	0,66	7,02	100,00
Kalimantan Tengah	4,57	5,32	79,81	1,56	16,88	0,49	2,59	100,00
Kalimantan Selatan	2,77	8,73	47,15	-	46,31	0,58	6,96	100,00
Kalimantan Timur	12,08	7,56	68,06	2,15	16,18	3,14	0,66	100,00
Sulawesi Utara	9,21	32,09	34,91	1,55	37,30	-	0,78	100,00
Sulawesi Tengah	11,33	14,73	60,76	2,26	19,86	-	8,13	100,00
Sulawesi Selatan	12,34	15,42	60,02	0,29	20,22	0,49	4,74	100,00
Sulawesi Tenggara	2,49	14,43	59,72	3,09	19,98	5,34	11,55	100,00
Gorontalo	2,23	26,70	56,10	-	25,35	0,82	-	100,00
Maluku	8,79	13,40	65,03	-	4,20	-	22,78	100,00
Maluku Utara	7,35	10,92	47,66	2,80	25,19	-	14,77	100,00
Papua	5,83	4,66	84,12	5,30	3,45	-	1,11	100,00
INDONESIA	6,25	23,73	43,72	2,17	32,64	1,81	4,63	100,00

Sumber : BPS - Susenas 2004

Tabel 5.7.3. Persentase Penduduk Lansia yang Sakit menurut Propinsi dan Tempat Berobat Jalan, 2004

Propinsi	Perkotaan + Perdesaan							
	Tempat Berobat Jalan							Jumlah
	Rumah Sakit	Dokter	Puskesmas/ Pustu	Poli- klinik	Petugas Kesehatan	Tradisional	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Nanggroe Aceh Darusalam	17,32	23,51	69,37	3,33	8,80	1,66	5,06	100,00
Sumatera Utara	16,24	27,96	30,76	8,43	32,10	5,41	7,71	100,00
Sumatera Barat	14,31	21,66	44,88	1,03	24,30	6,31	6,06	100,00
R i a u	19,57	28,43	51,54	2,66	9,69	1,13	3,13	100,00
J a m b i	11,75	34,12	55,81	2,23	14,87	1,91	6,14	100,00
Sumatera Selatan	13,12	21,73	50,65	2,02	16,77	0,04	6,11	100,00
Bengkulu	13,35	30,82	36,31	2,00	27,18	0,71	9,58	100,00
Lampung	6,59	22,44	33,50	3,76	46,67	0,53	5,86	100,00
Bangka Belitung	13,96	41,75	43,45	0,53	13,28	6,86	7,88	100,00
DKI Jakarta	35,15	45,69	27,02	7,46	1,73	1,93	3,44	100,00
Jawa Barat	10,91	34,20	42,67	2,68	22,85	0,96	3,12	100,00
Jawa Tengah	6,28	31,90	37,42	2,06	29,56	1,12	2,58	100,00
DI Yogyakarta	15,25	40,40	24,37	1,07	27,30	1,39	1,41	100,00
Jawa Timur	8,71	30,03	32,18	2,65	33,78	2,30	3,88	100,00
Banten	13,80	28,58	36,99	4,78	22,99	0,94	3,61	100,00
B a l i	6,20	47,98	31,04	0,67	25,06	4,28	2,50	100,00
Nusa Tenggara Barat	4,47	28,34	57,04	1,42	21,89	1,94	4,75	100,00
Nusa Tenggara Timur	6,63	9,36	69,94	5,95	11,86	1,01	11,64	100,00
Kalimantan Barat	5,89	26,04	45,14	2,95	23,37	1,04	5,20	100,00
Kalimantan Tengah	8,57	15,48	63,22	1,14	18,17	2,75	2,53	100,00
Kalimantan Selatan	9,65	17,56	41,49	1,05	36,47	2,60	6,68	100,00
Kalimantan Timur	18,16	21,97	54,88	2,38	10,85	2,66	1,06	100,00
Sulawesi Utara	12,04	36,90	35,97	1,78	27,82	-	0,54	100,00
Sulawesi Tengah	13,21	21,52	54,75	2,33	18,35	-	7,49	100,00
Sulawesi Selatan	15,29	20,72	56,93	0,62	17,17	0,46	4,62	100,00
Sulawesi Tenggara	6,63	16,91	54,71	2,67	19,12	5,67	10,43	100,00
Gorontalo	6,69	30,43	55,10	1,09	24,46	2,17	2,17	100,00
Maluku	12,63	18,48	54,61	1,40	7,79	-	17,04	100,00
Maluku Utara	12,01	17,50	44,10	2,20	23,74	-	13,44	100,00
Papua	15,72	9,03	77,13	5,14	2,72	-	0,88	100,00
INDONESIA	10,72	30,66	39,50	2,80	26,10	1,83	4,06	100,00

Sumber : BPS - Susenas 2004

Tabel 6.1 TPAK Penduduk Lansia menurut Propinsi dan Tipe Daerah, 2004

Propinsi	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Nanggroe Aceh Darusalam	34,41	58,75	53,07
Sumatera Utara	43,04	63,40	55,60
Sumatera Barat	31,88	47,63	43,68
R i a u	38,93	56,92	50,25
J a m b i	37,56	63,85	56,49
Sumatera Selatan	39,69	61,07	54,26
Bengkulu	45,59	59,43	56,16
Lampung	47,34	59,89	57,57
Bangka Belitung	41,46	57,78	50,29
DKI Jakarta	39,73	-	39,73
Jawa Barat	45,84	55,81	51,47
Jawa Tengah	46,89	57,57	53,44
DI Yogyakarta	50,26	72,00	61,11
Jawa Timur	45,16	55,69	51,72
Banten	48,09	55,18	52,00
B a l i	47,76	53,50	51,17
Nusa Tenggara Barat	48,46	51,99	50,62
Nusa Tenggara Timur	33,85	59,87	57,11
Kalimantan Barat	34,67	55,99	49,17
Kalimantan Tengah	38,23	60,56	55,27
Kalimantan Selatan	38,41	60,50	52,82
Kalimantan Timur	37,23	59,27	49,04
Sulawesi Utara	45,30	45,48	45,41
Sulawesi Tengah	40,21	52,70	50,83
Sulawesi Selatan	33,58	44,48	41,74
Sulawesi Tenggara	38,49	66,61	61,81
Gorontalo	37,61	48,96	46,25
Maluku	24,33	51,55	45,25
Maluku Utara	27,79	56,05	49,08
Papua	30,27	63,42	53,55
INDONESIA	44,22	56,52	51,81

Sumber : BPS - Susenas 2004

Tabel 6.2. Persentase Penduduk Lansia yang Bekerja menurut Propinsi dan, Jenis Kelamin, 2004

Propinsi	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Nanggroe Aceh Darusalam	70,24	27,65	48,00
Sumatera Utara	64,55	35,80	49,33
Sumatera Barat	61,52	19,77	37,67
R i a u	66,18	15,01	43,07
J a m b i	71,17	28,89	51,20
Sumatera Selatan	66,77	30,53	48,92
Bengkulu	66,70	34,38	51,19
Lampung	75,03	28,72	53,59
Bangka Belitung	65,35	20,07	42,15
DKI Jakarta	42,30	11,54	27,34
Jawa Barat	66,29	20,60	43,26
Jawa Tengah	67,69	33,01	48,87
DI Yogyakarta	69,42	49,09	58,33
Jawa Timur	65,29	28,91	45,02
Banten	59,03	21,41	40,39
B a l i	60,00	32,81	45,96
Nusa Tenggara Barat	66,66	27,84	46,27
Nusa Tenggara Timur	70,54	39,65	54,82
Kalimantan Barat	62,61	24,94	44,44
Kalimantan Tengah	66,77	33,22	51,68
Kalimantan Selatan	65,30	34,00	48,40
Kalimantan Timur	60,77	17,19	40,93
Sulawesi Utara	57,93	15,18	35,65
Sulawesi Tengah	68,53	23,64	47,74
Sulawesi Selatan	61,74	14,80	36,33
Sulawesi Tenggara	76,47	42,42	59,68
Gorontalo	65,30	17,05	39,36
Maluku	56,10	23,81	39,93
Maluku Utara	68,20	22,05	45,93
Papua	64,81	26,58	50,20
INDONESIA	65,37	27,75	45,59

Sumber : BPS - Susenas 2004

Tabel 6.3.1. Persentase Penduduk Lansia yang Bekerja menurut Propinsi dan Lapangan Usaha, 2004

Propinsi	Pertanian	Industri*)	Jasa-jasa*)	Perkotaan
				Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nanggroe Aceh Darusalam	25,12	14,89	59,97	100,00
Sumatera Utara	27,54	14,44	58,02	100,00
Sumatera Barat	35,34	8,69	55,97	100,00
R i a u	28,05	20,39	51,57	100,00
J a m b i	38,15	9,53	52,33	100,00
Sumatera Selatan	30,11	13,59	56,30	100,00
Bengkulu	55,47	5,60	38,94	100,00
Lampung	50,10	8,62	41,28	100,00
Bangka Belitung	32,22	25,97	41,80	100,00
DKI Jakarta	2,37	10,61	87,02	100,00
Jawa Barat	39,43	12,30	48,27	100,00
Jawa Tengah	46,89	14,25	38,86	100,00
DI Yogyakarta	53,56	11,43	35,00	100,00
Jawa Timur	41,90	8,63	49,47	100,00
Banten	18,96	14,07	66,97	100,00
B a l i	49,11	13,68	37,20	100,00
Nusa Tenggara Barat	50,58	18,33	31,08	100,00
Nusa Tenggara Timur	41,06	17,26	41,68	100,00
Kalimantan Barat	29,10	18,53	52,37	100,00
Kalimantan Tengah	39,38	15,58	45,04	100,00
Kalimantan Selatan	16,10	22,45	61,45	100,00
Kalimantan Timur	20,96	21,92	57,12	100,00
Sulawesi Utara	27,51	9,06	63,43	100,00
Sulawesi Tengah	32,16	10,84	57,00	100,00
Sulawesi Selatan	24,90	7,77	67,33	100,00
Sulawesi Tenggara	35,14	4,90	59,97	100,00
Gorontalo	18,80	16,82	64,37	100,00
Maluku	37,27	10,76	51,97	100,00
Maluku Utara	56,93	3,09	39,97	100,00
Papua	21,04	12,85	66,10	100,00
INDONESIA	38,59	12,22	49,18	100,00

Sumber : BPS - Susenas 2004

Catatan :

Industri *) : Termasuk sektor industri, pertambangan dan penggalian listrik, gas dan air minum ; Konstruksi

Jasa-Jasa *) : Termasuk sektor Perdagangan, transportasi dan komunikasi Keuangan, jasa-jasa, lainnya

Tabel 6.3.2. Persentase Penduduk Lansia yang Bekerja menurut Propinsi dan Lapangan Usaha, 2004

Propinsi	Pertanian	Industri*)	Jasa-jasa*)	Perdesaan
				Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nanggroe Aceh Darusalam	79,21	7,33	13,46	100,00
Sumatera Utara	85,80	4,48	9,72	100,00
Sumatera Barat	76,67	5,09	18,24	100,00
R i a u	86,46	3,42	10,11	100,00
J a m b i	88,31	2,10	9,59	100,00
Sumatera Selatan	89,03	3,24	7,74	100,00
Bengkulu	92,65	2,21	5,14	100,00
Lampung	88,22	3,00	8,78	100,00
Bangka Belitung	73,91	16,27	9,82	100,00
DKI Jakarta	-	-	-	-
Jawa Barat	80,40	6,26	13,33	100,00
Jawa Tengah	81,03	6,51	12,47	100,00
DI Yogyakarta	84,30	6,35	9,36	100,00
Jawa Timur	81,77	4,35	13,88	100,00
Banten	80,37	5,91	13,72	100,00
B a l i	78,20	10,20	11,59	100,00
Nusa Tenggara Barat	79,83	8,57	11,60	100,00
Nusa Tenggara Timur	93,52	4,24	2,23	100,00
Kalimantan Barat	90,26	2,28	7,46	100,00
Kalimantan Tengah	85,74	5,51	8,75	100,00
Kalimantan Selatan	81,14	6,20	12,66	100,00
Kalimantan Timur	84,44	4,18	11,38	100,00
Sulawesi Utara	80,05	4,92	15,04	100,00
Sulawesi Tengah	89,36	3,04	7,60	100,00
Sulawesi Selatan	89,34	2,52	8,13	100,00
Sulawesi Tenggara	88,64	3,98	7,39	100,00
Gorontalo	75,49	6,03	18,47	100,00
Maluku	87,08	5,31	7,61	100,00
Maluku Utara	90,51	5,06	4,43	100,00
Papua	89,37	1,49	9,13	100,00
INDONESIA	83,02	5,25	11,74	100,00

Sumber : BPS - Susenas 2004

Catatan :

Industri *) : Termasuk sektor industri, pertambangan dan penggalian listrik, gas dan air minum ; Konstruksi

Jasa-Jasa *) : Termasuk sektor Perdagangan, transportasi dan komunikasi Keuangan, jasa-jasa, lainnya

Tabel 6.3.3. Persentase Penduduk Lansia yang Bekerja menurut Propinsi dan Lapangan Usaha, 2004

Perkotaan + Perdesaan				
Propinsi	Pertanian	Industri*)	Jasa-jasa*)	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nanggroe Aceh Darusalam	71,57	8,39	20,02	100,00
Sumatera Utara	70,78	7,04	22,18	100,00
Sumatera Barat	70,00	5,67	24,34	100,00
R i a u	71,91	7,65	20,44	100,00
J a m b i	79,90	3,35	16,75	100,00
Sumatera Selatan	76,46	5,44	18,09	100,00
Bengkulu	86,69	2,75	10,54	100,00
Lampung	82,90	3,80	13,31	100,00
Bangka Belitung	59,56	19,61	20,83	100,00
DKI Jakarta	2,37	10,61	87,02	100,00
Jawa Barat	66,12	8,38	25,52	100,00
Jawa Tengah	69,98	9,01	21,00	100,00
DI Yogyakarta	72,05	8,38	19,57	100,00
Jawa Timur	69,80	5,64	24,55	100,00
Banten	57,40	8,96	33,64	100,00
B a l i	67,99	11,43	20,59	100,00
Nusa Tenggara Barat	69,72	11,94	18,34	100,00
Nusa Tenggara Timur	90,77	4,92	4,30	100,00
Kalimantan Barat	77,56	5,66	16,79	100,00
Kalimantan Tengah	78,56	7,07	14,37	100,00
Kalimantan Selatan	65,68	10,07	24,26	100,00
Kalimantan Timur	64,70	9,69	25,60	100,00
Sulawesi Utara	61,42	6,39	32,20	100,00
Sulawesi Tengah	83,49	3,84	12,66	100,00
Sulawesi Selatan	78,24	3,43	18,33	100,00
Sulawesi Tenggara	83,20	4,07	12,73	100,00
Gorontalo	66,79	7,69	25,52	100,00
Maluku	82,64	5,80	11,56	100,00
Maluku Utara	86,90	4,85	8,25	100,00
Papua	78,73	3,27	18,01	100,00
INDONESIA	69,82	7,32	22,86	100,00

Sumber : BPS - Susenas 2004

Catatan :

Industri *) : Termasuk sektor industri, pertambangan dan penggalian listrik, gas dan air minum ; Konstruksi

Jasa-Jasa *) : Termasuk sektor Perdagangan, transportasi dan komunikasi keuangan, jasa-jasa, lainnya

Tabel 6.4.1. Persentase Penduduk Lansia yang Bekerja menurut Propinsi dan Status Pekerjaan, 2004

Propinsi	Status Pekerjaan					Perkotaan
	Berusaha sendiri	Berusaha dgn buruh	Buruh/ Karyawan	Pekerja bebas	Pekerja tdk dibayar	Jumlah
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nanggroe Aceh Darusalam	47,29	31,54	13,86	2,35	4,96	100,00
Sumatera Utara	39,30	29,15	20,97	3,61	6,97	100,00
Sumatera Barat	48,93	27,75	16,83	2,68	3,81	100,00
R i a u	47,83	23,23	18,57	5,98	4,40	100,00
J a m b i	44,69	34,23	9,66	5,65	5,76	100,00
Sumatera Selatan	40,45	25,25	20,58	3,65	10,07	100,00
Bengkulu	39,98	32,99	6,95	7,88	12,20	100,00
Lampung	33,48	35,57	20,25	4,63	6,08	100,00
Bangka Belitung	40,11	31,71	18,38	4,03	5,77	100,00
DKI Jakarta	37,42	28,20	31,00	2,04	1,35	100,00
Jawa Barat	34,70	31,27	15,70	13,81	4,52	100,00
Jawa Tengah	33,69	33,57	10,78	13,55	8,40	100,00
DI Yogyakarta	29,50	44,05	8,34	9,17	8,93	100,00
Jawa Timur	38,87	31,04	13,69	10,03	6,36	100,00
Banten	52,54	20,24	17,39	5,53	4,28	100,00
B a l i	41,44	28,11	12,34	5,16	12,95	100,00
Nusa Tenggara Barat	39,13	34,28	14,10	7,14	5,34	100,00
Nusa Tenggara Timur	35,84	41,41	11,63	1,85	9,26	100,00
Kalimantan Barat	42,20	32,88	16,57	4,51	3,83	100,00
Kalimantan Tengah	45,06	40,56	7,99	2,95	3,44	100,00
Kalimantan Selatan	56,47	18,72	16,74	5,13	2,95	100,00
Kalimantan Timur	41,43	21,27	23,33	9,18	4,78	100,00
Sulawesi Utara	46,98	28,11	13,54	4,75	6,62	100,00
Sulawesi Tengah	38,12	32,07	13,53	6,57	9,71	100,00
Sulawesi Selatan	49,46	27,38	18,90	0,50	3,76	100,00
Sulawesi Tenggara	49,98	30,32	7,08	3,52	9,10	100,00
Gorontalo	59,77	16,82	19,02	4,39	-	100,00
Maluku	54,53	34,98	10,49	-	-	100,00
Maluku Utara	45,93	45,02	3,09	5,96	-	100,00
Papua	59,81	30,97	9,22	-	-	100,00
INDONESIA	37,68	31,45	14,92	9,61	6,33	100,00

Sumber : BPS - Susenas 2004

Tabel 6.4.2. Persentase Penduduk Lansia yang Bekerja menurut Propinsi dan Status Pekerjaan, 2004

Propinsi	Status Pekerjaan					Perdesaan
	Berusaha sendiri	Berusaha dgn buruh	Buruh/ Karyawan	Pekerja bebas	Pekerja tdk dibayar	Jumlah
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nanggroe Aceh Darusalam	42,23	42,22	5,18	4,56	5,82	100,00
Sumatera Utara	26,75	46,58	5,73	4,44	16,49	100,00
Sumatera Barat	37,49	39,12	6,35	6,58	10,46	100,00
R i a u	47,41	31,96	8,40	7,34	4,87	100,00
J a m b i	38,84	44,64	3,51	2,76	10,25	100,00
Sumatera Selatan	26,66	51,57	2,68	3,60	15,50	100,00
Bengkulu	20,37	53,26	0,83	5,09	20,45	100,00
Lampung	27,20	45,85	5,73	6,68	14,54	100,00
Bangka Belitung	48,59	26,64	9,27	7,75	7,75	100,00
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	22,65	45,53	7,61	16,76	7,44	100,00
Jawa Tengah	20,80	47,20	4,43	11,85	15,72	100,00
DI Yogyakarta	13,55	51,71	2,78	6,28	25,68	100,00
Jawa Timur	24,75	41,73	6,50	14,60	12,42	100,00
Banten	28,68	48,04	7,44	10,12	5,72	100,00
B a l i	36,54	37,38	2,51	2,04	21,54	100,00
Nusa Tenggara Barat	21,18	51,37	1,34	10,78	15,32	100,00
Nusa Tenggara Timur	15,83	57,28	1,18	2,13	23,57	100,00
Kalimantan Barat	27,79	52,96	2,32	0,95	15,98	100,00
Kalimantan Tengah	32,51	46,98	2,53	2,69	15,29	100,00
Kalimantan Selatan	38,11	43,65	3,80	3,77	10,68	100,00
Kalimantan Timur	34,68	41,30	6,33	5,99	11,70	100,00
Sulawesi Utara	40,93	46,09	1,23	4,04	7,70	100,00
Sulawesi Tengah	33,21	50,94	3,48	1,52	10,85	100,00
Sulawesi Selatan	34,96	53,08	1,97	1,48	8,52	100,00
Sulawesi Tenggara	32,20	50,31	0,22	1,22	16,04	100,00
Gorontalo	51,28	32,71	6,43	3,00	6,58	100,00
Maluku	44,69	36,12	4,22	-	14,96	100,00
Maluku Utara	34,64	54,97	0,41	1,49	8,49	100,00
Papua	28,46	53,09	2,70	3,22	12,52	100,00
INDONESIA	25,89	45,79	5,12	10,04	13,16	100,00

Sumber : BPS - Susenas 2004

Tabel 6.4.3. Persentase Penduduk Lansia yang Bekerja menurut Propinsi dan Status Pekerjaan, 2004

Propinsi	Status Pekerjaan					Jumlah
	Berusaha sendiri	Berusaha dgn buruh	Buruh/ Karyawan	Pekerja bebas	Pekerja tdk dibayar	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Perkotaan + Perdesaan						
Nanggroe Aceh Darusalam	42,94	40,70	6,40	4,25	5,70	100,00
Sumatera Utara	29,99	42,09	9,66	4,23	14,04	100,00
Sumatera Barat	39,34	37,28	8,05	5,94	9,39	100,00
R i a u	47,52	29,79	10,93	7,01	4,75	100,00
J a m b i	39,82	42,89	4,54	3,25	9,50	100,00
Sumatera Selatan	29,60	45,96	6,50	3,61	14,34	100,00
Bengkulu	23,52	50,01	1,81	5,53	19,13	100,00
Lampung	28,08	44,42	7,76	6,39	13,36	100,00
Bangka Belitung	45,67	28,39	12,41	6,47	7,07	100,00
DKI Jakarta	37,42	28,20	31,00	2,04	1,35	100,00
Jawa Barat	26,85	40,56	10,43	15,74	6,43	100,00
Jawa Tengah	24,98	42,79	6,48	12,41	13,35	100,00
DI Yogyakarta	19,91	48,67	4,99	7,43	19,01	100,00
Jawa Timur	28,99	38,53	8,66	13,23	10,60	100,00
Banten	37,60	37,65	11,16	8,41	5,18	100,00
B a l i	38,26	34,12	5,96	3,13	18,53	100,00
Nusa Tenggara Barat	27,38	45,47	5,75	9,52	11,87	100,00
Nusa Tenggara Timur	16,88	56,45	1,73	2,12	22,82	100,00
Kalimantan Barat	30,78	48,79	5,28	1,69	13,46	100,00
Kalimantan Tengah	34,45	45,99	3,37	2,73	13,46	100,00
Kalimantan Selatan	42,47	37,73	6,87	4,09	8,84	100,00
Kalimantan Timur	36,78	35,06	11,62	6,98	9,55	100,00
Sulawesi Utara	43,08	39,71	5,59	4,30	7,32	100,00
Sulawesi Tengah	33,71	49,01	4,51	2,03	10,74	100,00
Sulawesi Selatan	37,46	48,65	4,88	1,31	7,70	100,00
Sulawesi Tenggara	34,01	48,28	0,92	1,46	15,34	100,00
Gorontalo	52,58	30,27	8,36	3,22	5,57	100,00
Maluku	45,57	36,03	4,78	-	13,63	100,00
Maluku Utara	35,85	53,90	0,70	1,97	7,58	100,00
Papua		49,65	3,72	2,72	10,57	100,00
INDONESIA	29,40	41,52	8,03	9,92	11,13	100,00

Sumber : BPS - Susenas 2004

Tabel 6.5.1. Persentase Penduduk Lansia yang Bekerja menurut Propinsi,
Jenis Kelamin dan Jam Kerja Selama Seminggu yang Lalu, 2004

Propinsi	Perkotaan											
	Jenis Kelamin/ Jam kerja											
	Laki-laki				Perempuan				Laki-laki+Perempuan			
	0	1-14	15-34	35-98	0	1-14	15-34	35-98	0	1-14	15-34	35-98
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Nanggroe Aceh Darusalam	-	1,29	28,08	70,63	6,46	18,94	43,72	30,88	1,17	4,48	30,91	63,45
Sumatera Utara	1,19	5,56	21,32	71,93	2,49	5,49	36,57	55,45	1,61	5,53	26,23	66,63
Sumatera Barat	2,12	6,74	26,46	64,68	4,12	19,65	25,23	51,01	2,66	10,23	26,12	60,99
R i a u	1,05	1,56	24,15	73,24	2,66	6,67	36,90	53,76	1,29	2,33	26,06	70,32
J a m b i	1,67	0,81	22,88	74,63	-	-	10,09	76,20	4,04	0,65	20,37	74,94
Sumatera Selatan	-	3,46	20,46	76,09	-	4,96	47,10	47,94	-	3,94	29,04	67,02
Bengkulu	2,10	6,50	29,54	61,86	-	6,31	48,88	44,81	1,58	6,45	34,36	57,61
Lampung	2,85	8,26	19,64	69,25	-	16,60	30,08	53,32	2,14	10,34	22,23	65,29
Bangka Belitung	2,64	6,50	34,64	56,21	-	25,88	32,67	29,83	4,61	10,74	34,21	50,44
DKI Jakarta	2,15	9,10	11,07	77,67	1,40	4,99	15,29	78,32	2,00	8,26	11,94	77,81
Jawa Barat	6,63	4,28	30,59	58,50	5,68	12,88	40,71	40,72	6,40	6,33	33,01	54,25
Jawa Tengah	5,65	8,77	33,82	51,76	4,97	13,53	36,55	44,96	5,39	10,60	34,86	49,15
DI Yogyakarta	4,43	15,64	36,33	43,60	1,21	13,20	44,91	40,68	3,04	14,59	40,02	42,34
Jawa Timur	4,35	9,60	32,89	53,16	4,78	13,68	32,83	48,71	4,51	11,08	32,87	51,54
Banten	7,83	5,10	18,13	68,94	5,57	12,23	38,89	43,31	7,36	6,57	22,41	63,66
B a l i	2,74	6,04	32,70	58,52	2,89	11,03	30,79	55,29	2,79	7,83	32,02	57,36
Nusa Tenggara Barat	8,46	15,36	29,05	47,12	-	4,69	31,58	43,84	-	12,06	29,83	46,11
Nusa Tenggara Timur	4,94	5,80	34,52	54,74	2,94	21,30	33,11	42,66	4,25	11,12	34,04	50,60
Kalimantan Barat	1,98	4,15	21,87	72,01	3,76	15,57	50,92	29,76	2,40	6,88	28,80	61,92
Kalimantan Tengah	3,89	6,92	13,27	75,92	-	11,50	30,72	57,78	2,80	8,20	18,16	70,83
Kalimantan Selatan	0,55	8,26	24,33	66,86	5,69	9,12	27,52	57,67	2,27	8,55	25,40	63,78
Kalimantan Timur	5,52	0,46	13,73	80,29	-	3,10	17,53	79,37	4,69	0,86	14,30	80,15
Sulawesi Utara	3,17	9,50	37,63	49,70	-	3,38	45,81	50,81	2,03	7,29	40,57	50,10
Sulawesi Tengah	9,64	7,52	19,94	62,90	-	4,68	47,75	47,57	5,93	6,43	30,64	57,00
Sulawesi Selatan	5,00	9,61	21,68	63,70	5,40	10,54	26,39	57,67	5,10	9,84	22,85	62,21
Sulawesi Tenggara	2,46	10,31	25,43	61,81	4,61	5,28	50,21	39,89	3,02	8,99	31,92	56,06
Gorontalo	3,07	11,11	23,39	62,44	-	-	23,08	76,92	2,19	7,94	23,30	66,57
Maluku	11,56	5,42	23,30	59,72	-	-	52,52	47,48	8,01	3,75	32,28	55,96
Maluku Utara	4,10	7,89	44,16	43,86	-	-	25,23	74,77	3,09	5,96	39,52	51,43
Papua	9,61	.	12,50	77,89	-	-	15,29	84,71	7,84	-	13,01	79,15
INDONESIA	4,71	7,66	28,88	58,74	4,55	12,17	35,59	47,69	4,66	9,09	31,01	55,24

Sumber : BPS - Susenas 2004

Tabel 6.5.2. Persentase Penduduk Lansia yang Bekerja menurut Propinsi, Jenis Kelamin dan Jam Kerja Selama Seminggu yang Lalu, 2004

Propinsi	Perdesaan											
	Jenis Kelamin/ Jam kerja											
	Laki-laki				Perempuan				Laki-laki+Perempuan			
	0	1-14	15-34	35-98	0	1-14	15-34	35-98	0	1-14	15-34	35-98
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Nanggroe Aceh Darusalam	3,66	5,32	38,35	52,67	3,35	14,20	54,62	27,83	3,56	8,17	43,56	44,70
Sumatera Utara	2,56	7,25	45,97	44,21	2,87	11,93	54,42	30,78	2,69	9,15	49,40	38,76
Sumatera Barat	5,08	6,40	41,58	46,94	6,21	11,75	50,02	32,02	5,43	8,03	44,16	42,38
R i a u	1,98	9,96	42,85	45,21	4,52	18,74	46,20	30,55	2,38	11,36	43,39	42,87
J a m b i	1,52	4,53	40,08	53,87	2,51	7,69	50,51	39,29	1,80	5,42	43,01	49,78
Sumatera Selatan	4,07	4,18	47,15	44,60	4,50	9,29	53,69	32,52	4,20	5,73	49,14	40,94
Bengkulu	3,19	2,85	35,20	58,76	8,43	4,72	43,52	43,33	4,95	3,48	38,00	53,57
Lampung	3,77	5,37	32,67	58,19	5,76	10,40	44,46	39,38	4,26	6,62	35,59	53,53
Bangka Belitung	3,07	3,56	50,37	43,01	4,43	15,43	72,78	7,36	3,42	6,61	56,13	33,84
DKI Jakarta			-	-			-	-			-	-
Jawa Barat	7,68	8,33	44,42	39,57	9,36	14,87	46,17	29,60	8,08	9,91	44,84	37,17
Jawa Tengah	6,21	8,13	41,15	44,50	4,95	16,34	49,84	28,87	5,76	11,08	44,27	38,90
DI Yogyakarta	2,93	7,00	27,19	62,88	1,28	10,73	42,02	45,97	2,14	8,78	34,29	54,79
Jawa Timur	4,89	10,18	42,01	42,92	6,54	17,58	49,20	26,68	5,48	12,81	44,56	37,15
Banten	7,50	8,19	53,30	31,00	18,59	20,00	45,41	16,00	10,79	11,69	50,96	26,55
B a l i	3,24	8,99	36,85	50,92	1,44	17,94	48,53	32,08	2,57	12,34	41,21	43,89
Nusa Tenggara Barat	19,12	12,69	35,73	32,45	17,46	26,95	36,03	19,55	18,59	17,25	35,83	28,33
Nusa Tenggara Timur	6,65	7,71	50,63	35,01	10,63	12,55	55,95	20,88	8,12	9,50	52,59	29,79
Kalimantan Barat	4,44	5,84	41,48	48,24	3,88	9,73	40,95	45,45	4,28	6,92	41,33	47,46
Kalimantan Tengah	1,35	1,64	38,86	58,15	1,82	3,74	62,98	31,45	1,48	2,25	45,88	50,39
Kalimantan Selatan	5,82	8,86	41,10	44,22	11,86	11,36	51,39	25,39	8,19	9,84	45,14	36,83
Kalimantan Timur	1,41	2,50	35,71	60,38	3,39	18,79	37,86	39,96	1,83	5,92	36,16	56,10
Sulawesi Utara	7,28	9,41	48,97	34,34	1,35	20,37	51,42	26,85	6,41	11,01	49,33	33,25
Sulawesi Tengah	8,72	11,92	39,55	39,81	11,84	30,01	39,09	19,06	9,38	15,75	39,45	35,42
Sulawesi Selatan	6,90	15,70	47,36	30,04	9,46	24,87	49,06	16,61	7,45	17,67	47,73	27,15
Sulawesi Tenggara	9,74	6,05	45,71	38,49	9,93	16,02	46,07	27,98	9,81	9,64	45,84	34,71
Gorontalo	6,51	12,34	27,99	53,16	6,15	20,87	56,47	16,51	6,43	14,24	34,35	44,98
Maluku	.	1,28	50,37	48,35	6,98	7,93	46,88	38,21	2,08	3,26	49,33	45,33
Maluku Utara	1,89	7,74	45,77	44,60	8,74	8,74	58,58	23,95	3,46	7,97	48,72	39,85
Papua	3,99	5,82	55,06	35,12	2,50	11,70	59,47	26,33	3,69	7,03	55,97	33,32
INDONESIA	5,67	8,42	42,23	43,68	6,38	15,45	48,99	29,19	5,90	10,68	44,40	39,02

Sumber : BPS - Susenas 2004

Tabel 6.5.3. Persentase Penduduk Lansia yang Bekerja menurut Propinsi, Jenis Kelamin dan Jam Kerja Selama Seminggu yang Lalu, 2004

Propinsi	Perkotaan + Perdesaan											
	Jenis Kelamin/ Jam kerja											
	Laki-laki				Perempuan				Laki-laki+Perempuan			
(1)	0	1-14	15-34	35-98	0	1-14	15-34	35-98	0	1-14	15-34	35-98
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Nanggroe Aceh Darusalam	3,06	4,66	36,65	55,64	3,61	14,60	53,69	28,09	3,22	7,65	41,78	47,35
Sumatera Utara	2,17	6,77	38,97	52,08	2,79	10,54	50,57	36,11	2,41	8,22	43,43	45,94
Sumatera Barat	4,59	6,45	39,03	49,93	5,90	12,90	46,41	34,78	4,98	8,39	41,25	45,39
R i a u	1,74	7,85	38,15	52,25	4,08	15,87	44,00	36,05	2,11	9,11	39,07	49,70
J a m b i	1,55	3,85	36,92	57,68	3,89	6,74	45,52	43,85	2,18	4,62	39,22	53,99
Sumatera Selatan	3,22	4,03	41,58	51,18	3,50	8,33	52,21	35,96	3,30	5,35	44,85	46,50
Bengkulu	3,00	3,50	34,20	59,31	7,39	4,92	44,18	43,51	4,41	3,96	37,42	54,22
Lampung	3,64	5,77	30,85	59,73	4,96	11,27	42,45	41,33	3,97	7,14	33,73	55,17
Bangka Belitung	2,92	4,61	44,78	47,70	6,65	18,65	60,40	14,29	3,83	8,03	48,59	39,55
DKI Jakarta	2,15	9,10	11,07	77,67	1,40	4,99	15,29	78,32	2,00	8,26	11,94	77,81
Jawa Barat	7,31	6,92	39,60	46,18	8,09	14,18	44,28	33,45	7,50	8,66	40,72	43,12
Jawa Tengah	6,03	8,34	38,84	46,79	4,96	15,39	45,34	34,32	5,64	10,92	41,23	42,22
DI Yogyakarta	3,56	10,63	31,03	54,79	1,25	11,65	43,10	43,99	2,50	11,10	36,57	49,83
Jawa Timur	4,73	10,01	39,29	45,97	6,00	16,39	44,21	33,39	5,19	12,29	41,05	41,47
Banten	7,63	6,94	39,14	46,28	14,77	17,72	43,50	24,01	9,51	9,77	40,29	40,43
B a l i	3,06	7,94	35,37	53,63	1,94	15,58	42,46	40,03	2,65	10,75	37,98	48,62
Nusa Tenggara Barat	15,40	13,63	33,40	37,57	18,29	19,42	34,53	27,77	16,31	15,46	33,76	34,47
Nusa Tenggara Timur	6,56	7,60	49,75	36,09	10,25	12,98	54,83	21,94	7,92	9,58	51,62	30,88
Kalimantan Barat	3,90	5,47	37,23	53,39	3,86	10,80	42,77	42,57	3,89	6,91	38,73	50,46
Kalimantan Tengah	1,74	2,47	34,85	60,94	1,55	4,91	58,14	35,41	1,69	3,17	41,58	53,55
Kalimantan Selatan	4,48	8,70	36,83	49,99	10,56	10,89	46,37	32,18	6,78	9,53	40,45	43,23
Kalimantan Timur	2,75	1,83	28,53	66,89	2,56	14,96	32,90	49,57	2,72	4,34	29,36	63,58
Sulawesi Utara	6,08	9,43	45,66	38,82	0,57	10,60	48,19	40,64	4,86	9,69	46,22	39,23
Sulawesi Tengah	8,79	11,56	37,94	41,70	9,81	25,65	40,58	23,96	9,03	14,79	38,55	37,63
Sulawesi Selatan	6,58	14,69	43,09	35,63	8,67	22,09	44,67	24,57	7,04	16,32	43,44	33,19
Sulawesi Tenggara	8,90	6,54	43,37	41,19	9,53	15,20	46,38	28,89	9,12	9,58	44,42	36,88
Gorontalo	6,02	12,16	27,33	54,49	4,99	16,95	50,19	27,87	5,78	13,28	32,65	48,29
Maluku	1,02	1,64	47,98	49,36	6,34	7,20	47,40	39,06	2,61	3,30	47,81	46,28
Maluku Utara	2,12	7,76	45,60	44,52	7,74	7,74	54,79	29,73	3,42	7,75	47,73	41,09
Papua	4,89	4,89	48,28	41,93	2,15	10,04	53,21	34,60	4,33	5,94	49,28	40,45
INDONESIA	5,39	8,20	38,24	48,17	5,84	14,48	45,04	34,64	5,53	10,21	40,42	43,84

Sumber : BPS - Susenas 2004

Tabel 7.1.1. Persentase Penduduk Lansia yang Membaca Buku, Majalah dan Surat Kabar menurut Propinsi dan Jenis Kelamin, 2003

Propinsi	Perkotaan								
	Membaca Buku			Membaca Majalah			Membaca Koran		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Nanggroe Aceh Darusalam	10,00	4,17	6,82	6,67	2,78	4,55	51,68	2,78	25,01
Sumatera Utara	4,85	1,51	3,03	7,27	2,02	4,41	46,67	8,08	25,62
Sumatera Barat	8,34	6,18	7,18	7,14	4,12	5,52	29,76	6,18	17,13
R i a u	4,28	3,28	3,81	10,00	3,28	6,87	39,99	4,92	23,66
J a m b i	2,27	.	1,02	6,82	5,55	6,12	18,18	5,56	11,23
Sumatera Selatan	10,00	7,15	8,54	2,50	.	1,22	32,51	8,33	20,13
Bengkulu	19,45	9,30	13,93	2,78	.	1,27	36,12	11,63	22,79
Lampung	6,06	3,08	4,58	10,61	9,23	9,93	24,25	10,77	17,56
Bangka Belitung	3,57	.	1,74	3,58	1,69	2,61	28,59	5,08	16,53
DKI Jakarta	2,79	4,67	3,62	17,65	13,62	15,86	56,34	18,29	39,48
Jawa Barat	1,97	1,06	1,56	4,15	3,19	3,72	24,45	5,32	15,83
Jawa Tengah	2,76	1,03	1,80	4,42	2,36	3,27	15,47	4,27	9,25
DI Yogyakarta	5,36	2,98	4,02	8,42	8,05	8,21	26,04	13,72	19,11
Jawa Timur	2,28	0,67	1,40	3,75	2,54	3,09	25,94	7,90	16,03
Banten	4,88	1,27	3,11	10,98	5,07	8,08	32,93	12,66	22,99
B a l i	3,35	1,12	2,24	3,35	2,23	2,79	21,79	4,47	13,13
Nusa Tenggara Barat	1,75	0,78	1,23	4,39	.	2,06	19,30	2,33	10,29
Nusa Tenggara Timur	4,55	.	2,44	4,55	.	2,44	31,80	7,89	20,72
Kalimantan Barat	1,49	1,56	1,53	2,99	.	1,53	43,28	9,38	26,72
Kalimantan Tengah	5,27	.	2,64	15,80	.	7,90	36,85	10,53	23,69
Kalimantan Selatan	6,41	3,09	4,57	3,85	1,03	2,29	50,00	6,19	25,72
Kalimantan Timur	2,17	.	1,26	8,69	.	5,06	32,61	3,03	20,25
Sulawesi Utara	17,31	7,14	12,04	9,62	1,78	5,56	51,92	12,50	31,48
Sulawesi Tengah	4,00	.	2,17	.	.	.	20,00	14,29	17,39
Sulawesi Selatan	3,39	0,76	2,01	5,93	1,53	3,61	21,19	3,05	11,65
Sulawesi Tenggara	23,10	14,83	17,52	.	3,71	2,50	15,40	3,71	7,51
Gorontalo	.	.	.	12,50	6,45	8,51	31,25	16,13	21,28
Maluku	16,64	3,22	9,08	4,17	3,23	3,64	20,83	9,69	14,55
Maluku Utara	4,36	3,22	3,71	13,02	.	5,55	21,71	.	9,25
Papua	14,29	.	10,00	14,29	.	10,00	14,29	.	10,00
INDONESIA	3,44	1,69	2,54	6,05	3,46	4,71	28,31	7,35	17,49

Sumber : BPS - Susenas Modul 2003

Tabel 7.1.2. Persentase Penduduk Lansia yang Membaca Buku, Majalah dan Surat Kabar menurut Propinsi dan Jenis Kelamin, 2003

Propinsi	Perdesaan								
	Membaca Buku			Membaca Majalah			Membaca Koran		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Nanggroe Aceh Darusalam	1,75	2,70	2,22	3,51	0,90	2,22	21,05	1,80	11,55
Sumatera Utara	6,32	1,64	3,92	3,45	.	1,68	11,49	1,64	6,44
Sumatera Barat	5,29	1,16	2,80	2,94	1,55	2,10	14,70	2,32	7,24
R i a u	1,41	.	0,78	.	.	.	8,45	.	4,65
J a m b i	7,41	1,19	4,69	1,85	1,19	1,56	6,48	2,38	4,69
Sumatera Selatan	3,23	1,36	2,32	0,65	0,68	0,66	6,45	1,36	3,97
Bengkulu	3,23	1,18	2,25	1,08	.	0,56	1,07	.	0,56
Lampung	1,48	0,47	1,04	1,11	0,47	0,83	6,67	1,88	4,55
Bangka Belitung	1,67	.	0,91	1,67	.	0,91	11,67	.	6,36
DKI Jakarta									
Jawa Barat	1,17	.	0,62	1,37	0,44	0,93	4,50	0,88	2,80
Jawa Tengah	0,38	0,12	0,24	0,88	0,57	0,72	3,27	0,46	1,80
DI Yogyakarta	2,12	0,42	1,17	1,59	0,42	0,94	5,29	1,68	3,28
Jawa Timur	1,15	0,10	0,59	1,15	0,60	0,85	3,68	0,89	2,19
Banten	2,50	.	1,27	1,25	.	0,63	5,00	2,56	3,80
B a l i	1,31	.	0,59	1,96	0,53	1,18	6,54	1,07	3,53
Nusa Tenggara Barat	6,87	.	3,21	1,25	0,55	0,87	5,00	1,09	2,91
Nusa Tenggara Timur	1,38	0,43	0,89	1,84	.	0,89	5,99	0,87	3,35
Kalimantan Barat	3,29	2,78	3,08	3,29	1,85	2,69	7,24	1,85	5,00
Kalimantan Tengah	6,02	3,85	5,19	2,41	1,92	2,22	13,25	1,92	8,89
Kalimantan Selatan	.	.	.	3,51	.	1,68	11,40	1,61	6,30
Kalimantan Timur	.	3,22	1,41	.	.	.	5,00	.	2,82
Sulawesi Utara	3,30	1,80	2,47	6,59	1,80	3,96	23,08	7,21	14,36
Sulawesi Tengah	11,00	1,09	6,46	5,50	.	2,98	11,01	1,09	6,47
Sulawesi Selatan	3,14	0,44	1,67	1,05	.	0,48	3,66	.	1,67
Sulawesi Tenggara	2,22	3,12	2,69	.	1,04	0,54	4,44	1,04	2,69
Gorontalo	2,08	.	1,16	.	.	.	6,25	2,63	4,65
Maluku	5,99	0,99	3,48	1,00	.	0,50	2,00	.	0,99
Maluku Utara	2,70	6,67	4,48	2,70	6,67	4,48	5,41	6,67	5,97
Papua	2,44	.	1,61	.	.	.	9,76	.	6,45
INDONESIA	1,94	0,44	1,18	1,47	0,55	1,00	5,61	1,06	3,29

Sumber : BPS - Susenas Modul 2003

Tabel 7.1.3 Persentase Penduduk Lansia yang Membaca Buku, Majalah dan Surat Kabar menurut Propinsi dan Jenis Kelamin, 2003

Propinsi	Perkotaan+Perdesaan								
	Membaca Buku			Membaca Majalah			Membaca Koran		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Nanggroe Aceh Darusalam	4,07	3,18	3,62	4,40	1,51	2,93	29,66	2,12	15,64
Sumatera Utara	5,69	1,58	3,53	5,09	0,93	2,90	26,56	4,61	14,98
Sumatera Barat	6,03	2,15	3,75	3,96	2,05	2,84	18,35	3,08	9,37
R i a u	2,55	1,35	2,00	3,96	1,35	2,77	20,94	2,02	12,31
J a m b i	6,20	0,80	3,67	3,02	2,61	2,83	9,23	3,42	6,50
Sumatera Selatan	5,24	3,21	4,24	1,20	0,46	0,83	14,21	3,59	8,96
Bengkulu	7,18	3,58	5,40	1,49	.	0,75	9,61	3,44	6,56
Lampung	2,34	1,05	1,75	2,88	2,42	2,67	9,94	3,85	7,19
Bangka Belitung	2,56	.	1,32	2,56	0,90	1,76	19,62	2,69	11,43
DKI Jakarta	2,79	4,67	3,62	17,65	13,62	15,86	56,34	18,29	39,48
Jawa Barat	1,52	0,44	1,02	2,57	1,58	2,11	13,10	2,72	8,31
Jawa Tengah	1,20	0,46	0,81	2,10	1,25	1,65	7,49	1,90	4,50
DI Yogyakarta	3,79	1,75	2,65	5,10	4,38	4,70	15,96	7,93	11,46
Jawa Timur	1,56	0,31	0,89	2,10	1,33	1,68	11,81	3,54	7,33
Banten	3,61	0,59	2,13	5,81	2,36	4,11	18,09	7,27	12,76
B a l i	2,15	0,41	1,22	2,53	1,15	1,80	12,82	2,31	7,24
Nusa Tenggara Barat	4,93	0,29	2,46	2,44	0,34	1,32	10,43	1,56	5,70
Nusa Tenggara Timur	1,74	0,39	1,05	2,15	.	1,05	8,87	1,52	5,12
Kalimantan Barat	2,76	2,34	2,58	3,20	1,18	2,32	17,87	4,56	12,03
Kalimantan Tengah	5,90	2,94	4,70	4,58	1,47	3,31	17,08	3,96	11,74
Kalimantan Selatan	2,14	1,13	1,60	3,62	0,38	1,89	24,28	3,28	13,10
Kalimantan Timur	0,97	1,85	1,35	3,87	.	2,21	17,27	1,29	10,43
Sulawesi Utara	7,80	3,38	5,41	7,57	1,80	4,45	32,35	8,77	19,62
Sulawesi Tengah	9,66	0,88	5,64	4,45	.	2,41	12,73	3,60	8,55
Sulawesi Selatan	3,20	0,51	1,75	2,28	0,36	1,24	8,07	0,72	4,10
Sulawesi Tenggara	4,62	5,48	5,08	.	1,58	0,86	5,70	1,58	3,47
Gorontalo	1,68	.	0,83	2,42	2,39	2,41	11,10	7,63	9,35
Maluku	7,71	1,43	4,49	1,51	0,64	1,06	5,04	1,91	3,43
Maluku Utara	3,09	5,52	4,26	5,09	4,45	4,78	9,17	4,45	6,89
Papua	5,14	.	3,44	3,25	.	2,18	10,79	.	7,23
INDONESIA	2,50	0,91	1,69	3,18	1,65	2,40	14,09	3,45	8,64

Sumber : BPS - Susenas Modul 2003

Tabel 7.2. Persentase Penduduk Lansia yang Menonton Televisi menurut Propinsi, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2003

Propinsi	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan + Perdesaan		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Nanggroe Aceh Darusalam	78,33	56,95	66,67	53,51	23,43	38,67	60,49	34,33	47,17
Sumatera Utara	90,30	85,35	87,60	71,26	49,72	60,22	79,41	66,14	72,41
Sumatera Barat	89,29	78,35	83,43	64,12	51,17	56,31	70,22	56,49	62,14
R i a u	95,71	86,88	91,60	60,56	58,62	59,69	74,48	70,25	72,55
J a m b i	97,72	81,48	88,77	55,55	52,38	54,16	65,45	61,87	63,77
Sumatera Selatan	87,50	89,29	88,42	55,49	44,90	50,33	65,02	59,08	62,08
Bengkulu	80,56	86,05	83,55	58,06	43,53	51,12	63,54	56,12	59,87
Lampung	86,36	81,54	83,97	68,14	60,09	64,59	71,54	64,86	68,52
Bangka Belitung	89,28	74,58	81,74	76,67	58,00	68,18	82,60	66,77	74,94
DKI Jakarta	94,12	89,88	92,24				94,12	89,88	92,24
Jawa Barat	80,35	71,81	76,50	62,62	45,80	54,73	70,26	56,53	63,93
Jawa Tengah	77,53	73,78	75,45	65,53	57,24	61,20	69,68	63,47	66,36
DI Yogyakarta	84,67	81,78	83,05	65,61	58,82	61,83	75,41	70,73	72,79
Jawa Timur	87,11	78,85	82,57	66,78	57,16	61,62	74,21	65,35	69,41
Banten	82,93	82,28	82,61	53,75	41,03	47,47	67,42	60,23	63,88
B a l i	87,15	82,12	84,63	66,66	65,24	65,88	75,10	71,39	73,13
Nusa Tenggara Barat	54,39	53,49	53,91	41,87	33,33	37,31	46,62	40,93	43,59
Nusa Tenggara Timur	70,45	76,30	73,16	10,60	8,66	9,60	17,28	14,91	16,07
Kalimantan Barat	91,04	76,56	83,97	63,82	58,33	61,54	71,85	64,89	68,79
Kalimantan Tengah	84,23	73,69	78,96	54,22	46,15	51,11	59,08	52,65	56,46
Kalimantan Selatan	87,18	86,60	86,85	60,53	43,55	51,68	69,42	59,23	63,99
Kalimantan Timur	91,31	93,95	92,41	44,99	64,51	53,51	65,59	77,04	70,49
Sulawesi Utara	90,39	85,72	87,97	74,72	62,16	67,82	79,76	69,11	74,01
Sulawesi Tengah	76,00	61,90	69,57	56,88	36,95	47,76	60,54	41,71	51,92
Sulawesi Selatan	86,44	74,04	79,92	52,88	42,80	47,38	61,32	50,21	55,31
Sulawesi Tenggara	76,90	81,48	79,99	32,22	21,87	26,88	37,34	33,88	35,47
Gorontalo	62,50	67,73	65,95	39,60	23,69	32,57	44,04	40,01	42,01
Maluku	95,84	61,35	76,41	44,97	23,74	34,30	53,18	31,17	41,88
Maluku Utara	73,89	64,46	68,48	40,54	49,99	44,77	48,24	54,80	51,41
Papua	71,43	100,00	80,00	26,83	9,53	20,97	36,99	27,43	33,83
INDONESIA	83,91	77,54	80,62	61,45	50,88	56,06	69,84	61,00	65,31

Sumber : BPS - Susenas Modul 2003

Tabel 7.3. Persentase Penduduk Lansia yang Mendengarkan Radio menurut Propinsi, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2003

Propinsi	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan + Perdesaan		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Nanggroe Aceh Darusalam	38,35	18,06	27,28	21,05	9,01	15,11	25,91	12,0	18,81
Sumatera Utara	47,27	29,29	37,46	25,29	18,03	21,57	34,70	23,2	28,65
Sumatera Barat	34,52	23,71	28,73	37,06	23,25	28,73	36,44	23,3	28,73
R i a u	52,87	29,50	41,99	35,21	25,86	31,01	42,20	27,4	35,43
J a m b i	38,64	33,33	35,71	36,11	11,91	25,52	36,70	18,9	28,35
Sumatera Selatan	48,75	35,71	42,07	47,74	25,17	36,76	48,04	28,5	38,40
Bengkulu	50,01	32,56	40,51	33,33	19,99	26,96	37,39	23,7	30,61
Lampung	40,91	35,39	38,17	47,04	31,45	40,16	45,89	32,3	39,76
Bangka Belitung	32,15	16,95	24,35	30,00	18,00	24,54	31,01	17,4	24,45
DKI Jakarta	65,33	40,86	54,48	.	.	.	65,33	40,9	54,48
Jawa Barat	49,35	33,51	42,21	55,58	28,54	42,89	52,89	30,6	42,60
Jawa Tengah	49,54	27,54	37,32	49,18	29,31	38,80	49,31	28,6	38,26
DI Yogyakarta	72,03	53,43	61,58	69,84	49,58	58,55	70,97	51,6	60,11
Jawa Timur	50,57	29,99	39,26	39,89	23,06	30,86	43,79	25,7	33,99
Banten	36,59	24,05	30,44	41,25	20,51	31,01	39,07	22,2	30,74
B a l i	62,56	48,04	55,30	34,65	20,86	27,06	46,14	30,8	37,98
Nusa Tenggara Barat	33,33	18,61	25,52	30,62	18,03	23,90	31,65	18,3	24,51
Nusa Tenggara Timur	43,19	23,68	34,15	17,05	9,09	12,95	19,97	10,4	15,11
Kalimantan Barat	16,42	9,38	12,98	30,93	32,41	31,54	26,65	24,1	25,54
Kalimantan Tengah	57,89	10,52	34,21	62,65	36,54	52,59	61,88	30,4	49,06
Kalimantan Selatan	65,39	30,93	46,29	45,61	20,97	32,77	52,21	24,6	37,50
Kalimantan Timur	43,48	27,27	36,71	17,50	12,90	15,49	29,05	19,0	24,75
Sulawesi Utara	57,69	37,50	47,22	38,46	30,64	34,16	44,65	32,7	38,17
Sulawesi Tengah	60,00	19,05	41,30	39,44	17,39	29,34	43,37	17,7	31,63
Sulawesi Selatan	33,05	22,90	27,71	39,27	17,90	27,62	37,70	19,1	27,64
Sulawesi Tenggara	38,47	25,91	29,99	28,88	7,29	17,73	29,98	11,0	19,72
Gorontalo	75,00	61,28	65,95	45,84	23,69	36,05	51,49	37,6	44,51
Maluku	66,66	41,97	52,75	27,99	11,87	19,89	34,24	17,8	25,80
Maluku Utara	69,55	32,26	48,14	59,47	36,67	49,26	61,80	35,2	48,95
Papua	42,86	66,67	50,00	29,27	23,82	27,42	32,36	32,3	32,34
INDONESIA	50,21	31,28	40,44	43,38	24,80	33,90	45,93	27,26	36,37

Sumber : BPS - Susenas Modul 2003

Tabel 7.4.1. Persentase Penduduk Lansia yang Menjadi Anggota Organisasi Tiga Bulan yang Lalu menurut Propinsi dan Jenis Organisasi, 2003

Propinsi	Jenis Organisasi					Perkotaan
	Keagamaan	Arisan	Sosial	Kematian	Lainnya	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nanggroe Aceh Darusalam	30,26	43,08	11,27	6,64	100,00	
Sumatera Utara	33,87	36,43	11,79	4,15	100,00	
Sumatera Barat	30,04	31,82	8,89	10,35	100,00	
R i a u	41,61	38,53	8,54	5,70	100,00	
J a m b i	36,61	35,66	7,21	2,67	100,00	
Sumatera Selatan	38,72	38,57	6,83	4,36	100,00	
Bengkulu	30,70	36,23	8,54	5,35	100,00	
Lampung	36,22	39,33	6,85	9,50	100,00	
Bangka Belitung	42,40	22,34	15,01	8,77	100,00	
DKI Jakarta	40,58	40,58	7,68	3,77	100,00	
Jawa Barat	28,99	44,20	9,26	5,42	100,00	
Jawa Tengah	34,36	37,53	9,37	6,54	100,00	
DI Yogyakarta	36,64	33,61	8,23	6,35	100,00	
Jawa Timur	35,46	34,21	9,81	7,12	100,00	
Banten	26,09	44,53	6,43	6,60	100,00	
B a l i	50,00	34,79	4,23	3,67	100,00	
Nusa Tenggara Barat	28,90	34,27	12,95	8,35	100,00	
Nusa Tenggara Timur	26,86	38,49	14,66	6,62	100,00	
Kalimantan Barat	38,06	36,63	7,67	4,23	100,00	
Kalimantan Tengah	41,50	40,83	8,82	2,50	100,00	
Kalimantan Selatan	41,37	37,93	5,21	3,47	100,00	
Kalimantan Timur	34,55	39,85	13,55	4,22	100,00	
Sulawesi Utara	35,29	43,93	8,77	2,47	100,00	
Sulawesi Tengah	22,13	42,16	15,90	6,90	100,00	
Sulawesi Selatan	30,82	32,96	13,41	5,44	100,00	
Sulawesi Tenggara	24,95	37,70	11,34	7,72	100,00	
Gorontalo	27,58	42,78	14,90	4,65	100,00	
Maluku	24,46	34,79	19,44	9,79	100,00	
Maluku Utara	29,71	45,84	15,71	3,94	100,00	
Papua	26,47	44,05	15,92	7,88	100,00	
INDONESIA	33,66	37,93	9,69	6,17	100,00	

Sumber : BPS - Susenas Modul 2003

Tabel 7.4.2. Persentase Penduduk Lansia yang Menjadi Anggota Organisasi Tiga Bulan yang Lalu menurut Propinsi dan Jenis Organisasi, 2003

Propinsi	Jenis Organisasi					Perdesaan
	Keagamaan	Arisan	Sosial	Kematian	Lainnya	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
Nanggroe Aceh Darusalam	34,71	34,94	13,62	7,64	100,00	
Sumatera Utara	33,32	39,55	8,86	3,40	100,00	
Sumatera Barat	27,63	35,07	10,90	9,80	100,00	
R i a u	38,48	39,79	7,09	5,13	100,00	
J a m b i	42,05	34,09	9,58	2,29	100,00	
Sumatera Selatan	49,27	37,35	2,96	2,81	100,00	
Bengkulu	26,01	42,38	9,35	4,13	100,00	
Lampung	36,44	41,27	10,49	5,18	100,00	
Bangka Belitung	41,16	33,63	13,46	-	100,00	
DKI Jakarta	48,60	37,12	10,17	1,21	100,00	
Jawa Barat	33,88	39,16	11,21	5,60	100,00	
Jawa Tengah	40,19	35,96	8,85	3,73	100,00	
DI Yogyakarta	35,87	35,45	4,81	8,91	100,00	
Jawa Timur	37,99	34,33	9,85	5,82	100,00	
Banten	30,60	42,43	9,71	4,40	100,00	
B a l i	50,91	33,03	6,63	2,47	100,00	
Nusa Tenggara Barat	31,29	40,40	8,57	6,81	100,00	
Nusa Tenggara Timur	24,88	40,67	16,92	5,32	100,00	
Kalimantan Barat	37,80	38,48	7,13	3,37	100,00	
Kalimantan Tengah	42,77	44,35	5,27	1,63	100,00	
Kalimantan Selatan	45,88	33,14	6,84	2,96	100,00	
Kalimantan Timur	34,09	41,94	9,46	4,75	100,00	
Sulawesi Utara	41,03	37,71	12,14	3,49	100,00	
Sulawesi Tengah	26,63	38,86	15,50	3,38	100,00	
Sulawesi Selatan	35,58	37,45	8,63	4,71	100,00	
Sulawesi Tenggara	29,26	32,23	13,16	6,75	100,00	
Gorontalo	37,16	46,62	8,19	0,65	100,00	
Maluku	18,06	37,30	21,63	9,06	100,00	
Maluku Utara	29,08	33,10	26,95	3,90	100,00	
Papua	48,32	37,05	10,19	0,54	100,00	
INDONESIA	37,12	36,87	9,85	4,92	100,00	

Sumber : BPS - Susenas Modul 2003

Tabel 7.4.3. Persentase Penduduk Lansia yang Menjadi Anggota Organisasi Tiga Bulan yang Lalu menurut Propinsi dan Jenis Organisasi, 2003

Propinsi	Perkotaan + Perdesaan				
	Jenis Organisasi				
	Keagamaan	Arisan	Sosial	Kematian	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
Nanggroe Aceh Darusalam	32,80	38,44	12,61	7,21	100,00
Sumatera Utara	33,60	37,99	10,33	3,77	100,00
Sumatera Barat	28,68	33,66	10,03	10,04	100,00
R i a u	40,14	39,12	7,86	5,43	100,00
J a m b i	39,31	34,88	8,39	2,48	100,00
Sumatera Selatan	43,80	37,98	4,96	3,61	100,00
Bengkulu	28,53	39,08	8,92	4,78	100,00
Lampung	36,32	40,25	8,56	7,46	100,00
Bangka Belitung	41,79	27,93	14,25	4,43	100,00
DKI Jakarta	44,52	38,88	8,90	2,51	100,00
Jawa Barat	31,49	41,63	10,25	5,51	100,00
Jawa Tengah	37,51	36,68	9,08	5,02	100,00
DI Yogyakarta	36,27	34,50	6,58	7,59	100,00
Jawa Timur	36,84	34,27	9,83	6,41	100,00
Banten	28,32	43,49	8,06	5,51	100,00
B a l i	50,47	33,88	5,47	3,05	100,00
Nusa Tenggara Barat	30,10	37,35	10,75	7,57	100,00
Nusa Tenggara Timur	25,90	39,55	15,76	5,99	100,00
Kalimantan Barat	37,93	37,55	7,40	3,80	100,00
Kalimantan Tengah	42,12	42,54	7,09	2,07	100,00
Kalimantan Selatan	43,66	35,50	6,03	3,21	100,00
Kalimantan Timur	34,35	40,76	11,77	4,45	100,00
Sulawesi Utara	38,04	40,95	10,38	2,96	100,00
Sulawesi Tengah	24,08	40,74	15,73	5,38	100,00
Sulawesi Selatan	33,33	35,33	10,89	5,06	100,00
Sulawesi Tenggara	27,17	34,88	12,28	7,22	100,00
Gorontalo	32,24	44,64	11,64	2,71	100,00
Maluku	21,27	36,04	20,53	9,43	100,00
Maluku Utara	29,44	40,47	20,44	3,92	100,00
Papua	35,67	41,10	13,51	4,79	100,00
INDONESIA	35,45	37,38	9,77	5,53	100,00

Sumber : BPS - Susenas Modul 2003

Tabel 8.1.1 Persentase Lansia menurut Propinsi dan Kategori Keterlantaran, Tahun 2003

Perkotaan				
Propinsi	Tidak terlantar	Rawan Terlantar	Terlantar	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nanggroe Aceh Darusalam	69,71	28,77	1,51	100,00
Sumatera Utara	79,89	16,53	3,58	100,00
Sumatera Barat	81,77	12,71	5,52	100,00
R i a u	67,17	21,38	11,45	100,00
J a m b i	62,24	24,49	13,27	100,00
Sumatera Selatan	62,81	25,61	11,58	100,00
Bengkulu	75,94	17,72	6,33	100,00
Lampung	58,78	25,19	16,03	100,00
Bangka Belitung	85,21	13,05	1,74	100,00
DKI Jakarta	76,55	16,72	6,72	100,00
Jawa Barat	69,18	20,98	9,83	100,00
Jawa Tengah	68,98	23,24	7,77	100,00
DI Yogyakarta	63,75	25,68	10,57	100,00
Jawa Timur	67,28	23,75	8,97	100,00
Banten	73,91	22,98	3,11	100,00
B a l i	64,81	28,49	6,70	100,00
Nusa Tenggara Barat	42,81	24,28	32,92	100,00
Nusa Tenggara Timur	69,51	18,29	12,20	100,00
Kalimantan Barat	69,47	23,66	6,87	100,00
Kalimantan Tengah	76,31	18,42	5,27	100,00
Kalimantan Selatan	72,57	21,72	5,71	100,00
Kalimantan Timur	75,95	22,78	1,26	100,00
Sulawesi Utara	53,70	24,08	22,22	100,00
Sulawesi Tengah	67,39	21,74	10,87	100,00
Sulawesi Selatan	74,30	20,88	4,82	100,00
Sulawesi Tenggara	62,53	29,97	7,50	100,00
Gorontalo	89,37	8,50	2,13	100,00
Maluku	80,03	14,53	5,44	100,00
Maluku Utara	85,20	11,10	3,70	100,00
Papua	50,00	50,00	-	100,00
INDONESIA	69,18	22,15	8,67	100,00

Keterangan:

Lansia adalah penduduk berumur 60 tahun keatas

Kriteria yang dipilih untuk menentukan derajat keterlantaran lansia adalah sebagai berikut;

1. Tidak/belum pernah sekolah atau tidak tamat SD
2. Makan makanan pokok kurang dari 14 kali dalam seminggu
3. Makan lauk pauk berprotein tinggi (nabati atau hewani), nabati < 4 kali, hewani < 2, atau kombinasi dalam seminggu
4. Memiliki pakaian kurang dari 4 stel
5. Tidak mempunyai tempat tetap untuk tidur
6. Bila sakit tidak diobati
7. Bekerja > 35 jam

Kategori terlantar;

1. Terlantar, apabila memenuhi 3 kriteria atau lebih
2. Rawan terlantar, apabila memenuhi 2 kriteria
3. Tidak terlantar, apabila memenuhi maksimal 1 kriteria

Tabel 8.1.2 Persentase Lansia menurut Propinsi dan Kategori Keterlantaran, Tahun 2003

Perdesaan

Propinsi	Tidak terlantar	Rawan Terlantar	Terlantar	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nanggroe Aceh Darusalam	57,33	31,11	11,56	100,00
Sumatera Utara	46,22	31,65	22,13	100,00
Sumatera Barat	64,02	25,00	10,98	100,00
R i a u	58,92	23,26	17,83	100,00
J a m b i	55,72	26,56	17,72	100,00
Sumatera Selatan	37,08	33,11	29,80	100,00
Bengkulu	41,56	37,64	20,79	100,00
Lampung	37,89	34,78	27,33	100,00
Bangka Belitung	52,73	39,09	8,18	100,00
DKI Jakarta	-	-	-	-
Jawa Barat	54,10	32,29	13,60	100,00
Jawa Tengah	56,40	29,85	13,75	100,00
DI Yogyakarta	38,41	39,82	21,78	100,00
Jawa Timur	43,12	36,78	20,10	100,00
Banten	58,23	29,11	12,66	100,00
B a l i	48,52	40,30	11,18	100,00
Nusa Tenggara Barat	26,82	32,94	40,24	100,00
Nusa Tenggara Timur	20,99	26,79	52,22	100,00
Kalimantan Barat	36,54	31,54	31,92	100,00
Kalimantan Tengah	56,29	24,44	19,26	100,00
Kalimantan Selatan	53,78	31,09	15,12	100,00
Kalimantan Timur	28,18	47,89	23,94	100,00
Sulawesi Utara	61,39	25,25	13,36	100,00
Sulawesi Tengah	49,24	32,34	18,41	100,00
Sulawesi Selatan	42,86	37,86	19,29	100,00
Sulawesi Tenggara	36,55	32,79	30,66	100,00
Gorontalo	56,97	22,10	20,93	100,00
Maluku	54,72	32,35	12,93	100,00
Maluku Utara	61,18	20,90	17,92	100,00
Papua	29,04	35,49	35,47	100,00
INDONESIA	48,35	32,82	18,83	100,00

Keterangan:

Lansia adalah penduduk berumur 60 tahun keatas

Kriteria yang dipilih untuk menentukan derajat keterlantaran lansia adalah sebagai berikut;

1. Tidak/belum pernah sekolah atau tidak tamat SD
2. Makan makanan pokok kurang dari 14 kali dalam seminggu
3. Makan lauk pauk berprotein tinggi (nabati atau hewani), nabati < 4 kali, hewani < 2, atau kombinasi dalam seminggu
4. Memiliki pakaian kurang dari 4 stel
5. Tidak mempunyai tempat tetap untuk tidur
6. Bila sakit tidak diobati
7. Bekerja > 35 jam

Kategori terlantar;

1. Terlantar, apabila memenuhi 3 kriteria atau lebih
2. Rawan terlantar, apabila memenuhi 2 kriteria
3. Tidak terlantar, apabila memenuhi maksimal 1 kriteria

Tabel 8.1.3 Persentase Lansia menurut Propinsi dan Kategori Keterlantaran, Tahun 2003

Perkotaan + Perdesaan				
Propinsi	Tidak terlantar	Rawan Terlantar	Terlantar	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nanggroe Aceh Darusalam	61,09	30,40	8,51	100,00
Sumatera Utara	61,21	24,92	13,87	100,00
Sumatera Barat	67,83	22,36	9,81	100,00
R i a u	62,24	22,50	15,26	100,00
J a m b i	57,53	25,99	16,48	100,00
Sumatera Selatan	45,01	30,80	24,19	100,00
Bengkulu	50,84	32,27	16,89	100,00
Lampung	42,12	32,84	25,04	100,00
Bangka Belitung	68,93	26,11	4,97	100,00
DKI Jakarta	76,55	16,72	6,72	100,00
Jawa Barat	60,48	27,51	12,01	100,00
Jawa Tengah	60,96	27,45	11,59	100,00
DI Yogyakarta	51,50	32,51	15,99	100,00
Jawa Timur	52,11	31,93	15,96	100,00
Banten	65,55	26,25	8,20	100,00
B a l i	54,82	35,73	9,45	100,00
Nusa Tenggara Barat	32,86	29,67	37,47	100,00
Nusa Tenggara Timur	25,93	25,92	48,14	100,00
Kalimantan Barat	47,19	28,99	23,82	100,00
Kalimantan Tengah	60,14	23,29	16,57	100,00
Kalimantan Selatan	60,36	27,81	11,83	100,00
Kalimantan Timur	49,03	36,93	14,04	100,00
Sulawesi Utara	59,03	24,89	16,09	100,00
Sulawesi Tengah	52,71	30,32	16,97	100,00
Sulawesi Selatan	50,52	33,72	15,76	100,00
Sulawesi Tenggara	40,75	32,34	26,91	100,00
Gorontalo	66,13	18,26	15,61	100,00
Maluku	59,27	29,14	11,59	100,00
Maluku Utara	67,91	18,15	13,94	100,00
Papua	33,60	38,65	27,75	100,00
INDONESIA	56,20	28,80	15,00	100,00

Keterangan:

Lansia adalah penduduk berumur 60 tahun keatas

Kriteria yang dipilih untuk menentukan derajat keterlantaran lansia adalah sebagai berikut;

1. Tidak/belum pernah sekolah atau tidak tamat SD
2. Makan makanan pokok kurang dari 14 kali dalam seminggu
3. Makan lauk pauk berprotein tinggi (nabati atau hewani), nabati < 4 kali, hewani < 2, atau kombinasi dalam seminggu
4. Memiliki pakaian kurang dari 4 stel
5. Tidak mempunyai tempat tetap untuk tidur
6. Bila sakit tidak diobati
7. Bekerja > 35 jam

Kategori terlantar;

1. Terlantar, apabila memenuhi 3 kriteria atau lebih
2. Rawan terlantar, apabila memenuhi 2 kriteria
3. Tidak terlantar, apabila memenuhi maksimal 1 kriteria